

RINGKASAN

HASIL-HASIL KELITBANGAN

TAHUN 2018-2019



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., berkat Rahmat dan Karunia-Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Ciamis telah selesai menyusun Buku Ringkasan Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2018-2019.

Penyusunan Buku Ringkasan Hasil-hasil Kelitbangan ini merupakan hasil ringkasan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan di Perguruan Tinggi swasta di Kabupaten Ciamis yang telah dipilih. Buku himpunan ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam upaya mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan dapat dijadikan referensi yang akan diterapkan pada Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Kami mengharapkan adanya masukan, koreksi dan saran yang membangun, agar buku Ringkasan Hasil-Hasil Kelitbangan edisi berikutnya dapat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi yang memerlukan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ciamis, November 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis



Drs. H. ANDANG FIRMAN T, MT.
NIP. 19740919 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAGIAN I HASIL KAJIAN MENGENAI PENANGANAN KEMISKINAN

1.1 Perananan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Ciamis	1
1.2 Strategi Penigkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Desa Sukakerta Kec. Panumbangan.....	7
1.3 Implementasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Ciamis	17

BAGIAN II HASIL KAJIAN MENGENAI TENAGA KERJA DAN INDUSTRI

2.1 Analisis Potensi Tambahan Kesempatan Kerja Melalui Pengukuran Kualitas <i>Website</i> UMKM dengan Metode <i>Webqual</i> 4.0.....	23
2.2 Analisis Variabel Logistik Pasar Terhadap Volume Penjualan Limbah B 3 Pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kab. Ciamis	30
2.3 Perancangan Alat Bantu Pengolahan Limbah Untuk Meningkatkan Kinerja dan Pendapatan Kerja Pada <i>Home Industry</i> Maya Lestari di Kab. Ciamis	37

BAGIAN III HASIL KAJIAN MENGENAI EKONOMI DAN UMKM

3.1 Kajian Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berdaya Saing dalam Menghadapi Era Industri 4.0 di Provinsi Jawa Barat.....	44
3.2 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal sebagai Sumber Baru Pendapatan Asli Daerah Kab. Ciamis	55
3.3 Penentuan Prioritas Strategi Pengembangan IKM menggunakan Metode <i>Analisis Hierarchy Process</i>	64
3.4 Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah dengan Metode AHP Topsis pada UMKM Gula Semut di Kec. Pamarican	73

BAGIAN IV HASIL KAJIAN MENGENAI KEPARIWISATAAN

4.1 Pengelolaan Obyek Wisata Budaya dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Situ Lengkong Panjalu).....	78
4.2 Pengelolaan Obyek Wisata Kampung Sawah oleh Bumdes Wibawa Mukti dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Talagasari Kec. Kawali	87
4.3 Identifikasi Potensi Desa Wisata Berbasis <i>Community Based Tourism</i>	92
4.4 Analisis Potensi Agrowisata di Kab. Ciamis	99

BAGIAN V HASIL KAJIAN MENGENAI PERTANIAN DAN PETERNAKAN

- 5.1 Efektivitas Zat Anti Bakteri Ekstrak Etanol Bunga Kecombrang Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium Acnes* secara *In Vitro* 108
- 5.2 Rancang Bangun Alat Penetas Telur dan Kandang Indukan Puyuh Kapasitas 50 Telur 113
- 5.3 Penentuan Saluran Distribusi Telur Ayam dengan Menggunakan Metode *ROI* pada IKM Barokah Jaya di Kec. Kawali 121

BAGIAN VI HASIL KAJIAN MENGENAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 6.1 Pelestarian dan Pemanfaatan Tradisi Hajat Bumi untuk Meningkatkan Kreativitas Masyarakat Miskin Desa Jagabaya Kec. Panawangan 128
- 6.2 Identifikasi Potensi Pemanfaatan Aset Melalui Model *Build Operate Transfer* untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Ciamis 132

BAGIAN VII HASIL KAJIAN MENGENAI KESEHATAN MASYARAKAT

- 7.1 Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien *Herniorapy* di RSUD Ciamis..... 140
- 7.2 Manajemen Terapeutik Tentang Kontrol Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di RSUD Ciamis..... 144
- 7.3 Gambaran Perilaku Cuci Tangan pada Anak di MI Bojongsari Kec. Ciamis 148
- 7.3 Analisis Faktor Terkait Bayi Berat Lahir Rendah di Puskesmas Lumbang 154

BAGIAN VIII PENUTUP 160

BAGIAN I
HASIL KAJIAN
MENGENAI PENANGANAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN CIAMIS

1.1 Peranan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis

(Yuyun Susanti¹, Nur Rizqi Arifin² _ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung mulai tahun 1997 telah menimbulkan pemikiran kembali tentang pengentasan penanggulangan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang berlangsung sekitar 30 tahun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut secara signifikan. Mulai tahun 1970-an hingga awal 1990-an, angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 50 persen. Namun, sejak krisis berlangsung mulai pertengahan 1997, angka kemiskinan naik dua kali lipat, sehingga menghapus prestasi tersebut, dan membuat upaya pengentasan penanggulangan kemiskinan kembali menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilaksanakan dengan serius (Suryahadi, 2003).

Pemikiran terkini mengenai pengentasan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat upaya pengentasan penanggulangan kemiskinan tidak berhasil (Blaxall, 2000), salah satu penyebabnya adalah karena program dan proyek pengentasan penanggulangan kemiskinan menjadi sarang subur terjadinya praktek KKN. Konsensus yang timbul dari pemikiran ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang diperlukan agar usaha pengentasan penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Salah satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi kemiskinan, terutama mengacu rilis BPS bahwa jumlah kemiskinan per September 2016 mencapai 27,76 juta atau 10,7% dari total penduduk. Jumlah itu ternyata turun 0,89% jika dibandingkan dengan periode Maret 2016 yang mencapai 28,01 juta atau 10,86% dari total penduduk. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan periode September 2015, ternyata penurunan kali ini mencapai 1,22%. Argumen yang mendasari penurunan jumlah kemiskinan ialah turunnya harga sejumlah harga pangan periode Maret- September 2016. Ilham (Gemiharto & Evi Rosfiantika, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (UNPAD) Volume VII No. 1 / Juni 2017).

Berdasarkan data yang di kutip dari <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/1344-permasalahan-kemiskinan-di-kabupaten-ciamis> tahun 2018 bahwa di Kabupaten Ciamis yang terbanyak adalah sebagian besar bekerja berada di sektor pertanian dengan status pekerjaan sebagai buruh tani yang sewaktu-waktu bisa menganggur (44,48% RTS), disusul di sektor perdagangan (11,57% RTS), industri (4,57%), bangunan (4,46% RTS), penerima pendapatan (24,44%) dan lain-lain sebesar (10,53%). Jumlah "lain-lain" tersebut belum diketahui secara pasti apakah "lain-lain" itu berarti penganggur atau setengah penganggur atau pekerja lain.

Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk membuat Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) yang disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Konsep pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi; (Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014). Konsep seperti ini sudah pernah dibuat di daerah lain seperti Kabupaten Sragen, Kabupaten Berau di Kalimantan dan Sukabumi. Namun konsep yang paling lengkap yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Fakta di lapangan sangat jarang kepala daerah yang mau mengakui di daerahnya terdapat warga miskin oleh karena itu peran pemerintah dalam meninjau kembali data tersebut untuk kesahihannya demi tercipta kesejahteraan masyarakat. Selain itu kebiasaan kepala daerah enggan mengakui di daerahnya terdapat warga miskin, tapi mereka menjadi giat ketika ada batuan untuk pogram kemiskinan. Dengan demikian peran pemerintah bagaimana upaya tersebut untuk mendata ulang dan mau mengakui ada warga miskin dan melakukan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh LTPKD. Pemda mempersiapkan segala aspek dan sistem yang menunjang tercapainya program pemberantasan kemiskinan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah-masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi di Kabupaten Ciamis?
- b. Bagaimana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis?
- c. Bagaimana penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; pengkajian,

penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan di Kabupaten Ciamis ?

- d. Bagaimana peranan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah (LTPKD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis ?

2. Hipotesa

Layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah (LTPKD) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

3. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dibuat untuk lebih terarah dengan menggunakan observasi ilmiah, yang terdiri dari: (1) Observasi tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian; (2) Dirancang dan dilaksanakan secara sistematis; (3) Merekam secara sistematis seluruh hal yang berhubungan dengan kejadian, keadaan, dan apapun yang dianggap baru (aneh) berkaitan dengan proporsi penelitian; (4) Menggunakan kendali-kendali yang tepat; (5) Melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, serta didasari kejadian yang diamati.

4. Tinjauan Teori Substansi

Menurut Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 tahun 2014 Tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bermartabat; Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat; Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan

dan penanggulangan kemiskinan; Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat LTPKD adalah lembaga pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi LTPKD pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 tahun 2014 Pasal 4, 5 bahwa :

Pasal 4

- a) LTPKD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LTPKD.
- c) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LTPKD.

Pasal 5

- 1) LTPKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTPKD mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

1. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan,

kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi di Kabupaten Ciamis.

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
3. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
4. Peranan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah (LTPKD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami masalah baik dari sisi regulasi maupun tata laksana terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan tertutup. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dan organisasi masyarakat, antara lain kelemahan dalam perencanaan dan proposal, pertanggungjawaban fiktif, pemotongan dana oleh panitia, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, dan adanya penerima dana bansos yang sama. Masyarakat Kabupaten Ciamis sulit/tidak mengetahui kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan kepada penerima, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Untuk menanggulangi hal tersebut di atas, maka peran LTPKD berperan dalam mengawasi, mendata dan mendorong masyarakat untuk bangkit bersama dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi.

D. Hasil Analisa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Tentang Peranan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis yang meliputi empat aspek yaitu:

1. Adanya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi di Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial

dan ekonomi berdasarkan LAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan pada tahun 2018. Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan bahwa rata-rata angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan.

2. Adanya pelaksanaan dan pendampingan sehingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis berjalan baik dan penekanan angka kemiskinan setiap tahunnya menurun.
3. Berfungsinya bagian penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Kepala daerah mengakui bahwa terdapat warga miskin oleh karena itu peran pemerintah dalam meninjau kembali data tersebut untuk kesahihannya demi tercipta kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah mengakui adanya warga miskin dan membuat program kemiskinan. Peran pemerintah mendata ulang dan mau mengakui ada warga miskin dan melakukan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh LTPKD. Pemda mempersiapkan segala aspek dan sistem yang menunjang tercapainya program pemberantasan kemiskinan.
4. Adanya peranan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah (LTPKD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis, sehingga angka kemiskinan setiap tahun di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,72%, pada tahun 2014 sebesar 8,59%, pada tahun 2015 sebesar 8,98%, pada tahun 2016 sebesar 8,42% dan pada tahun 2017 sebesar 8,2%.

E. Rekomendasi

1. Sebaiknya pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu lebih di optimalkan sehingga aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi di Kabupaten Ciamis dapat ditingkatkan.
2. Sebaiknya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ditingkatkan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan peran serta masyarakat agar pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis lebih baik.
3. Sebaiknya penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis tetap dipertahankan peran dan fungsi bahkan ditingkatkan dalam

pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan di Kabupaten Ciamis agar angka kemiskinan menurun sehingga IPM meningkat.

4. Sebaiknya peranan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) di Kabupaten Ciamis ditingkatkan dan dipertahankan walaupun adanya pergantian kepala daerah agar sehingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis lebih baik.

F. Daftar Pustaka

- Banerjee and Newman, (1993). *Occupational Choice and the Process of Development*. Journal of Political Economy, 1993, vol. 101, issue 2, pages 274-98.
- Blaxall, John (2000), *Governance and Poverty, Paper presented at the Joint Workshop on Poverty Reduction Strategies in Mongolia*, The World Bank, Ulan Bator, Mongolia, October 4 to 6.
- [http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/1344-permasalahan-kemiskinan-di-kabupaten-ciamis tahun 2018](http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/1344-permasalahan-kemiskinan-di-kabupaten-ciamis-tahun-2018).
- Ilham (Gemiharto & Evi Rosfiantika, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (UNPAD) Volume VII No. 1 / Juni 2017).
- Kurniawan Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.01 Juli 2017 ISSN Online : 2502-2024 Universitas Indo Global Mandiri.
- Noor Zuhdiyaty Jibeka Volume 11 Nomor 2 Februari 2017: 27 – 31 Unbraw.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD).
- Wan Nurulashiah binti Wan Mustapa 1, Abdullah Al Mamun 2, ID and Mohamed Dahlan Ibrahim. *Economic Impact of Development Initiatives on Low-Income Households in Kelantan, Malaysia*. Soc. Sci. 2018, 7, 118; doi:10.3390/socsci7070118 Published: 23 July 2018. www.mdpi.com/journal/socsci

1.2 Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Di Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

(Nina Herlina¹, Alis Yulia² _ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian dan industri. Pengembangan agroindustri ini, sekaligus dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang sejalan dengan berkembangnya kegiatan di dalam sektor pertanian (*on-farm*) dan di luar pertanian (*off-farm*) melalui proses pengolahan serta kegiatan jasa perdagangan komoditas primer. Berkembangnya kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai tambah, diversifikasi produksi perdesaan, pendapatan

petani, serta mempercepat akumulasi kapital perdesaan (Bintoro, 2002). Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk sektor pertanian dan industri kecil adalah komoditas yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan sistem pemasaran yang tidak terdistorsi, penyediaan sarana transportasi dan distribusi produk, serta pengembangan kemitraan dan restrukturisasi sistem kelembagaan pertanian dan agroindustri.

Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis merupakan sebuah desa yang menjadi akses penghubung antara kabupaten disekitarnya. Mayoritas mata pencaharian masyarakat lokal bekerja sebagai petani dan berkebun, karena sebesar 42% wilayahnya merupakan area pesawahan. Selain merupakan salah satu sentra penghasil komoditi cabai merah di Kabupaten Ciamis, di desa Sukakerta masyarakat mengembangkan usaha industri rumah tangga berbagai macam makanan ringan, pekerjaannya adalah masyarakat di sekitar daerah tersebut yang tergolong masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) yang berada di Desa Sukakerta untuk pemasarannya dilakukan ke pasar tradisional atau dijajakan langsung di depan rumah dan belum masuk pasar modern, hal ini tentu saja dengan kurangnya pemasaran dalam pengembangan industri pangan akan berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha sekaligus pekerjaannya yang masih dibawah kecukupan. Untuk itu diperlukan adanya legalitas produk dari produk pangan itu sendiri dengan dimilikinya Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SP-IRT) agar produknya dapat dikembangkan lebih luas dan bisa masuk ke pasar modern, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerjaannya sekaligus dapat menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*).

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) ?

- c. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) ?

2. Tinjauan Teori

Strategi mempunyai peranan penting, begitu juga dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan industri rumah tangga (*home industry*).

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut (Dermawan Wibisono, 2006).

Tujuan strategi adalah untuk mencari kekuatan-kekuatan sumber daya dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Tujuan strategi ada ketika semua pegawai dan tingkatan perubahan berkomitmen untuk mencapai kriteria kinerja spesifik dan signifikan. Tujuan strategi telah terbentuk ketika orang-orang percaya dengan semangat yang menyala-nyala terhadap produk dan industri mereka dan ketika mereka memutuskan perhatian sepenuhnya pada kemampuan perusahaan untuk mengatasi para pesaingnya (Michael Hitt, 2001).

b. Pengertian Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) dapat didefinisikan sebagai usaha rumah tangga adalah usaha yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengusaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan, dijelaskan mengenai industri rumah tangga dijelaskan : “industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

c. Produk Pangan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 18 Tahun 2012, menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pada pasal 1 angka 4 huruf (h) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) adalah makanan yang sangat rentan akan kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Arti kualitas dalam hal ini lebih diutamakan pada kemampuan makanan bertahan dalam batasan waktu yang relatif lama dan mutu dari makanan tersebut.

d. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT)

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka peredaran pangan.

Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah :

1. Pangan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018, yaitu : a. Hasil olahan daging kering, b. Hasil olahan ikan kering, c. Hasil olahan unggas kering, d. Hasil olahan sayur kering, e. Hasil olahan kelapa, f. Tepung dan hasil olahan tepung, g. Minyak dan lemak, h. Selai, jeli dan sejenisnya, i. Gula, kembang gula dan madu, j. Kopi dan teh kering, k. Bumbu, l. Rempah-rempah, m. Hasil olahan buah, o. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi. P. Minuman serbuk
2. Pangan yang merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

3. Pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar(*bulk*).

Sedangkan beberapa jenis pangan yang TIDAK diizinkan didaftarkan SPP-IRT adalah :

1. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial ataupun pasteurisasi
2. Pangan yang diproses dengan pembekuan (*frozen food*) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
3. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
4. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

e. Pengertian Perizinan Dan Sertifikat Industri Pangan

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2016), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan Sementara untuk Pangan Industri Rumah Tangga dalam ketentuannya harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-P Industri Rumah Tangga). Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga diwilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi Industri Rumah Tangga

(Pasal 1 Ayat (13)Perka BPOM Hk. 03/2012). Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perka BPOM Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan dengan tegas: “Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”.

f. Syarat-Syarat Memperoleh Sertifikat Industri Pangan

Dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, pada pasal 2 ayat 2 SPP-IRT diberikan kepada Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga memenuhi syarat; dan
3. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*).
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*).
3. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*).

C. Permasalahan

Strategi pemasaran dengan dimilikinya legalitas produk berupa SP-IRT sangat penting dalam pengembangan produk pangan industri rumah tangga dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Akan tetapi terhadap kepemilikan SP-IRT tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaku usaha industri rumah tangga.

Hasil pengamatan di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang merupakan lokasi dalam penelitian ini bahwa banyak produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) yang perlu memiliki SP-IRT.

D. Hasil Analisa

1. Menganalisa Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) di Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Untuk menumbuhkembangkan industri pangan, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pangan produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Pangan Industri Rumah Tangga memang dikhususkan untuk hasil produksi eceran dalam kemasan yang sesuai, untuk memproduksinya, selain yang secara tegas ditentukan lain atau dilarang untuk diproduksi berdasarkan kategori pangan. Sebab untuk kategori Pangan ada yang memang diwajibkan untuk mendapatkan Izin Edar BPOM.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2016), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan Sementara untuk Pangan Industri Rumah Tangga dalam ketentuannya harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga (SP-P Industri Rumah Tangga). Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (Pasal 1 Ayat (13) Perka BPOM Hk. 03/2012). Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perka BPOM Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan dengan tegas: “Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”. Adanya kewajiban izin edar tersebut adalah sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dari pangan yang tidak layak edar, namun demikian masih saja banyak makanan atau produk pangan industri rumah tangga yang tidak mempunyai SPP-IRT.

Begitu juga yang terjadi di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, masih terdapat beberapa produk industri rumah tangga yang belum mempunyai SPP-IRT, hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pendapatn karena produknya hanya dijual disekitar wilayah desa, dijajakan sendiri di warung dan juga di pasar tradisional. Karena produk tersebut belum mempunyai SPP-IRT, maka tidak bisa memperluas pemasarannya untuk bisa masuk ke pasar modern seperti Mall, Supermarket, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu strategi agar produk tersebut dapat masuk ke pasar moder yaitu melalui legalitas produk artinya produk tersebut harus mempunyai izin edar berupa SPP-IRT. Dengan dimilikinya SPP-IRT tersebut untuk suatu produk industri rumah tangga akan dengan mudah memasarkan produknya sehingga pendapatan bertambah sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*)

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Sertifikasi Terhadap Produksi Makanan Ringan di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Beberapa kendala tersebut antara lain: a) kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha industri rumah tangga untuk memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), b) Terbatasnya jumlah aparat dalam upaya pengawasan izin edar produk industri rumah tangga dikalangan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan sistem yang sudah berjalan.

3. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*), antara lain pertama adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ditujukan bagi semua Industri Rumah Tangga yang sudah mendaftarkan produknya di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Industri Rumah Tangga Pangan diharapkan dapat mempercepat penerapan praktek keamanan pangan yang baik sesuai standar Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT). Tujuan dari penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan produsen pangan Industri Rumah Tangga (IRT) sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
2. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.
3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen pangan Industri Rumah Tangga.

F. Rekomendasi

Dalam melakukan usahanya pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga perlu menggunakan strategi dalam pengembangan usahanya dengan dimilikinya izin edar atau SPP-IRT, untuk memperluas pemasaran produknya tidak hanya di pasar tradisional saja tapi ke pasar modern sehingga dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dapat terus berkoordinasi dengan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel dan tidak memiliki SPP-IRT.

Dinas atau Instansi terkait memiliki tim pengawas yang cukup, serta memiliki kemampuan di bidangnya dan sudah terlatih maupun berpengalaman, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal serta dalam Pengawasan terhadap Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga harus diterapkan sanksi yang tegas terhadap para pelaku usaha

yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

G. Daftar Pustaka

- Bintoro, 2002, *Pengantar Tentang Teori dan Trategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Helmi, Faisal, Zaini, 2014, *Pembangunan Perdesaan*, Artikel.
- James C Craig dab Robet M Grant, *Strategi Manajement*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Cides.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi ketiga, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Loekman, Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Michael Hitt, *Manajemen Strategi Daya Saing dan Globalisasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Ridwan, HR., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Seokanto, Soerjono, 1981,*Pengantar Hukum Normatif*, Jakarta :PT, Raja Grafindo Interpretama.
- Soegijoko, Budhy Tjahyati, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Soetrisno L. 2001. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suharto ES, 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Bandung : STKS Press.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Rajawali.
- Wibisono, Dermawan, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Erlangga;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

1.3 Implementasi Regulasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis (Hendi Budiawan_ Universitas Galuh)

A. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan suatu negara, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan, tidak akan pernah bisa dilepaskan dari dimensi politik dan dimensi hukum. Di Indonesia sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi, kedua dimensi di atas bahkan menjadi prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi, pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin, menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan, serta menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu untuk membentuk Regulasi Kabupaten Ciamis tentang Penanggulangan Kemiskinan, telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan Regulasi Penanggulangan Kemiskinan antara lain dalam hal program penanggulangan kemiskinan tidak dikoordinasikan oleh karena itu akan sulit untuk bersinergi, tumpang tindih dan tidak efisien. Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Dibentuknya Lembaga Pemerintah yakni Lembaga Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi Regulasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Regulasi Penanggulangan Kemiskinan ?
3. Seperti apa upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi Regulasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis ?

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian. Dalam penulisan Laporan, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yang berada di bawah disiplin ilmu hukum. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam implementasi Regulasi, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini dilakukan, adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman di bidang Ilmu Hukum guna memecahkan permasalahan khususnya terkait implementasi Regulasi Penanggulangan Kemiskinan;
2. Memberikan manfaat terhadap masyarakat agar paham terhadap Regulasi yang berlaku dan bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan;
3. Sebagai acuan bagi masyarakat baik Pemerintah dalam penerapan sebuah kebijakan.

C. Permasalahan

Dengan meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran, membuat kita menjadi khawatir dengan hal itu. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan Regulasi Penanggulangan Kemiskinan antara lain dalam hal program penanggulangan kemiskinan tidak dikoordinasikan oleh karena itu akan sulit untuk bersinergi, tumpang tindih dan tidak efisien. Dibentuknya Lembaga Pemerintah yakni Layanan Terpadu Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Oleh karena demikian penelitian ini dibuat guna mengetahui seberapa baik penerapan regulasi undang-undang tersebut dalam kenyataannya untuk mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Ciamis.

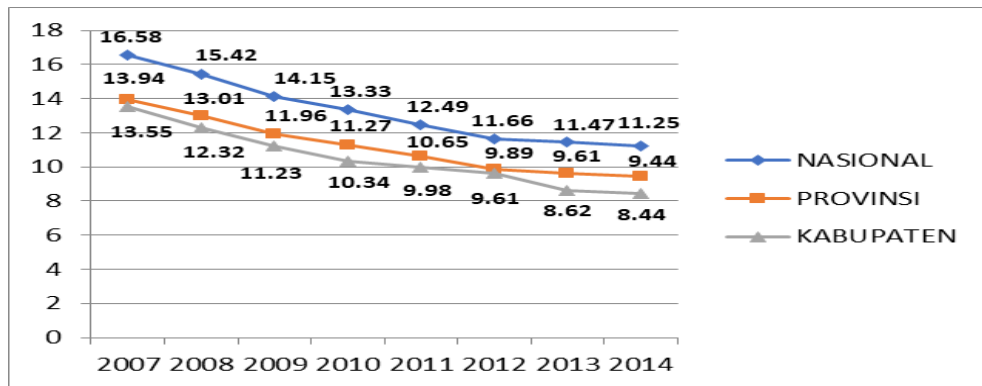
D. Hasil Analisa

Karena dalam penelitian ini peneliti akan lebih mengkhususkan pembahasan tentang peran penting objek penelitian yaitu LTPKD maka sedikit banyaknya hasil penelitian yang didapat berhubungan langsung dengan Lembaga tersebut. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) yang merupakan inovasi daerah Kabupaten Ciamis, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 29 Januari 2015. Dua program LTPKD diantaranya Ciamis Calakan dan Ciamis Waluya, yang dimana bentuk kegiatannya meliputi jaminan Kesehatan seluruh masyarakat miskin di luar kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS), operasi katarak, khitanan masal dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pihak yang berhak untuk mendapat pelayanan dari program Ciamis Waluya diantaranya masyarakat kurang mampu diluar kuota KIS, kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan bayi lahir dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jumlah besaran pembayaran premi ke BPJS Kesehatan Rp.25.500/jiwa/bulan dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sedangkan untuk program kedua yaitu Ciamis Calakan bentuk penerimaannya melalui beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin yang terdaftar di Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2017 dan atau *indicator local* kemiskinan daerah yang belum difasilitasi oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), peserta didik yang berasal dari panti asuhan atau sosial, peserta didik korban bencana, peserta didik yang masih duduk di SMP kelas 7 an kelas 8. Besarannya adalah Rp.750.000/siswa/tahun. Bentuk penyalurannya melalui simpanan atau tabungan di Kantor POS atau bank yang ditunjuk bisa dicairkan atau tetap bisa disimpan sebagai tabungan. Pada akhir Bulan Januari Tahun 2015, LTPKD sudah merealisasikan beberapa kegiatan diantaranya aspek data dan informasi yaitu melaksanakan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) ke dalam sistem informasi kemiskinan daerah sebanyak 119.840 RTS/405.581 jiwa. Selanjutnya ada aspek pengadukan masyarakat, aspek Kesehatan, aspek Pendidikan dan aspek sosial ekonomi.

Dalam realisasinya, program penanggulangan kemiskinan tahun 2019 dalam realisasi fisik program Ciamis Waluya tercatat 39.341 jiwa, realisasi fisik program Ciamis Calakan tercatat 609 siswa dan realisasi program walagri tercatat 268 rumah. Jumlah penduduk miskin di Ciamis tahun 2017 sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59%. Sedangkan di tahun 2018 jumlahnya 85.720 jiwa atau sebesar 7,22%. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024, target tahun 2020 persentase kemiskinan di angka 7,0%. Dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2020 bahwa persentase penduduk miskin berada pada angka 7,48%. Hadirnya kontradiksi antara target pemerintah dengan kondisi awal persentase penduduk miskin tahun 2018 penduduk miskin sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22%,

sedangkan pada tahun 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 7,48%.

Berikut adalah grafik persentase kemiskinan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Ciamis tahun 2007-2014:



Gambar 1. Grafik persentase kemiskinan Nasional, provinsi dan Kabupaten Ciamis Tahun 2007-2014. LTPKD 2014

Di dalam pelaksanaannya, LTPKD telah melaksanakan beberapa kegiatan kunjungan kerja ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (UPTPK) Kabupaten Sragen pada tanggal 1 Oktober 2015. Selain hal tersebut ada juga beberapa kegiatan diantaranya sebagai Panitia pelaksana Bakti Sosial pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 bertempat di Dusun Buni Hilir Desa Situmandala Kecamatan Rancah, dengan kegiatan pembagian paket sembako, pengobatan gratis, pelayanan kependudukan gratis, bantuan ke Masjid dan bantuan lainnya. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa program ini tidak dapat terlaksana dengan baik, karena dapat dibuktikan melalui fakta yang ada, saat proses pencarian data untuk melihat sejauh mana angka kemiskinan yang tersedia hanya tahun-tahun yang telah lalu.

E. Rekomendasi

Implementasi regulasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan inovasi dari Bupati Ciamis dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD), dengan demikian LTPKD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mendapatkan layanan yang layak, sekaligus sebagai implementasi inovasi daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. menjadi salah satu penyebab sulitnya dalam menurunkan angka kemiskinan, hal itu bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kerentanan masyarakat dalam menghadapi persaingan, konflik dan tindak kekerasan, lemahnya penanganan masalah kependudukan dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi.

Dengan adanya LTPKD sehingga memunculkan beberapa program dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis diantaranya program kartu waluya dan kartu calakan. Juga dilakukan beberapa upaya lain seperti bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah lebih memperjelas tupoksi dari Lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam hal mengurus kemiskinan di Kabupaten Ciamis, agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan inkonsistensi dalam penetapan target atau sasaran tidak terjadi. Sehingga visi dari Bupati Ciamis dalam menanggulangi kemiskinan dapat terlaksana dengan baik.

F. Daftar Pustaka

- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF: Yogyakarta
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk) (2nd ed.)*. UGM Press: Yogyakarta.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly: Washington, D.C.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan*: Yogyakarta.
- Nanga, M. 2004. *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Bappenas: Jakarta.
- Nazir, M. 1998. *Dampak Transfer Fiscal terhadap Kemiskinan di Indonesia*. World Bank: Jakarta.
- Parwato. 2001. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara: Jakarta. Volume 5 No. 2 - September 2017 277.
- Sadono. Sukirno. 2002. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Soekanto soerjono. 1986. *Penanggulangan Kemiskinan Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana*. Wilaya: Jakarta.
- Soetrisno L. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Suharto ES. 2003. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar-dasar Kebijaksanaan*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Royat Sujana. 2015. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan: Jakarta.

- Yacoub, Yarlina. 2010. *Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi kalimantas barat*. Jurnal Eksos vol.8 no.3
- Wirosardjono, Soetjipto. 1992. *Pengentasan Kemiskinan dan Statistik*. dalam buku Tika Noorjaya. *Strategi, Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan*. CFMS: Jakarta.

BAGIAN II
HASIL KAJIAN
MENGENAI TENAGA KERJA DAN INDUSTRI

2.1 Analisis Potensi Tambahan Kesempatan Kerja Melalui Pengukuran Kualitas Website UMKM dengan Metode Webqual 4.0

(Muhktar Abdul Kader¹, Risna Kartika² _Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih mejadi salah satu permasalahan di Indoneisa. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan. Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2019).

Berbagai kebijakan pemerintah direncanakan dan dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya ialah membuka lapangan kerja baru dengan memperkuat UMKM, karena peran UMKM itu sendiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong inovasi (Purwanto, 2007). Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu cara dalam menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE2016) pencacahan lengkap, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia 26,26 juta usaha atau memiliki kontribusi 98,33 persen (BPS, 2019).

Di Indonesia sendiri jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup banyak, sehingga peranan UMKM di perekonomian nasional terhitung sangat penting. UMKM perlu terus menerus mengembangkan skala usahanya, hal ini tentu perlu ditunjang oleh banyak faktor. Salah satunya ialah dunia teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi ini berkaitan dengan pasar digital, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat ialah peluang emas bagi pelaku pasar *e-commerce*, daya saing akan meningkat dan UMKM perlu memanfaatkan secara maksimum peluang ini. Masalah klasik yang timbul ketika suatu perusahaan menggunakan *Online store* ialah membujuk konsumen untuk mau membeli suatu produk yang tidak dapat dilihat secara langsung. Konsumen *e-commerce* memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mengetahui kualitas produk dan melakukan pengujian

terhadap produk yang diinginkan melalui website. Sehingga dapat dikatakan bahwa *website* menjadi patokan apakah suatu perusahaan menarik, dapat dipercaya dan memiliki kualitas produk yang baik. *Website* suatu perusahaan harus mempresentasikan kehadiran perusahaan dimata pelanggan secara virtual, sehingga konsumen menjadi percaya dan mau melakukan transaksi secara *Online* melalui *website* perusahaan tersebut (Kusumawijaya & Karyati, 2016). Hal ini tentu akan berpengaruh pada daya saing dan peningkatan *market share* perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan adanya pengukuran kualitas suatu *website* berdasarkan persepsi pengguna akhir untuk mengetahui seberapa baik kualitas *website* mempresentasikan perusahaan. Kualitas dapat diukur bersarakan sudut pandang kepuasan pengguna akhir agar dapat memanfaatkan *website* secara optimal (Nada & Wibowo, 2015). Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode *Webqual 4.0*. *Webqual 4.0* ialah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kualitas *website* yang terdiri dari tiga indikator, *Webqual 4.0* ialah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kualitas *website* yang terdiri dari tiga indikator, yaitu *Usability Quality*, *Information Quality* dan *Intercation Quality* untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap kualitas dari *website* tersebut (Prabowo et al., 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai *website quality* diantaranya ialah penilaian kualitas *website* menggunakan analisis perbedaan dan IPA di Universitas Hasanudin Makasar (Arifin et al., 2015). Selain itu mengkaji mengenai kuliatas *website* Halal MUI (Giyanti & Suparti, 2018), penelitian mengenai kualitas *e-Commerce* Mister Aladin (Kurniawati et al., 2018), menelitia mengenai kepuasan pelanggan Tokopedia dengan menggunakan kualitas *website*, promosi juga harga (Indriyani & Helling, 2018), elatisitas kesempatan kerja sektoral di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali (Lestari & Marhaeni, 2017), kajian mengenai potensi UKM untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia (Purwanto, 2007) selanjutntya peran UMK dalam pengentasan kemiskinan di daerah (Tambunan, 2012).

Perbedaannya penelitian ini mengkaji mengenai pengukuran kualitas *website* dibidang UMKM *fashionhijab*, menggunakan metode *WebQual 4.0* dengan indikator *Usability Quality*, *Information Quality* dan *Intercation Quality* terhadap kepuasan konsumen agar dapat meningkatkan penjualan yang berakhir pada perluasan lapangan pekerjaan. *Usability Quality* mengukur persepsi pengguna terhadap tingkat kemudahan penggunaan *website*, seperti kemudahan untuk dipelajari, kemudahan pencarian informasi, kemudahan navigasi, dan kemudahan dalam pengoperasian. *Information Quality* mengukur akurasi, keterbaruan, kelengkapan, dan kesesuaian

informasi yang ditampilkan dalam website. Sedangkan variabel *Service Interaction* mengukur kualitas tampilan *website* (Giyanti & Suparti, 2018).

Salah satu UMKM yang banyak diminati ialah UMKM *fashion* hijab, diantaranya ialah UMKM *Emmaqueen* yang berasal dari Tasikmalaya. *Emmaqueen* meramaikan perkembangan industri *fashion* muslim di Indonesia dengan segmentasi anak-anak, remaja dan dewasa,. *Emmaqueen* sendiri memiliki beberapa *offline store* dan *Online store* baik dalam bentuk media sosial Instagram, *Whatsapp* dan *website* yaitu <https://emmaqueen.net/>. Hal ini ditujukan agar *Emmaqueen* dapat meningkatkan skala produksinya dan memperluas pangsa pasarnya hingga keseluruh nusantara yang berdampak pada tambahan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Selama ini layanan *website Emmaqueen* belum pernah diukur kualitasnya berdasarkan persepsi pengguna akhir (*end user*) yaitu konsumen sehingga pengelola *website* ataupun pihak *Emmaqueen* belum menerima *feedback* mengenai kuliatas *website Emmaqueen* untuk meningkatkan pangsa pasar dan menambah lapngan potensi lapangan pekerjaan. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan pengukuran kualitas *website Emmaqueen* dengan menggunakan metode *Webqual 4.0*, maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Potensi Tambahan Kesempatan Kerja Melalui Pengukuran Kualitas *Website* UMKM dengan Metode *Webqual 4.0*”

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana Kualitas *Website* UMKM *fashion Emmaqueen*?

2. Rancangan Penelitian

Berikut ialah rancangan penelitian:

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh konsumen *Emmaqueen* yang berjumlah 690 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan simple random sampling sehingga sample berjumlah 117 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan menyebarkan pertanyaan berupa kuisioner seputar kualitas kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi untuk mengetahui bagaimana kepuasan mereka pada *website* tersebut yang menjadi

indikator pengukuran kualitasnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang berasal dari penyebaran angket pada responden.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *regresi linear* sederhana.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur kualitas *website Emmaqueen* dengan menggunakan metode *Webqual 4.0* dengan begitu jika terdapat kekurangan dapat diperbaiki tentu untuk meningkatkan pangsa pasar atau *market share* yang diharapkan nantinya akan berpengaruh pada tambahan kesempatan kerja.

C. Permasalahan

Berikut permasalahan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Kemiskinan masih mejadi salah satu permasalahan di Indoneisa. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan.
2. Masalah klasik yang timbul ketika suatu perusahaan menggunakan *Online store* ialah membujuk konsumen untuk mau membeli suatu produk yang tidak dapat dilihat secara langsung. Konsumen *e-commerce* memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mengetahui kualitas produk dan melakukan pengujian terhadap produk yang diinginkan melalui *website*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *website* menjadi patokan apakah suatu perusahaan menarik, dapat dipercaya dan memiliki kualitas produk yang baik.
3. Selama ini layanan *website Emmaqueen* belum pernah diukur kualitasnya berdasarkan persepsi pengguna akhir (*end user*) yaitu konsumen sehingga pengelola *website* ataupun pihak *Emmaqueen* belum menerima *feedback* mengenai kuliatas *website Emmaqueen* untuk meningkatkan pangsa pasar dan menambah lapngan potensi lapangan pekerjaan.

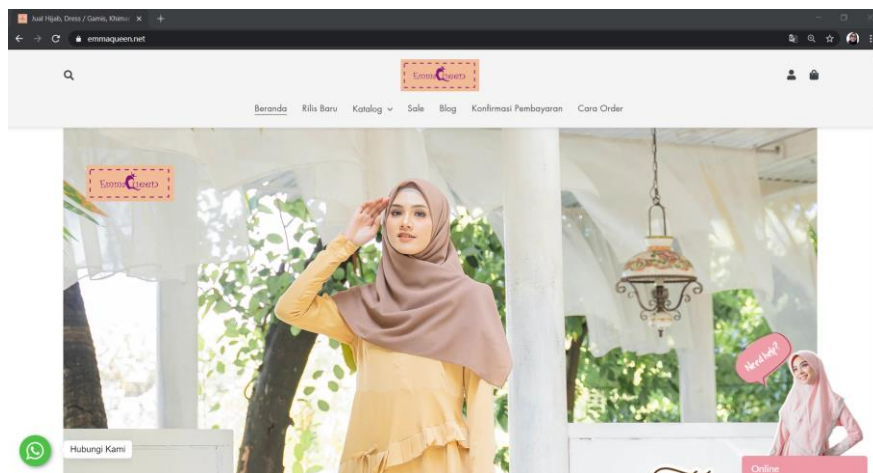
D. Hasil Analisa

Berdasarkann kuisisioner yang disebarakan pada seluruh responden diperoleh data persepsi kepuasan konsumen dalam menggunakan *website Emmaqueen* dengan menggunakan metode *webqual 4.0* secara keseluruhan termasuk dalam kategori “Puas”, hal ini didasarkan pada tiga *indicator webqual 4.0*, yaitu *usability quality*, *information quality* dan *service interaction quality*. Disamping itu *webqual* memiliki peran dan berdampak positif dalam membangun kepuasan pengunjung *website Emmaqueen* sebesar 84%, dapat dikatan bahwakualitas *website* memiliki pengaruh atau dampak

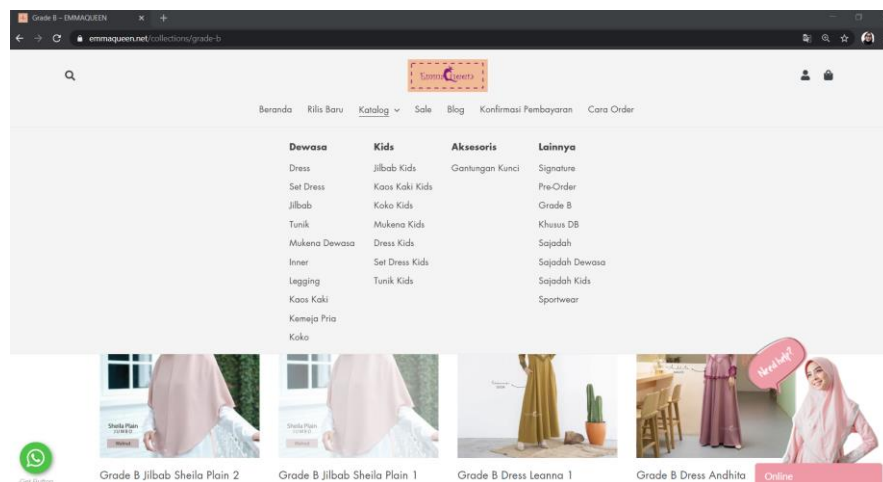
dalam meningkatkan kupasan pengunjung *website* yang termasuk dalam kategori kuat.

1. *Usability Qulaity* (Kualitas Kegunaan/ manfaat)

Berdasarkan responden *website Emmaqueen* memiliki banyak manfaat yang sangat baik. Kemudahan dalam pengoperasian *website Emmaqueen* sangat membantu mempermudah, diantaranya penempatan menu dan sub menu yang tersusun dengan baik. Penyimpanan menu yang disusun secara jelas dan satu garis horizontal semakin mempermudah pengunjung *website* dalam memahami dan menentukan menu apa yang harus dioperasikan selanjutnya menyesuaikan dengan kebutuhan, sub menu disusun secara *vertical* untuk membantu memvisualisasikan konten dari menu-menu utama seperti tersaji dalam Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Beranda *website* Emmaqueen. Sumber: <https://emmaqueen.net/>



Gambar 2. Tampilan Menu dan Submenu *website* Emmaqueen. Sumber: <https://emmaqueen.net/collections/grade-b>

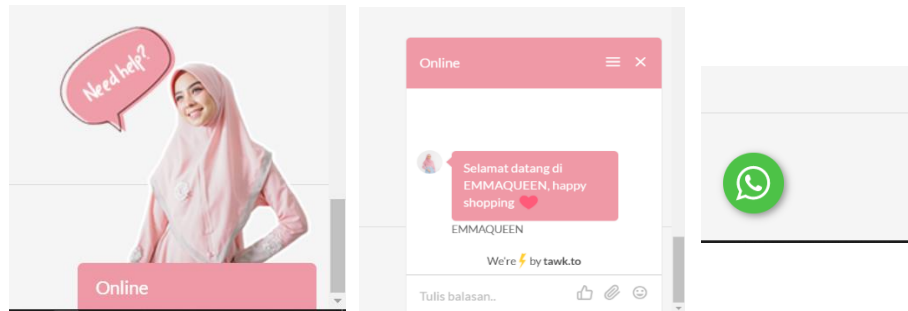
Penyusunan menu dan sub menu pada *website Emmaqueen* ini memudahkan navigasi pengunjung *website*, navigasi *website Emmaqueen* sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengunjung dengan tujuan mendapatkan informasi terkait produk yang dibutuhkan, spesifikasi produk untuk Dewasa, anak-anak, aksesoris dan lainnya serta cara pembelian sampai dengan pembayaran, cara penyampaian keluhan (kritik maupun saran). Namun demikian, terdapat beberapa pengunjung yang masih merasakan kesulitan untuk mengoperasikan *website* terkait dengan jalur navigasi yang sudah dirancang sehingga merasa bingung untuk mencari apa yang mereka butuhkan.

2. Information Quality (Kualitas Informasi)

Banyak responden yang menyatakan bahwa informasi yang disediakan oleh *website Emmaqueen* ini relevan dengan kebutuhan, Relevan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah semua informasi yang terdapat dalam *website* tentu terkait dengan keseluruhan produk, spesifikasi produk, promosi yang dilakukan, konfirmasi pembayaran, alur untuk membuat pesanan atau kontak yang dapat dihubungi dengan satu kali *klick* untuk dapat langsung berinteraksi dengan admin *website* untuk bertanya terkait informasi yang ingin ditanyakan, bahkan pada *website Emmaqueen* ini tidak hanya terkait dengan produk, tetapi *website* ini memberikan informasi tambahan yang terdapat pada Menu “Blog”, terkait dengan *Emmaqueen* yang segmentasinya ialah *fashion muslim* Blog ini memuat mengenai cerita-cerita inspirasi dan inspiratif dari mulai Kisah Nabi, Fiqih Wanita, amalan-amalan dalam islam dan berbagai topik lainnya yang berkaitan dengan kebaikan. Namun demikian tetap ada keluhan dari pengunjung meskipun jumlahnya sedikit.

3. Service Interaction Quality (Kualitas Layanan Interaksi)

Yang ketiga ialah *service interaction quality* atau kualitas layanan interaksi. Layanan interaksi yang dimaksud ialah jika terdapat informasi yang belum difahami oleh pengunjung maka dapat dengan mudah melakukan komunikasi dua arah antara pengunjung dengan admin pengelola *website*. Selain komunikasi yang baik, efektif dan mudah, layanan interaksi juga diwakili dengan tampilan dari *website* itu sendiri. *Website Emmaqueen* ini dilengkapi dengan fitur “*Help*” pada pojok kanan bawah sehingga dapat langsung berinteraksi dalam bentuk *messenger* dengan admin, ataupun dengan klik ikon *Whatsapp* pada pojok kiri bawah sehingga pengunjung dapat langsung terhubung dengan *Whatsapp Messenger* dari akun *Emmaquen* seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Fitur *Chat* dengan Admin. Sumber: <https://emmaqueen.net/>

Selain itu tema yang dipilih ialah *feminime simple chic* sesuai dengan produk-produk yang dijual *Emmaqueen*, warna, komposisi dan penempatan bagian setiap informasi dirasakan oleh pengunjung memiliki nilai estetika yang sangat baik dan *eye catching*.

Berdasarkan perhitungan verifikatif, *website quality* ini berdampak kuat dalam memuaskan konsumen. Hal ini dilakukan tidak hanya dari segi informasi, komunikasi bahkan sampai dengan transaksi. Dalam hal penjualan untuk *Online store website* memiliki andil yang penting karena *website* merupakan representasi dari toko dan produk yang dimiliki dengan begitu akan membangun kepercayaan dari konsumen yang diharapkan akan tertarik untuk melakukan pembelian Kembali karena merasa puas dengan pengalaman pembelian yang telah dilalui.

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh hanya berdasarkan konsumen *Emmaqueen* dalam merasakan kepuasan akan penggunaan *website* sebagai tempat untuk menawarkan produk, menampilkan produk dengan spesifikasinya, media untuk komunikasi dan tempat untuk kemudian transaksi. Menurut responden *website Emmaqueen*, mereka merasakan puas dengan pengalaman yang diberikan oleh *website Emmaqueen*.

E. Rekomendasi

Secara umum pengunjung memberikan tanggapan positif dari ketiga indikator yang telah dirumuskan, namun demikian terdapat sedikit kekeliruan pada indikator kualitas informasi yang dirasa belum terlalu *up to date*, hal tersebut dapat dijadikan masukan untuk menjadikan *website* lebih baik lagi. Dengan begitu kepuasan konsumen semakin meningkat, kepuasan konsumen akan meningkatkan penjualan karena memungkinkan terjadinya pembelian kembali, hal ini tentu akan berdampak pada *market share* perusahaan yang diharapkan mampu mengembangkan usahanya dengan potensi tambahan tenaga kerja.

F. Daftar Pustaka

- Arifin, S. R., Nugroho, E., & Hanton, B. S. (2015). Analisis Kualitas Layanan Website Universitas Hasanuddin Dengan Metode Webqual 4.0 Modifikasi. *Teknomatika*, 8(1), 81–92.
- Giyanti, I., & Suparti, E. (2018). *Penilaian kualitas aplikasi halal mui dengan webqual 4.0 dan pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan*. 13(2), 91–98.
- Indriyani, F., & Helling, L. S. (2018). *Analisis Pengaruh Kualitas Website, Kepercayaan, Promosi dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Tokopedia*. 5(1), 56–68.
- Kurniawati, R. A., Kusyanti, A., & Mursityo, Y. T. (2018). *Analisis Pengaruh Kualitas Website Terhadap Kepuasan Pelanggan Mister Aladin Dengan Menggunakan Webqual 4.0*. 2(3), 1151–1160.
- Kusumawijaya, I. P., & Karyati, C. M. (2016). Pengukuran Kualitas Website Fashion E-Commerce Menggunakan Metode WebQual 4.0. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 21(2), 113–128.
- Lestari, N., & Marhaeni, A. (2017). Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1513–1538.
- Nada, N. Q., & Wibowo, S. (2015). Pengukuran Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Informatika Upgris*, 1(2 Desember), 112–119. <https://doi.org/10.26877/JIU.V1I2 DESEMBER.870>
- Prabowo, Y., Solistiowati, S., & Lemantara, J. (2016). Analisis Pengaruh Kualitas Website Terhadap Kepuasan Pengguna Berdasarkan Metode Webqual 4.0 pada Website Hotel 88. *JSIKA Vol. 5, No. 1. 2016*, 5(1), 1–6.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Tambunan, T. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 73–92. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.73-92>
- BPS 2019. <https://www.bps.go.id/publication/2019/03/05/66912048b475b142057f40be/analisis-hasil-se2016-lanjutan-potensi-peningkatan-kinerja-usaha-mikro-kecil.html>

2.2 Analisis Variabel Logistik Pasar Terhadap Volume Penjualan Limbah B 3 Pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti Di Kabupaten Ciamis (Eky Astriyana_ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman diikuti dengan beraneka ragamnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat pada berbagai segi kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terhadap suatu produk (barang, jasa, ide, dan lainnya), merupakan kesempatan

pasar yang cukup besar bagi suatu produk. Kondisi demikian memunculkan dua hal penting yang terkait dengan perusahaan yakni peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*). Peluang berarti suatu kondisi yang akan memberikan manfaat apabila dicapai melalui usaha-usaha tertentu dan merupakan ancaman apabila kesempatan pasar yang ada dimanfaatkan oleh pesaing. Maka pemasaran sebagai salah satu fungsi atau kegiatan perusahaan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu perusahaan untuk meraih peluang ini sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perkembangan perusahaan.

Tujuan umum dari setiap perusahaan adalah untuk memperoleh laba tertentu, dan hal itu akan dapat tercapai apabila kegiatan penjualan dapat dilaksanakan secara berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan penjualan merupakan salah satu dari seluruh kegiatan pemasaran lainnya dimana keberhasilan pemasaran akan ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud berupa faktor internal yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari beberapa variabel seperti pesanan, pergudangan, persediaan dan pengangkutan yang sering disebut dengan istilah *logistik pasar*. Sedangkan faktor yang lain berupa faktor eksternal yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari lingkungan mikro yang terdiri dari variabel-variabel seperti pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, perusahaan distribusi fisik dan publik. Lingkungan yang kedua dari faktor eksternal berupalingkungan makro yang terdiri dari variabel-variabel seperti kependudukan, kondisi perekonomian, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik dan hukum serta teknologi untuk dapat mendukung keberhasilan pemasaran yang pada akhirnya akan berdampak terhadap keberhasilan kegiatan penjualan, maka hal ini akan tergantung pada kemampuan manajemen dalam menganalisis dan memanfaatkan berbagai variabel yang dimilikinya serta merancang secara strategis program-program pemasaran dalam kerangka lingkungan yang dihadapi perusahaan dan kemudian menjalankan rencana tersebut.

Logistik pasar merupakan pandangan modern saat ini. Proses penyampaian barang-barang kepada pelanggan secara tradisional disebut distribusi fisik. Distribusi fisik dimulai dari pabrik atau produsen. Saat ini distribusi fisik telah dikembangkan menjadi konsep manajemen rantai pasokan (*supply chain management*) yang lebih luas.

Kegiatan distribusi fisik produk terdiri dari empat elemen yaitu : Pemrosesan pesanan barang (*order procesing*), pengadaan gudang di lokasi-lokasi tertentu (*warehousing*), pengadaan dan pengendalian persediaan barang

di gudang-gudang tersebut (*stock and stock control*) pengangkutan barang (*transportation*),

Dengan menganalisis pasar di daerah Ciamis dapat memberikan kemungkinan pada perusahaan untuk mengidentifikasi faktor apa yang bisa memberikan pedoman bagi perusahaan didalam memasarkan limbah B3. Selain itu juga perusahaan dapat mengambil langkah atau strategi yang diharus dilakukan dalam peningkatan volume penjualan.

Distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran. Manajemen harus menentukan metode saluran apa yang sebaiknya digunakan untuk menyalurkan produknya kepasar. Adapun definisi saluran distribusi adalah “Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai kekonsumen atau pemakai industri” (Basu Swastha DH, 1996; 190).

Logistik merupakan bagian dari Manajemen Rantai Suplai yang merencanakan, menerapkan dan mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas dari arus dan penyimpanan barang, jasa dan informasi yang terkait, dari hulu-ke-hilir dan sebaliknya, mulai dari titik asal barang tersebut hingga titik tempat digunakan atau dikonsumsi barang tersebut, untuk dapat memenuhi persyaratan dan permintaan dari pelanggan. Menekan biaya dan meningkatkan kualitas sistem logistik dan transportasi akan meningkatkan akses ke pasar internasional, yang akan berdampak langsung pada peningkatan perdagangan, dan melalui hal ini, akan meningkatkan pendapatan dan berarti mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan (*World Bank*).

Proses logistik berhubungan erat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini tidak hanya berputar di sekitar aktivitas pabrik, juga mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendukung manajemen logistik ini juga diperlukan suatu rantai aliran barang yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen ke konsumen agar hal-hal di atas seperti keterlambatan penyampaian, salah barang dan sebagainya bisa dikurangi atau malah dihilangkan sehingga pelayanan yang diberikan ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa puas. Untuk itu diperlukan *Supply Chain Management (SCM)* yang banyak didefinisikan sebagai manajemen logistik juga padahal terdapat perbedaan diantara keduanya.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan pada limbah B3 di perusahaan PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti belum memenuhi target penjualan, yang diharapkan perusahaan target penjualan limbah B3 adalah 200 drum/ bulan. Namun pada bulan Oktober, November dan bulan Desember 2019 hasil penjualan limbah B3 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Permasalahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh

penerapan logistik pasar yang belum optimal, adapun indikatornya adalah: Pesanan, Pergudangan, Persediaan, Pengangkutan.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana logistik pasar produk limbah B3 di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis, Bagaimana Volume Penjualan produk limbah B3 di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis, Bagaimana variabel-variabel logistik pasar yang berpengaruh terhadap volume penjualan di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan di PT Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis dimana data yang dikumpulkan dari berbagai aspek sehingga diketahui variabel yang mempengaruhi penjualan dan bisa meningkatkan volume penjualan.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Jalur, dimana sebelum menggunakan metode ada beberapa pengujian data terlebih dahulu diantaranya, pengujian validitas, dan pengujian realibilitas. Hasil dari pengujian Validitas dan Realibilitas dijadikan acuan untuk masuk ke Metode Analisis Jalur. Analisis Jalur menunjukkan presentasi hasil yang bisa dijadikan acuan perusahaan untuk meningkatkan Penjualan.

B. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah : Untuk mengetahui logistik pasar produk limbah B3 di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis, Untuk mengetahui volume penjualan produk limbah B3 di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis, Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel Logistik Pasar terhadap volume penjualan di PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti di Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Berdasarkan pengamatan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti belum memenuhi target penjualan, yang diharapkan perusahaan target penjualan limbah B3 adalah 200 drum/bulan. Namun pada bulan Oktober, November dan bulan Desember 2019 hasil penjualan limbah B3 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

D. Hasil Analisa

Pengujian validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang ingin diukur. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang terjadi pada obyek yang diteliti. Dengan menggunakan rumus perhitungan korelasi maka nilai korelasi untuk variabel logistik pasar adalah :

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Pemasaran

Indikator	r	r	Validasi
	Hitung	Tabel	
1	0.632	0.482	Valid
2	0.535	0.482	Valid
3	0.743	0.482	Valid
4	0.719	0.482	Valid
5	0.797	0.482	Valid
6	0.929	0.482	Valid
7	0.895	0.482	Valid
8	0.889	0.482	Valid
9	0.743	0.482	Valid
10	0.748	0.482	Valid
11	0.639	0.482	Valid
12	0.831	0.482	Valid
13	0.884	0.482	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan untuk variabel logistik pasar yang disusun dan dibuat oleh peneliti termasuk valid dan dapat diterima.

1. Realibilitas Instrumen Penelitian

Koefisien keandalan alat ukur menunjukkan tingkat konsistensi jawaban responden. Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Nilai koefisien α ini berkisar 0 sampai 1, semakin tinggi nilai koefisiennya, maka semakin baik alat ukurnya.

Adapun hasil perhitungan reliabilitas alat ukur dengan menggunakan bantuan *SPSS For Windows Versi 14.0* dapat dilihat pada tabel berikut:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,503	5

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diatas didapatkan nilai *alpha Cronbach's* untuk faktor pesanan Alphanya 0.503, ini berarti telah sangat reliabel karena sangat mendekati 1.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,874	3

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diatas didapatkan nilai *alpha Cronbach's* untuk faktor pergudangan *Alphanya* 0.874, ini berarti telah sangat reliabel karena sangat mendekati 1.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,479	3

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diatas didapatkan nilai *alpha Cronbach's* untuk faktor persediaan *Alphanya* 0.479, ini berarti telah sangat reliabel karena sangat mendekati 1.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,638	2

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diatas didapatkan nilai *alpha Cronbach's* untuk faktor pengangkutan *Alphanya* 0.638, ini berarti telah sangat reliabel karena sangat mendekati 1.

2. Analisis Jalur

Perhitungan analisis jalur dengan menggunakan perangkat lunak (*Software*) yaitu dengan *Statistical Package for Solution Science (SPSS 17.0 For Windows)*.

TABEL 1.2 Koefisien Jalur Variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan Variabel Exogenous

Individual				Bersamaan	Exogenous
P_{yx_1}	P_{yx_2}	P_{yx_3}	P_{yx_4}	$R^2_{y(x_1x_2x_3x_4)}$	$P_{y\epsilon}$
0.348	0.247	0.318	0.165	0.989	0.104

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

3. Pengaruh Pesanan Terhadap Volume Penjualan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor pesanan mempunyai pengaruh sebesar 32,7% terhadap volumen penjualan, dan menurut hasil pengujian hipotesis bahwa H_1 diterima karena teruji kebenarannya. Artinya faktor pesanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti Kertasari Ciamis.

4. Pengaruh Pergudangan Terhadap Volume Penjualan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor pergudangan mempunyai pengaruh sebesar 22,4% terhadap volume penjualan, dan menurut hasil pengujian hipotesis bahwa H_1 diterima karena teruji kebenarannya. Artinya faktor pergudangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti Kertasari Ciamis.

5. Pengaruh Persediaan Terhadap Volume Penjualan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor persediaan mempunyai pengaruh sebesar 29,9% terhadap volume penjualan, dan menurut hasil pengujian hipotesis bahwa H_1 diterima karena teruji kebenarannya. Artinya faktor persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti Ciamis.

6. Pengaruh Pengangkutan Terhadap Volume Penjualan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor pengangkutan mempunyai pengaruh sebesar 14% terhadap volume penjualan, dan menurut hasil pengujian hipotesis bahwa H_1 diterima karena teruji kebenarannya. Artinya faktor pengangkutan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Mitra Mandiri Rahayu Darma Bakti Ciamis.

Total pengaruh yang diterima volume penjualan dari seluruh faktor yang diteliti dan yang tidak diteliti adalah sebesar 1, artinya seluruh pengaruh adalah 100%. Dimana pengaruh dari faktor pesanan adalah sebesar 32,7%, kemudian pengaruh dari faktor pergudangan adalah sebesar 22,4%, pengaruh dari faktor persediaan adalah sebesar 29,9%, pengaruh dari faktor pengangkutan adalah sebesar 14%, serta pengaruh dari variabel exogenous (variabel yang tidak diteliti) adalah sebesar 1%.

E. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan penulis pada perusahaan diantaranya;

1. Pihak perusahaan bias berusaha lagi dalam pemrosesan pesanan yang lebih baik dan faktor-faktor lain yaitu dari segi pergudangan, persediaan produk, serta dalam kegiatan pengangkutan produk untuk dapat meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
2. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi volume penjualan termasuk didalam pemenuhan target penjualan produk setiap bulannya, terutama didalam faktor-faktor logistik pasar.
3. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan variabel-variabel yang mempengaruhi volume penjualan diantaranya untuk pesanan dari

kategori baik harus tetap menjadi baik, untuk pergudangan dari kategori kurang harus bisa termasuk kategori baik, untuk persediaan dari kategori sedang harus menjadi termasuk kategori baik.

F. Daftar Pustaka

- Kotler., P., 1997. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. PT.Prenhallindo, Jakarta
- Kotler., P., 1997. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Revisi. PT.Prenhallindo, Jakarta
- Creavens., DW., 1994. *Pemasaran Strategis*. Edisi Keempat. Erlangga, Jakarta
- Aristriyana., Eky., 2010. *Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Volume Penjualan pada Produk Wajan di PT. Bintang Satu Jetak Ciamis*. Unigal, Ciamis
- Sutojo., S., 2009. *Manajemen Pemasaran. Untuk Eksekutif Non-Pemasaran*. PT. Damar Mulia Pustaka
- Widjaja., Amin., T., 2009. *Manajemen Logistik dan Supply Chain Management (Manajemen Rantai Pasokan)*. Harvarindo, Jakarta.
- Kotler dan Keller., 2007. *Manajemen Pemasaran (Edisi Dua Belas)*. PT. Indeks, Jakarta.
- Kotler., Philip., 2005. *Manajemen Logistik (Edisi Sebelas)*. Jilid 2. PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kotler dan Keller., 2008. *Manajemen Pemasaran (Edisi ke tiga belas)*. Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Kotler., Philip., 1997. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan dan Pengendalian (Edisi ke Lima)*. Erlangga, Jakarta.

2.3 Perancangan Alat Bantu Pengolahan Limbah Untuk Meningkatkan Kinerja dan Pendapatan Pekerja Pada Home Industry Maya Lestari di Kabupaten Ciamis

(Yusuf Kurnia_ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Home Industry Maya Lestari merupakan pabrik pengolahan limbah makanan bekas yang berada di wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, potensi dari industri kecil ini sangat besar dengan memanfaatkan limbah makanan bekas yang diolah menjadi pakan ikan ataupun dijadikan pupuk tanaman, para pekerja berasal dari daerah setempat sebagai bentuk kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, peralatan utama yang digunakan adalah alat pengaduk limbah yang dibuat seadanya, sehingga pengolahan kurang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien untuk pekerja yang menggunakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dapat dirumuskan adalah sebagai berikut Bagaimana ukuran data kondisi lapangan dengan menggunakan *antropometry method* konsep individu *extrem* pada *Home Industry* Maya

Lestari di Kabupaten Ciamis dan Bagaimana merancang alat bantu proses pengadukan limbah dengan *design AutoCAD* menggunakan *antropometry method* pada *Home Industry* Maya Lestari di Kabupaten Ciamis?

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ukuran pembuatan alat pengadukan limbah dengan menggunakan *antropometry method* pada *Home Industry* Maya Lestari di Kabupaten Ciamis dan untuk mengetahui perancangan alat pengadukan limbah dengan *design Auto CAD* menggunakan *antropometry method* pada *Home Industry* Maya Lestari di Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain dapat dijadikan sebagai wacana untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait masalah perancangan produk sebagai alat pada *Home Industry* dan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan menggunakan alat yang ergonomis sesuai dengan situasi dan kondisi pekerja.

C. Permasalahan

Ergonomi merupakan suatu desain atau perancangan yang ditujukan kepada manusia, yaitu perancangan pada lingkungan kerja, alat bantu kerja maupun produk yang nyaman. Kajian ergonomi dari sejumlah ilmu dasar yang mempelajari manusia, seperti anatomi, fisiologi, kedokteran, ortopedi, psikologi, serta sosiologi. Beberapa metode digunakan untuk merancang produk supaya produk tersebut ergonomis meskipun sistem pemakaiannya manual. Perancangan produk untuk alat-alat yang digunakan dipabrik ataupun perusahaan harus efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien untuk pekerja yang memakainya, maka bentuk, ukuran dari alat tersebut disesuaikan dengan keadaan situasi, kondisi pekerja yang akan menggunakannya.

Alat pengaduk limbah di *Home Industry* Maya Lestari ini merupakan alat yang sangat vital dalam pengolahan limbah, sehingga hasil kinerja dari alat ini bisa menjadi ukuran kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, alat yang seadanya tanpa ukuran yang disesuaikan dengan situasi lingkungan dan kondisi orang yang mengoprasikannya membuat produk yang dihasilkan kurang optimal.

D. Hasil Analisa

Anthropometri merupakan salah satu ilmu yang menjadi pertimbangan dalam pengkajian permasalahan yang mengarah pada perancangan perpenilaianan/stasiun kerja. Pada *anthropometri* dilakukan pengukuran dimensi tubuh manusia dimana pengukuran dimensi tubuh manusia ini merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada terkait dengan proses perancangan perpenilaianan/stasiun kerja.

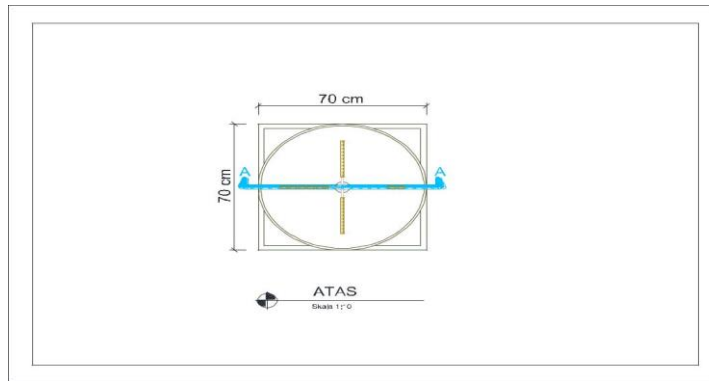
Data yang akan dikumpulkan saat mengkaji permasalahan dengan menggunakan konsep individu ekstrim, salah satunya adalah data ukuran dimensi tubuh manusia. Dengan konsep desain individu ekstrim yang menjadi target pengukuran adalah setiap orang yang menggunakan penilaian/stasiun kerja yang akan dirancang umur dewasa. Dua cara tersebut yaitu pengukuran dimensi struktur tubuh (*static anthropometry*) dan pengukuran dimensi fungsional tubuh (*dynamic anthropometry*). Karena pengukuran dengan cara pengukuran dimensi fungsional tubuh (*dynamic anthropometry*) lebih sulit dilakukan dibandingkan pengukuran dimensi struktur tubuh (*static anthropometry*) maka pengukuran dimensi struktur tubuh (*static anthropometry*) lebih sering digunakan. Dalam pengukuran dimensi struktur tubuh (*static anthropometry*) untuk pengukuran dimensi tubuh ada beberapa yang harus di ukur untuk mendapatkan data.

Ukuran penetapan data antropometri ini, pemakai distribusi normal akan diterapkan. dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan berdasarkan harga rata-rata (*mean*) dan simpangan standarnya (*standar deviation, αx*) dari data yang ada dari data yang propabilitas distribusi normal. sebagai contoh 95 th-*percentile* akan menunjukkan 95% populasi akan menunjukkan 5% populasi akan berbeda pada atau dibawah ukuran itu. Dalam antropometri, angka 95-th akan menggambarkan ukuran manusia yang “terbesar” dan 5-th *percentile* sebaiknya akan menunjukkan ukuran “terkecil”. Bilamana diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasi 95% dari populasi yang ada, maka di sini diambil rentang 5-th dan 95-th *percentile* sebagai batasan-batasannya.

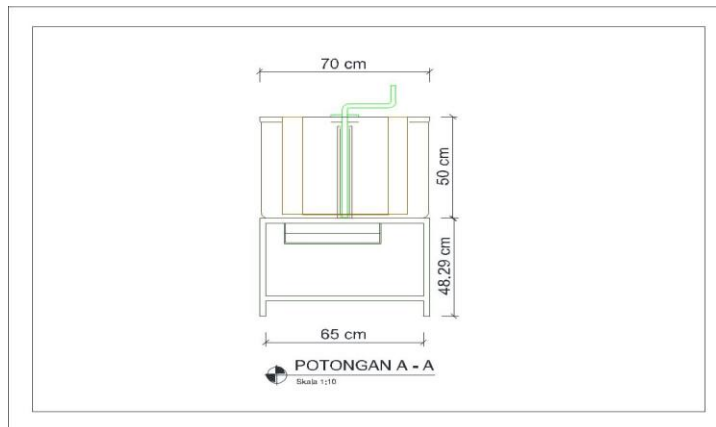
Alat produksi yang di gunakan di *Home Industry* Maya Lestari belum sesuai dengan antropometri penggunaan. Sedangkan parameter yang terkait desain perancangan desain pengadukan limbah yaitu parameter saat siku ke lantai, siku ke ujung jari, lebar telapak tangan ke metakarfal, lebar telapak tangan ke ibu jari.

Desain optimal pengadukan limbah yang cocok untuk pekerja di *Home Industry* Maya Lestari adalah tinggi alat yaitu 98,29 cm (rata-rata), lebar alat sebesar 70,06 cm (rata-rata), tinggi engkel pengadukan yaitu 44,05 cm (rata-rata), pegangan engkel pengadukan bagian atas 8,33 cm (persentil 50), diameter tangkai pengadukan 8,78cm dalam penentuan ukuran pembuatan alat ini menggunakan persentil 5 agar semua yang menggunakan dapat menjangkau dengan mudah.

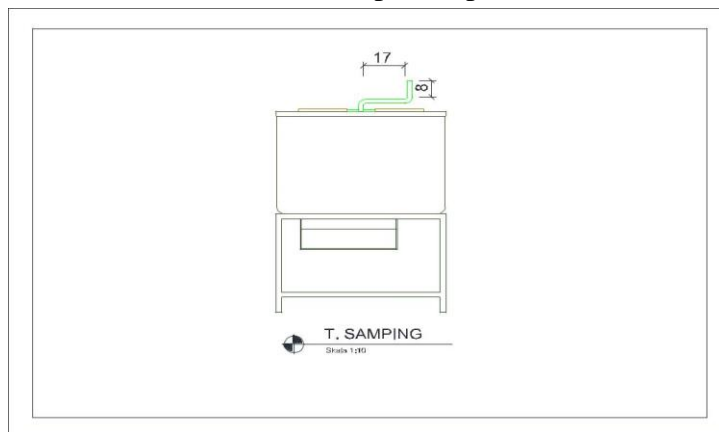
Hasil Perancangan 2D
Menggunakan *Autocad 2012*



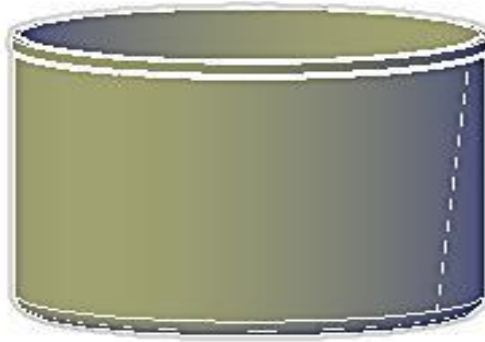
Gambar 1. Perancangan 2D Tampak Atas



Gambar 2. Perancangan 2D Penilaian
Nampak Depan



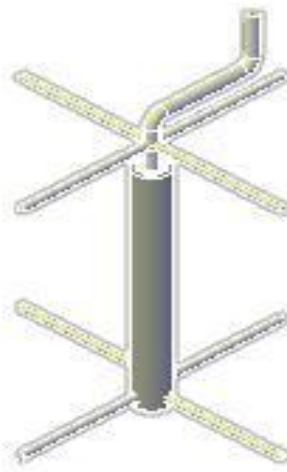
Gambar 3. Perancangan 2D Penilaian Tampak Samping
Hasil Perancangan 3D Solid Menggunakan *Autocad 2012*



Gambar 4. Perancangan 3D Penampung Limbah



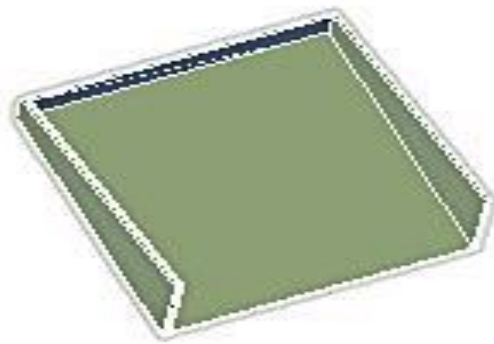
Gambar 5. Perancangan 3D Dudukan Pengadukan



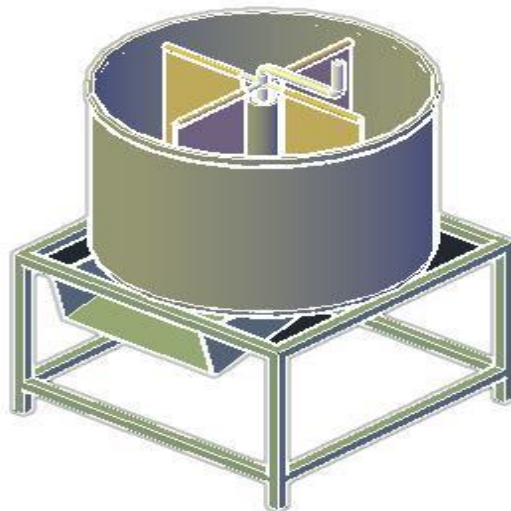
Gambar 6. Perancangan 3D Rangka Engkel



Gambar 7. Perancangan 3D Engkel



Gambar 8. Perancangan 3D Corongan Pengadukan



Gambar 9. Perancangan 3D Gambar Keseluruhan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hursts.kenneth (2006)*Prinsip-Prinsip Perancangan Teknik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Iriastadi, Hardianto, MESIE, Ph.D. (2014): *Ergonomi Suatu Pengantar*, Cetakan pertama, no, 40, PT Penerbit Remaja Posdakarya, Bandung.
- Kroemer, K., Kroemer, H. & Elbert, k.K., (2001) : *Ergonomics – How to Design For Ease and Efficiency*, Prentice Hall, New Jersey.
- Nurmianto, Eko, (2004)” *Ergonomi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*”, Edisi Kedua, Penerbit Guna Darma.
- Nurmianto, Eko, (2004)” *Ergonomi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*”, Edisi Kedua, Penerbit Guna Widya, 2004
- Sujarweni, wiratna (2014) : *metode penelitian*, Penerbit Pustaka Baru Pers. Yogyakarta.
- Sutolaksana z. after, Anggawisastra Ruhana, Tjakatmadja H Jann, (2006) Penerbit ITB Bandung.
- Wicken. C.D. Lee, J.D. Liu, Y & Becker, S.E.G., (2004) : *An Introduction to Human Factor Engineering*, Pearson Education, New Jersey.
- Wignjosoebroto, sritomo (1993) : *Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu – Teknik Analisis Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*, Penerbit Guna Widya, Surabaya.
- Wignjosoebroto, sritomo (2000) : *Pengantar Teknik Industri*, Penerbit Guna Widya, Jakarta.
- Wignjosoebroto, sritomo (1993) : *Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu – Teknik Analisis Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*, Penerbit Guna Widya, Surabaya.

**BAGIAN III
HASIL KAJIAN
MENGENAI EKONOMI DAN UMKM**

3.1 Kajian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 di Provinsi Jawa Barat
(Nurdiana Mulyatini_ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Ekonomi kerakyatan melekat pada koperasi, hal ini sudah sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan belanda koperasi sudah ada di bumi nusantara ini. Koperasi didirikan bermula dari kebersamaan dan pemerataan ekonomi masyarakat ini terlihat pada salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Koperasi Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap anggota adalah pemilik koperasi. Hampir di setiap desa di Indonesia terdapat koperasi bahkan saat ini dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa. Jumlah koperasi di Jawa Barat Tahun 2017 mencapai 25.744 yang tersebar di 26 kabupaten dan kota. Dari Jumlah tersebut rata-rata koperasi aktif 62,98% sisanya 37,02 persen tidak aktif. (BPS Jawa Barat 2017). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum bisa bersaing secara optimal dengan badan usaha lainnya.

Selanjutnya begitu juga usaha kecil yang saat ini jumlahnya terjadi kenaikan di 10 tahun terakhir ini. Pada tahun 2006 jumlah usaha kecil 4,21 Juta meningkat pada tahun 2016 4,63 Juta. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup besar yang perlu dipertahankan keberadaannya. Dilain pihak Angka kemiskinan di Jawa barat pada tahun 2017 dari 34 Provinsi di Indonesia dan berada di peringkat ke-3 jika dilihat Jumlah yaitu : 4.168.44 orang. Salah satu tugas kita adalah mengoptimalkan kinerja koperasi dan usaha kecil agar memiliki kinerja yang tinggi sehingga berimbas kepada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Untuk tetap bertahan koperasi dan usaha mikro harus memiliki daya saing yang tinggi. Kekuatan utama untuk memiliki daya saing di Era industri 4.0 adalah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok dan pelanggan serta pemanfaatan Teknologi Informasi. (Suhartono, 2011) Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan *Hannover Fair* pada tahun 2011 (Kagermann dkk, 2011).

Tantangan lain dari industri 4.0 menurut Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan hambatan untuk mengimplementasikan industri 4.0 adalah konektivitas internet. Untuk mempersiapkan kedatangan industri 4.0 salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan RPJMN tahun 2015-2019 dimana salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas

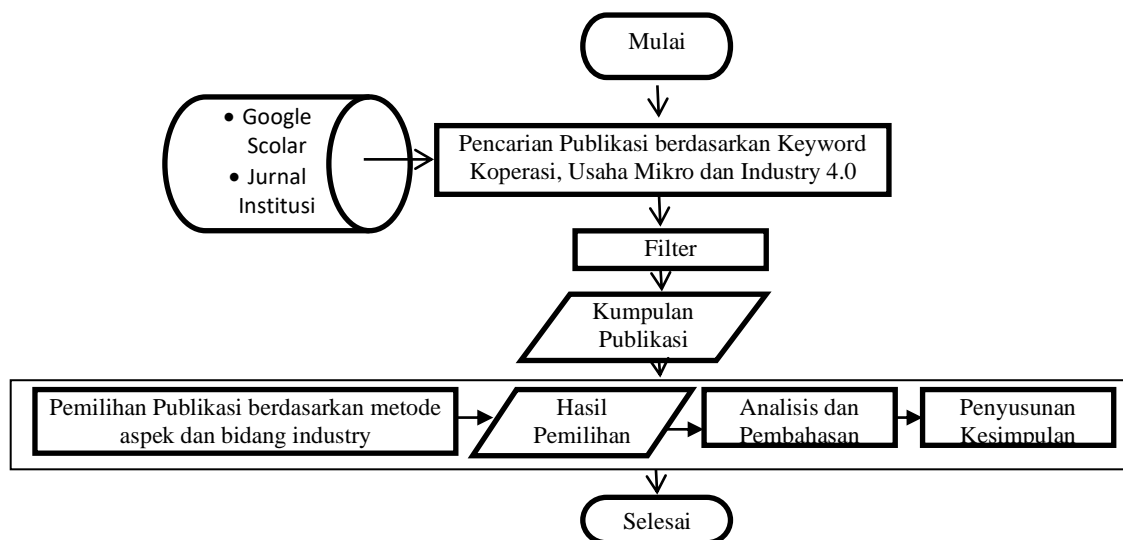
jaringan internet antar pulau dengan menggunakan sistem Palapa Ring. **Rumusan masalah adalah** Bagaimana Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikri Kecil di Era Industri 4.0 di Jawa Barat dan Hipotesa adalah Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Provinsi Jawa Barat telah mengarah ke Era Industri 4.0 serta Rancangan penelitian adalah :

1. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *field study* atau biasa disebut studi literatur. *Field Study* merupakan Metode untuk mengetahui berbagai macam cara dan strategi koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing dalam menghadapi era industri 4.0 dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, Tahap pertama adalah pengumpulan data publikasi menggunakan layanan *google scholar*, Kajian Instansi pemerintah berupa laporan laporan, jurnal nasional terakreditasi bahkan jurnal Nasional yang ada di setiap Universitas ternama di Indonesia. *Google scholar* adalah layanan yang memuat database abstrak dan sitasi dari berbagai literatur ilmiah meliputi jurnal, buku, dan prosiding. Bahkan bisa menggunakan *scopus*. Menurut lamannya (*www.scopus.com*), *Scopus* memiliki lebih dari 22,748 jurnal di berbagai bidang penelitian yang selalu diperbarui setiap harinya. Menurut Burnham (2006), *Scopus* mudah untuk digunakan bahkan untuk kalangan pemula sekalipun. Artikel ini memanfaatkan *Scopus* untuk mencari publikasi berdasar title/ judul ‘*Industry 4.0*’. Hasil pencarian kemudian disaring dan di analisis. Tahapan Tersebut adalah sebagai berikut :



3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dengan menggunakan Analisis SWOT, Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Dengan demikian rencana strategis (*Strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi (Jogiyanto, 2006).

Tabel 1. Diagram Matriks SWOT (Fredy Rangkuti, 2006)

Internal IFAS	<i>Strenght</i> (S) Kekuatan	<i>Weakness</i> (W) Kelemahan
Eksternal EFAS	Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan Internal	Tentukan 5-10 faktor-faktor Kelemahan Internal
<i>Opportunities</i> (O) Peluang Tentukan 5-10 faktor-faktor Peluang Eksternal	Strategi SO Menggunakan Kekuatan dengan memanfaatkan Peluang Strategi Turn Around (3) Meminimalisir Kelemahan Untk meraih Peluang	Strategi WO Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang Strategi Agresif (1) Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan yang ada
<i>Threats</i> (T) Ancaman Tentukan 5-10 faktor-faktor Ancaman Eksternal	Strategi ST Menggunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman Strategi Dfensif (4) Meminimalisir Kelemahan dan bertahan Terhadap Ancaman Luar	Strategi WT Meminimalkan Kelemahan dan menghindari ancaman Strategi Diversifikasi (2) Memanfaatkan Kekuatan Untuk menghadapi Ancaman Luar

Untuk dapat menghitung posisi kuadran dari analisis SWOT maka diperlukan kombinasi antara bobot dan rating.

4. Tinjauan teori Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa : usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Daya Saing

Daya saing dikaitkan dengan tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan atau disebut dengan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilihat dari peningkatan modal dan tenaga kerja, kualitas input, dan 12 teknologi yang diterapkan. Menurut Frinces (2011), daya saing adalah hasil dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan nilai lebih oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa jasa atau barang.

Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).

Era Industri 4.0

Definisi mengenai Industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman, *Angela Merkel* (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. *Schlechtendahl* dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.

Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things and Services (IoT dan IoS)* ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara

proses fisik dan komputasi (teknologi *embedded computers* dan jaringan) secara *close loop* (Lee, 2008).

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi terbaik untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil di Jawa Barat yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bertahan hidup di era industri 4.0 ini. (Claiborne, Buckley, Parsonage, Ross, & Ward, 1995)

C. Permasalahan

Bagaimana Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya Saing di Era Industri 4.0 di Provinsi Jawa Barat.

D. Hasil Analisa

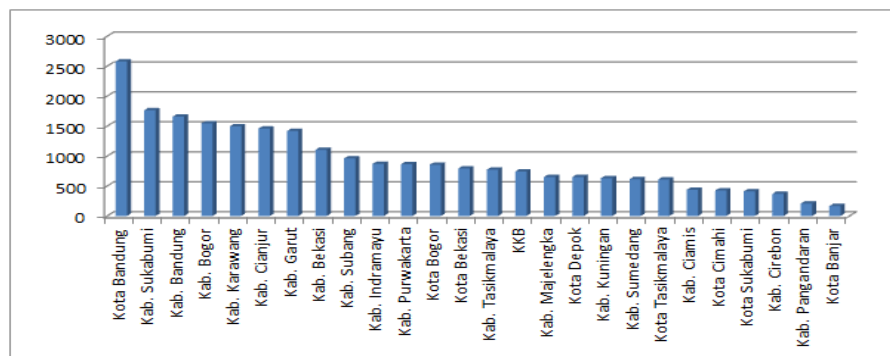
Koperasi di Provinsi Jawa Barat

Koperasi di Jawa Barat berjumlah 24.048 yang tersebar di 27 Kabupaten kota, sebarannya dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Sebaran Koperasi tiap Kabupaten kota Tahun 2017

Jika diurutkan berdasarkan jumlah koperasi mulai yang terbanyak sampai dengan yang paling sedikit dapat terlihat sebagai berikut :

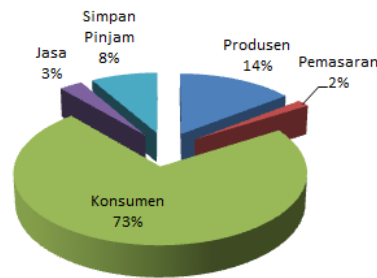


Sumber : Data Olahan 2019

Gambar 4.2. Sebaran Koperasi dari yang terbanyak

Sedangkan koperasi berdasarkan jenisnya (produsen, pemasaran, konsumen, jasa dan simpan pinjam) dapat dilihat pada data berikut :

Jenis Koperasi	Jumlah
Produsen	3,740
Pemasaran	410
Konsumen	18,703
Jasa	767
Simpan Pinjam	2,154



Sumber : Data diolah 2019

Gambar 2. Koperasi berdasarkan jenisnya Jawa Barat Tahun 2017

Usaha Mikro Kecil di Provinsi Jawa Barat

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Persentase UMK di Jawa Barat mencapai 98,84 persen dari total jumlah usaha non pertanian di Jawa Barat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori non pertanian.



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3. Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016

Konsentrasi UMK tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Terdapat tiga kabupaten/kota yang persentase UMKnya lebih dari 7 persen terhadap total UMK Jawa Barat. Kab. Bogor, Kab Bandung, dan Kota Bandung memiliki kontribusi sebesar 22,99 persen total UMK Jawa Barat.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kab. Bogor	367.271	8,08
Kab. Bandung	347.573	7,65
Kota Bandung	330.314	7,27
Kab. Sukabumi	266.729	5,87
Kab. Garut	258.314	5,68
Kab. Cirebon	249.823	5,50
Kab. Cianjur	249.061	5,48
Kab. Karawang	229.031	5,04
Kab. Bekasi	227.110	5,00
Lainnya	2.020.648	44,45
Total	4.545.874	100,00

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya saing di Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0

(a) Evaluasi Faktor Lingkungan Internal

Tabel 6. Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
1	UMK mendominasi Usaha di Provinsi Jawa Barat	0.08	5	0.4
2	Mendominasi pertama oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0.04	5	0.2
3	Mendominasi ke dua Penyediaan dan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.03	4	0.12
4	Mendominasi ke tiga Usaha Industri Pengolahan	0.02	3	0.06
5	Mendominasi ke empat Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.01	3	0.03
6	UMK merupakan salah satu wadah paling tepat menampung tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi.	0.03	4	0.12
7	UMK Sebagai penyerap Tenaga Kerja terbanyak	0.07	5	0.35
8	Peran Perempuan dalam menggerakkan perekonomian cukup besar dianggap sebagai penunjang perekonomian keluarga	0.04	5	0.2
9	Kinerja Usaha yang paling baik adalah Real Estate	0.05	3	0.15
10	UMK Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja paling besar	0.07	5	0.35
Total Kekuatan		0.44		1.98
1	Masih Banyak UMK belum berbadan Hukum	0.06	5	0.3
2	Penggunaan Komputer yang masih rendah	0.05	5	0.25
3	Belum Memaksimalkan Pemasaran Online	0.07	5	0.35
4	Kurang menjalin kemitraan	0.03	4	0.12

5	Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah	0.02	3	0.06
6	Kurang Tahu Bagaimana Cara Membesarkan Bisnis	0.03	4	0.12
7	Masih Mengandalkan Pembukuan Secara Manual	0.03	4	0.12
8	Keterbatasan Informasi menjadi kendala menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.	0.04	3	0.12
9	Pengusaha UMK di dominasi oleh lulusan SD	0.03	5	0.15
10	Kinerja usaha yang paling jelek adalah aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas Sosial atau pendidikan	0.02	5	0.1
11	Kualitas Produk yang masih rendah	0.04	3	0.12
12	Kurangnya Inovasi Produk	0.02	5	0.1
13	Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;	0.06	5	0.3
14	Terciptanya iklim usaha yang kurang kondusif, karena cenderung berkembang kearah persaingan yang saling mematikan;	0.06	5	0.3
Total Kelemahan		0.56		2.51
Total S + W		1		4.49

(b). Evaluasi Faktor Lingkungan Eksternal

Tabel 8. Matriks EFAS (Eexternal Factors Analysis Summary)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score	
Peluang (Opportunities)	1	Penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan Jaringan Internet yang semakin mudah sehingga memudahkan koperasi dan UMK menjangkau pasar terluas.	0.09	5	0.45
	2	Pihak perbankan memberikan literasi keuangan mikro dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha.	0.06	3	0.18
	3	Mudah mendapatkan tenaga kerja karena pencari kerja di dominasi oleh tamatan SMA/SMK	0.08	4	0.32
	4	Semakin maraknya perbankan syariah yang lebih merakyat seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	0.04	2	0.08
	5	Jaminan dari pemerintah untuk mendirikan sebuah institusi untuk menjamin pinjaman dalam upaya membiayai usaha kecil.	0.05	2	0.1
	6	Adanya standarisasi produk Koperasi dan UMK untuk pasar domestik dan pasar ekspor.	0.05	3	0.15
	7	Dukungan pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM yang memiliki program prioritas Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.	0.09	5	0.45
Total Peluang		0.46		1.73	
Ancaman (Threats)	1	Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan persaingan semakin terbuka	0.16	5	0.8
	2	Memiliki akses terbatas pada pendanaan / pembiayaan modal usaha	0.06	3	0.18
	3	Ancaman Penutupan Medsos UMKM	0.08	2	0.16

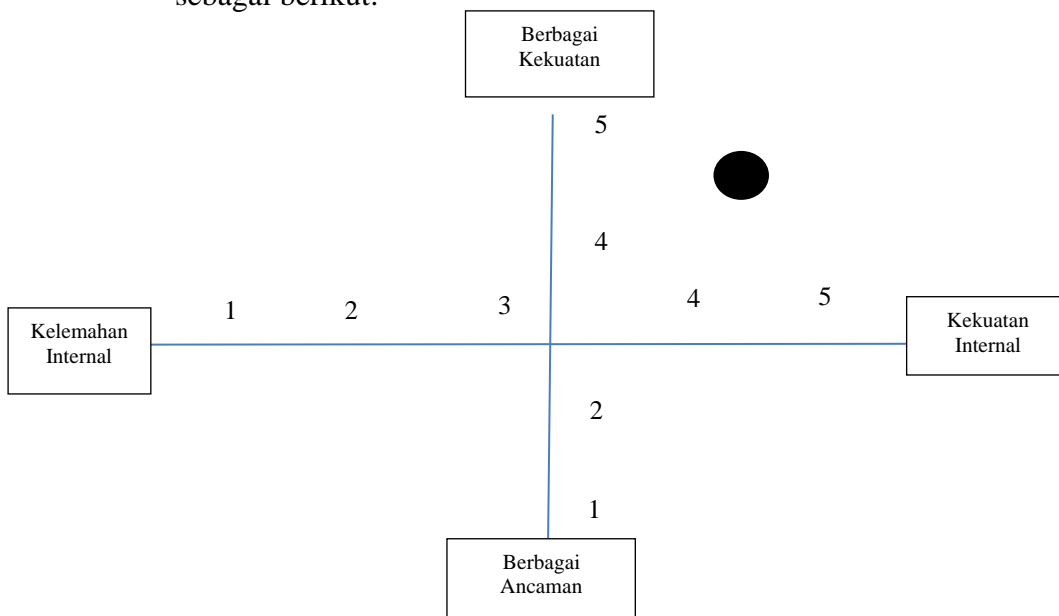
4	Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS	0.18	5	0.9
5	<i>Downtime system</i> atau gangguan sistem kegagalan sistem UPS (25 persen), serangan siber (22 persen), <i>human error</i> (22 persen), dan kegagalan generator (6 persen)	0.06	5	0.3
Total Ancaman		0.54		2.34
Total O + T		1		4.07

Analisis SWOT

Berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka dapat disusun beberapa alternatif strategi pengembangan Koperasi dan UMK yang berdaya saing, aspek-aspek internal dan eksternal dikombinasikan dan disusun dalam matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT yang biasa disebut Matriks Internal dan Eksternal (IE), Secara garis besar terdapat 3 jenis strategi dalam analisis matrik IE sebagai berikut:

- 1) *Growth strategy* yang merupakan pertumbuhan atau upaya diversifikasi.
- 2) *Stability strategy* adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan .
- 3) *Retrenchment strategy* adalah usaha memperkecil mengurangi usaha yang dilakukan .

Apabila digambarkan dalam bentuk kuadran SWOT matrik IE di atas sebagai berikut:



Gambar 4.10. Kuadran SWOT

Gambaran hasil Matrik IE dan kuadran SWOT di atas adalah menggambarkan Koperasi dan UMK memanfaatkan kekuatan dari peluang yang dimiliki (*SO Strategy*) dan gambaran Koperasi dan UMK mengatasi kelemahan dari peluang yang ada (*WO Strategy*). Selanjutnya bagaimana Koperasi dan UMK memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada (*ST Strategy*), dan terakhir adalah bagaimana Koperasi dan UMK mengatasi kelemahan yang mampu menjadi ancaman (*WT Strategy*). Adapun dari hasil analisis IFAS & EFAS yang dapat diambil Koperasi dan UMK adalah strategi pertumbuhan (*Growth Strategy*) yaitu *SO* dan *ST Strategy*.

1). SO Strategi meliputi :

- a) Meningkatkan Kualitas Manajerial, Produk dan Layanan.
- b) Peningkatan penggunaan Teknologi digital dalam memperluas akses.
- c) Peningkatan Kerjasama dengan perbankan dalam memperbesar modal usaha.
- d) Membangun jaringan yang kuat dengan pemerintah dan pasar tenaga kerja.
- e) Meningkatkan peran Pemerintah dan Peran wanita dalam pembangunan ekonomi.

2). ST Strategi meliputi :

- a) Meningkatkan Kualitas Kerjasama antar koperasi dan UMK di ASEAN.
- b) Meningkatkan Akses pendanaan dengan Perbankan dan Industri pengolahan.
- c) Meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah berkaitan dengan Pemanfaatan Media Sosial dan Jaminan dampak pelemahan Rupiah.
- d) Meningkatkan kualitas layanan dan Peran Masyarakat.
- e) Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja *Skill* Rendah.

E. Rekomendasi

Dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini, penulis mengemukakan rekomendasi terkait penelitian ini sebagai berikut : Masih banyaknya koperasi dan UMK yang kurang aktif secara keseluruhan rata-rata 62,60% masih dapat ditingkatkan, diharapkan peran serta dan kerja sama yang baik dari kementerian koperasi dan UMKM terus ditingkatkan terutama pembinaan pemanfaatan jaringan internet agar mampu bersaing dengan UMK lainnya di ASEAN dan Pembinaan pengelolaan Koperasi dan UMK yang bermutu, agar meningkatkan kualitas pengelolaan dan sumberdaya manusianya yang melek teknologi terutama teknologi pemanfaatan internet agar mampu mengembangkan usahanya seluas mungkin, UMK kategori *Real Estate*,

Pendidikan dan Jasa Perusahaan terus dikembangkan agar kedepan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, Pemerintah turut berperan secara intens dalam membantu koperasi dan UMK agar usahanya di kelola secara profesional agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar global, Koperasi dan UMK terus membangun kerjasama untuk membuka akses pendanaan dengan pihak perbankan dengan bunga rendah dan terjangkau.

F. Daftar Pustaka

- Claiborne, A., Buckley, E., Parsonage, D., Ross, R. P., & Ward, D. P. (1995). Molecular analysis of enterococcal loci involved in novel catabolic pathways. *Developments in Biological Standardization*, 85(1), 129–133.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2011). *Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution*. <http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution>, Diakses pada 17 Juni 2017.
- Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2013). Final report: ecommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. *Industrie 4.0 Working Group*.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Rathore, S., P. M. Desai, C. V. Liew, L. W. Chain, and P. W. S. Heng. 2013. Microencapsulation of microbial cells. *Journal of Food ngineering* 116: 369- 381.
- Suhartono, I. (2011). Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis. *Jurnal.Stiema.Ac.Id*, 4(7), 33–47. Retrieved from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8vP3qevYAhVGvY8KHUhnAy0QFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fjurnal.stiema.ac.id%2Findex.php%2Ffama%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F29&usg=AOvVaw1ijZ86scKBYWTsYEFgOHIM
- Z. Herlin Frinces (2011) *Be An Entrepreneur* (Jadilah seorang wirausaha) *Kajian Strategis Pengembangan Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

3.2 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal Sebagai Sumber Baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis

(Purnama Sari¹, Muhamad Apip² _Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Tujuan Pemerintah di era otonomi daerah adalah menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini menekankan pada daerah bersangkutan agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Provinsi Jawa barat merupakan daerah dengan wilayah yang luas, namun tergolong sebagai daerah yang memiliki kabupaten/kota yang sedikit. Dengan keadaan seperti itu, kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat cenderung memiliki wilayah yang terlalu luas. Dengan luasnya wilayah, pengelolaan pelayanan terhadap warga menjadi jauh tidak efisien.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah otonom yang sangat luas dan berada di salah satu wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan luasnya wilayah tersebut, maka beberapa wilayah lepas dari Kabupaten Ciamis dan menjadi daerah otonom baru (DOB), salah satunya adalah daerah Pangandaran. Dengan kondisi seperti itu, Kabupaten Ciamis harus dapat merencanakan pembangunan yang potensial paska lepasnya Pangandaran. Pembangunan pada sektor apapun seyogyanya dilakukan dengan mengacu pada dukungan potensi sumberdaya alam yang ada di suatu lokasi tertentu, prasarana dan hubungan ekonomi antar wilayah yang saling menunjang. Dengan kata lain, sistem pewilayahan pembangunan dilakukan melalui pendekatan zona, sedangkan pengembangan wilayah produksi dilakukan berdasarkan azas keuntungan, oleh karena itu suatu wilayah diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara lebih efisien.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Jawa Barat-Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis-Cirebon-Jawa Tengah. Dalam konteks pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis mempunyai 2 (dua) Kawasan Andalan yaitu Kawasan Andalan Priangan Timur dengan arahan pengembangan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata.

Proses pembangunan dan perkembangan Kabupaten Ciamis tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal berupa perkembangan globalisasi yang meningkatkan integrasi perekonomian regional. Sebenarnya keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah seperti terbukanya peluang

investasi, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian berfokus padaupaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan, yang lebih tinggikan dalam paradigma “*sustainable development*”, dengan tidak melupakan kepentingan dan kebutuhan generasi mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berupaya menciptakan akselerasi pembangunan daerah yang difokuskan untuk mencapai peningkatan kualitas pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan dan pertumbuhan iklim Investasi yang berbasis pada ‘*resource endowment*’ di Kabupaten Ciamis, dengan harapan memiliki *outcome* berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Setelah Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran, Ciamis kehilangan salah satu *icon* pariwisata alamnya yaitu pantai Pangandaran dan seluruh gugusan pantai yang berada di wilayah Ciamis bagian Selatan. Alternatif lain untuk mengembangkan potensi unggulan di Kabupaten Ciamis adalah mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Kabupaten Ciamis.

Potensi unggulan Kabupaten Ciamis adalah agribisnis dan pariwisata budaya. Dimana kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih besar dan bernilai ekonomi melalui pengembangan ekonomi berbasis ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis terutama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Adanya potensi kewilayahan, minat masyarakat dan budaya lokal, maka sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi, hal ini menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang *profitable* dan terpercaya, dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kondisi eksisting potensi sumber daya alam dan budaya lokal di wilayah Kabupaten Ciamis ?
- b. Kendala apa saja dihadapi dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya lokal di wilayah Kabupaten Ciamis ?
- c. Bagaimana strategi pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal sebagai sumber baru penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis ?

2. Kerangka Pemikiran

Dalam kondisi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi

setiap daerah. Sebagai daerah dengan wilayah yang luas, Kabupaten Ciamis mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan (*prime mover*) pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (*resource based economy*). Sementara itu, kondisi empiris menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ini masih belum optimal dalam peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

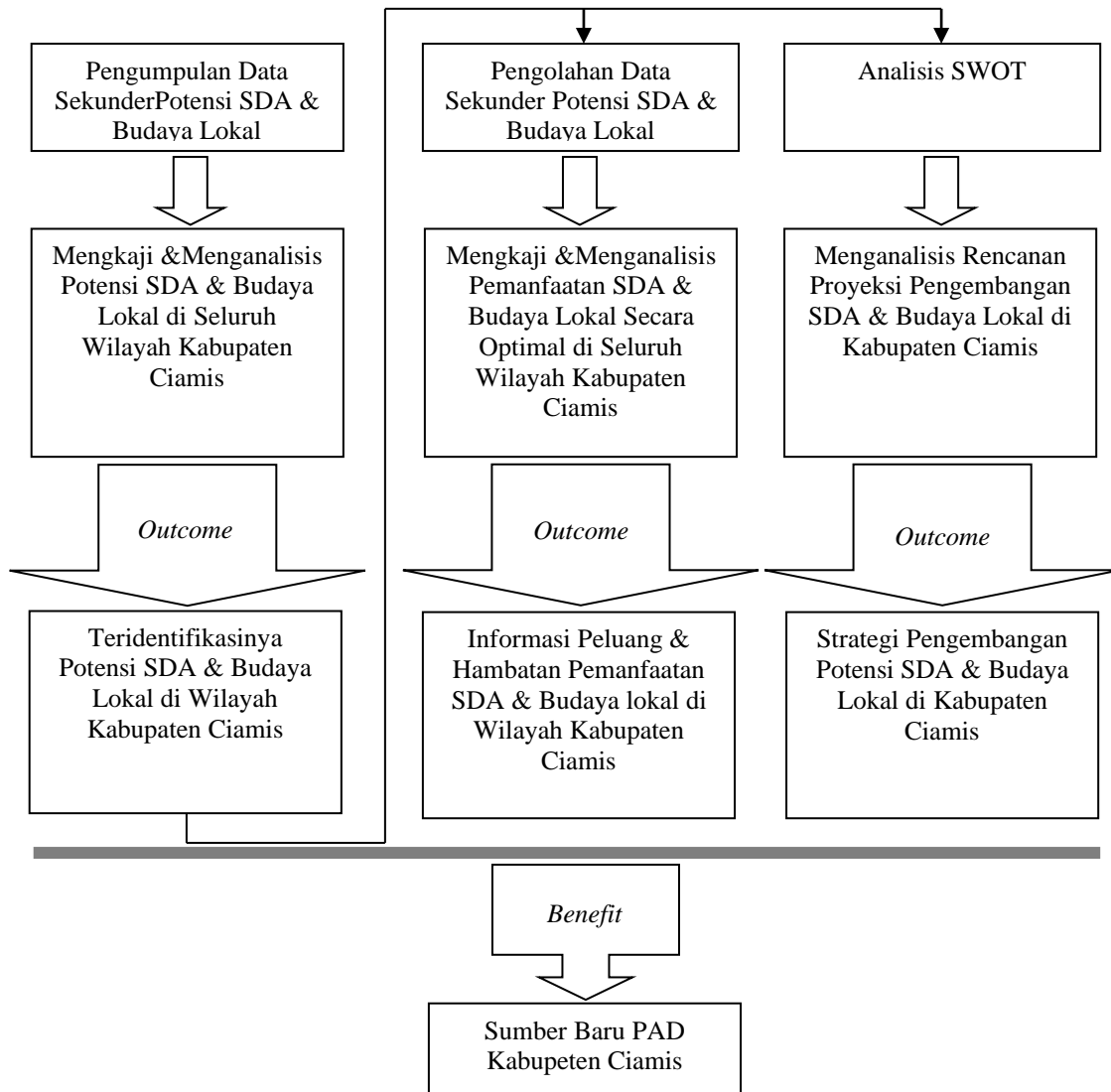
Menurut Damayanti et al., (2011) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata yang berbasis menikmati dan menghargai alam (ekowisata) dengan melibatkan unsur pendidikan dan keterlibatan aktif sosial masyarakat setempat dinilai dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketersediaan sumber daya alam yang potensial di suatu daerah selain dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dinilai dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai salah satu variabel pengukuran tingkat daya saing pengembangan wilayah dari suatu daerah. Irawati et al., (2012) menyatakan bahwa tingkat daya saing merupakan parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun semakin tinggi.

Prinsip umum dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia yang cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor utama dalam kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan dan karena faktor kelangkaan itu pula maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumberdaya memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumberdaya yang langka dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan. Macam dan karakterisasi sumberdaya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumberdaya tersebut tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebaiknya sumberdaya itu dikelola agar memenuhi kebutuhan umat manusia tidak hanya masa kini, tapi juga masa yang akan datang (Solihin & Sudirja, 2007).

Menurut Nandi (2016) sumberdaya budaya (*cultural resource*) boleh jadi berbentuk barang-barang (*goods*) dan jasa (*service*). Jika kedua sumberdaya budaya ini dikemas dengan baik dipastikan akan menjadi “suatu komoditi” yang memiliki peluang pasar yang besar, dan hal itu secara umum dikenal sebagai potensi obyek dan daya tarik wisata suatu daerah.

Kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam sebuah konsep pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Pemecahan Masalah

3. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian, rencana penelitian adalah gambaran menyeluruh program penelitian. Pada tahap awal penelitian, rencana pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Namun sehubungan dengan adanya Pandemi *Covid-19* ini, maka pengumpulan data yang dapat kami laksanakan hanyalah melalui studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan

data-data sekunder terkait dengan potensi SDA dan Budaya Lokal dari berbagai sumber yang dapat di akses.

Berikut adalah tabel untuk menggambarkan program penelitian yang mencakup garis besar dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim peneliti:

Tabel 1. Tahapan Penelitian

No	Tahapan	Luaran	Indikator	Metode
1.	Mengkaji & Menganalisis Potensi SDA & Budaya Lokal di Seluruh Wilayah Kabupaten Ciamis	Teridentifikasinya Potensi SDA & Budaya Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis	1. Sumber daya alam 2. Budaya Lokal	Studi Dokumentasi
2.	Mengkaji & Menganalisis Pemanfaatan SDA & Budaya Lokal Secara Optimal di Seluruh Wilayah Kabupaten Ciamis	Informasi Peluang & Kendala Pemanfaatan SDA & Budaya lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal	Studi Dokumentasi
3.	Menganalisis Rencana Proyeksi Pengembangan SDA & Budaya Lokal di Kabupaten Ciamis	Strategi Pengembangan Potensi SDA & Budaya Lokal di Kabupaten Ciamis	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal	Studi Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif di dalam organisasi atau perusahaan (SW) dan di luar itu dalam lingkungan eksternal (OT) Rangkuti (2004).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Kondisi eksisting potensi sumber daya alam dan budaya lokal di wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya lokal di wilayah Kabupaten Ciamis.
3. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya lokal sebagai sumber baru penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis.

C. **Permasalahan**

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah otonom yang sangat luas dan berada di salah satu wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan luasnya wilayah tersebut, maka beberapa wilayah lepas dari Kabupaten Ciamis dan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), salah satunya adalah daerah Pangandaran. Seperti yang diketahui, bahwa Pangandaran merupakan ikon Kabupaten Ciamis sebagai daerah wisata laut yang terkenal. Tidak dipungkiri Pangandaran merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi Kabupaten Ciamis.

Bersamaan dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis harus kehilangan salah satu sumber pendapatan andalannya. Dengan lepasnya wilayah tersebut, Kabupaten Ciamis kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp1 miliar (Pikiran Rakyat *Online*, 2015). Sebelumnya sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran. Paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis kini tidak lagi memiliki wilayah laut. Dengan lepasnya Pangandaran berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi sektor kelautan menjadi hilang.

D. **Hasil Analisa**

1. **Kondisi Eksisting Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal Kabupaten Ciamis**

Kabupaten Ciamis cukup potensial untuk pertanian dan pariwisata karena merupakan jalur transportasi antar kota maupun antar Provinsi yang melewati pusat kota. Jalur lalu lintas antar Provinsi melewati Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing dan Cisaga. Kabupaten Ciamis juga memiliki beberapa tempat pariwisata yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh dan wisata alam, diantaranya Astana Gede, Situs Ciung Wanara dan Situ Lengkong yang diharapkan menjadi daerah wisata andalan Kabupaten Ciamis setelah Pangandaran menjadi Kabupaten baru (BPS Kabupaten Ciamis, 2019).

Jika dilihat dari komposisi PDRB Kabupaten Ciamis tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 23,74%. Kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa sektor agribisnis saat ini menjadi potensi unggulan Kabupaten Ciamis. Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor Pertanian di Kabupaten Ciamis. Pada Tahun 2018 luas panen padi sawah tercatat sebesar 81.734 Ha. Lain halnya dengan kondisi padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 101 Ha menjadi 85 Ha di tahun 2018. Begitu juga Palawija seperti, ubi kayu, ubi jalar dan kacang

tanah dan jagung selama Tahun 2017 mengalami penurunan produksi. Sedangkan palawija seperti, kacang hijau dan kacang kedelai selama Tahun 2017 mengalami kenaikan produksi. Produksi sayuran umumnya mengalami penurunan di tahun 2017, diantaranya cabai dan petsai. Sementara komoditas yang mengalami kenaikan produksi di tahun 2017 adalah kubis. Begitu juga dengan buah-buahan, pada Tahun 2017 pada umumnya mengalami penurunan diantaranya mangga, durian, jeruk. Sementara yang mengalami kenaikan adalah pepaya dan nanas (BPS Kabupaten Ciamis, 2019).

Sementara itu jumlah rumah tangga perikanan budidaya dan jenis budidaya menurut kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terdiri dari kolam 93.526, keramba 63, jaring apung 139 dan sawah 1.412. Jumlah produksi kolam 61.577,16, keramba 1.703,72, jaring apung 1.013,79, sawah 222,43. Kemudian populasi ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terdiri dari Sapi Perah 82, sapi potong 9.998, kerbau 2.823, kuda 98, kambing 123.293, domba 177.093. Sedangkan populasi unggas dan jenis unggas menurut kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terdiri dari ayam kampung 1.472.954 ekor, ayam petelur 1.231.415 ekor, ayam pedaging 88.519.663 ekor dan itik/itik manila 165.163 ekor (BPS Kabupaten Ciamis, 2019).

Selain itu Kabupaten Ciamis juga memiliki potensi budaya dan tradisi yang masih dihormati sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Ciamis. Adapun potensi budaya yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya, Kampung Kuta, Batik Ciamis, Tari Ronggeng Amen, Tari Ronggeng Gunung, Tari Gondang, Upacara Nyangku, Situs Astana Gede Kawali, Situs Tambaksari, Situs Karangkamulyan, Situs Pangcalikan Gunung Padang, Situs Jambansari, Situs Gunung Susuru dan Keramat Kuning Lakbok. Ciamis juga memiliki objek wisata alam yang menjadi potensi pariwisata budaya yaitu, Situ Lengkong dan Curug Tujuh di Panjalu serta Situ Mustika di Cisaga (Wijayanti & Kartika, 2014).

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis

Secara geografis potensi unggulan Kabupaten Ciamis terletak pada bidang agribisnis, dimana padi sawah merupakan komoditas utama pada sektor pertanian. Namun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis saat ini tidak fokus dalam pengembangan sektor ini. Hal tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dimana saat ini merupakan tahap ke 4 atau periode terkahir dari semua rencana tahapan. Fokus pembangunan terhadap peningkatan infrastruktur sudah dimulai sejak tahapan yang kedua, yaitu RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014.

Kondisi tersebut menyebabkan lahan sawah dan tanah kering berkurang sebesar ±101.092 Ha dalam 10 tahun terakhir ini (BPS, 2019). Selain itu, disebutkan dalam salah satu surat kabar *Online* bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 ini salah satunya adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, perumahan dan kawasan pemukiman (Republik Merdeka, 2020). Tentunya kondisi tersebut menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, sehingga menjadi permasalahan baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Belum optimalnya pemanfaatan komoditas unggulan Kabupaten Ciamis belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diantaranya adalah subsektor ikan air tawar seperti gurame, nila dan udang galah. Kemudian subsektor pertanian seperti padi, serta subsektor tanaman pangan seperti duku, salak, rambutan, cabai dan jagung. Selain itu subsektor peternakan seperti sapi, ayam ras dan domba, serta sub sektor perkebunan seperti cengkeh, kakao, lada dan kelapa yang saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, sebab semua hasil bumi yang ada lebih banyak di manfaatkan oleh pengusaha diluar Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis cukup potensial untuk pariwisata karena merupakan jalur transportasi antar kota maupun antar provinsi yang melewati pusat kota. Jalur lalu lintas antar provinsi melewati Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing dan Cisaga. Kabupaten Ciamis juga memiliki beberapa tempat pariwisata, terutama wisata budaya yang merupakan peninggalan tataran kerajaan Galuh dan wisata alam yang saat ini tata kelola bagi pariwisata belum sepenuhnya diselenggarakan dengan baik, sehingga dari sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis.

3. Strategi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal Sebagai Sumber Baru Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan analisis SWOT dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya lokal sebagai sumber baru penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menggandeng pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam pemanfaatan hasil komoditas unggulan Kabupaten Ciamis, sehingga dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi perizinan usaha baru.
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan hasil komoditas unggulan Kabupaten Ciamis, sehingga dapat meningkatkan PAD melalui laba perusahaan daerah.

3. Memberdayakan usaha kreatif (UMKM) dalam pengolahan hasil komoditas unggulan menjadi produk khas Kabupaten Ciamis, sehingga dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi izin usaha baru.
4. Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola yang baik di sektor pariwisata budaya dan alam, sehingga dapat meningkatkan PAD melalui retribusi tempat rekreasi.
5. Pemerintah Daerah meningkatkan pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan budaya tatar galuh kepada masyarakat luas sebagai salah bentuk penyelenggaraan tata kelola yang baik di sektor pariwisata.

E. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2019*. Ciamis: BPS.
- Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2011). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bondosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 464–470.
- Irawati, I., Urufi, Z., Isaias RR, R. E., Setiawan, A., & Aryanto, A. (2012). Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. *J@Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, VII(1), 43–50. <https://doi.org/10.12777/jati.7.1.43-50>
- Kabupaten Ciamis. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024*. Ciamis: Pemkab Ciamis.
- Nandi, N. (2016). Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1689>
- Republik Merdeka. (2010). <https://www.rmoljabar.id/begini-10-prioritas-pembangunan-di-ciamis/>
- Solihin, M. A., & Sudirja, R. (2007). Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. *SoilRens*, 1–13.
- Wijayanti, Y., & Kartika, R. (2014). Tradisi Nyangkreb di Dusun Sukaraja Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis (Suatu Tinjauan Sejarah Kebudayaan dari Tahun 1972-2007). *Jurnal Artefak*, 2(1), 1–12.

3.3 Penentuan Prioritas Strategi Pengembangan IKM Menggunakan Metode *Analisis Hierarchy Process* (Studi Kasus IKM SIPIS Keripik Beling Wanasigra-Ciamis)

(Mala¹, Jamiludin Hidayat² _STAI Al Ma'Arif Ciamis)

A. Latar Belakang

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari sistem perekonomian Nasional. Hal ini dikarenakan IKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi domestik.

Dalam menjalankan suatu usaha pada era perekonomian yang sangat kompleks seperti sekarang ini, seorang wirausahawan harus mampu menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Seorang wirausahawan dituntut untuk mempertahankan keberlangsungan usaha yang dijalankan dengan baik. Seorang wirausahawan harus mampu berkomunikasi dan menguasai beberapa elemen kecakapan manajerial, serta mengetahui teknik menjual yang strategis mulai dari pengetahuan tentang produk. (Adi, 2007: 2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan model penilaian yang bersifat kuantitatif. Metode yang digunakan adalah *Analysis Hierarchy Process* (AHP) dan analisis SWOT. Populasi adalah pemilik atau orang yang dipercaya di Industri Kecil dan Menengah SIPIS Keripik Beling, sedangkan sampel penulis tentukan sebanyak 3 pemilik usaha Industri Kecil dan Menengah SIPIS Keripik Beling, serta pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner.

1. Rumusan Masalah

- a. Faktor apa yang menjadi prioritas dalam pengembangan IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis ?
- b. Bagaimana strategi pengembangan IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis ?
- c. Bagaimana rencana aksi dari strategi IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis ?

2. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Industri

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai

yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”.

b. Pengertian Strategi

Strategi dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah ilmu siasat perang; siasat perang, akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. (Muhammad Ali: 2005).

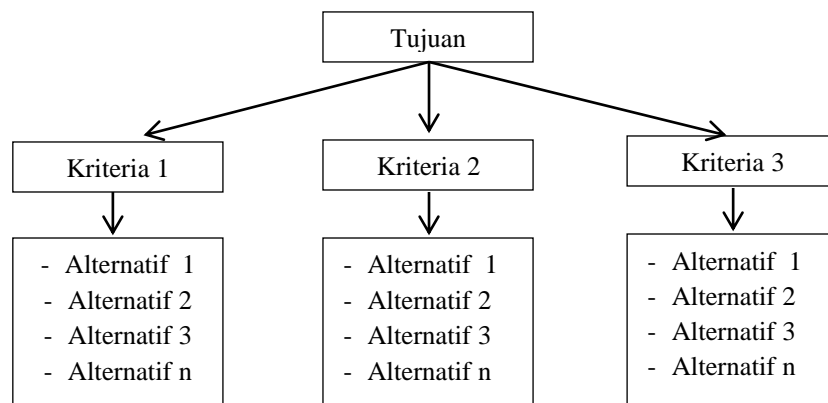
c. Analytical Heirarchy Proccess (AHP)

Menurut (Permadi,1992) yang dikutipoleh (Suryadi,2018) proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif. Peralatan utama Proses Analisis Hirarki (*Analytic Heirarchy Proccess*) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Perhitungan yang dihasilkan oleh AHP didasarkan pada pengalaman yang dimiliki para pengambil keputusan. (Hartono, 2018)

d. Tahapan Dalam AHP

1. Membangun Model Hirarki

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam analisis AHP adalah membangun sebuah model pohon hirarkis (*hierarchical tree*) tahapan ini juga disebut sebagai model keputusan yang merupakan hirarki analisis sebuah keputusan.



Gambar 1 Contoh struktur hierarki dalam AHP

2. Mendesain Kuesioner

Kuesioner desain untuk bisa mengakomodasi penilaian perbandingan berpasangan dari setiap kriteria dan alternatif. Nilai numerik dibutuhkan untuk peringkat. Menurut Saaty (1980), skala 1 sampai 9 adalah sekala terbaik dalam mengekspresikan pendapat.

3. Penentuan Prioritas (Pembobotan) untuk Kriteria

Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh kriteria dan alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan pendapat atau *judgement* yang telah ditentukan dari responden/ahlinya untuk menghasilkan bobot dan prioritas.

4. Melakukan Pengecekan Konsistensi

Setelah semua persepsi dari responden dimasukkan dan diolah melalui matriks perbandingan berpasangan, selanjutnya perlu untuk mengecek konsistensi dari persepsi tersebut. Penilaian skala di AHP diturunkan dari preferensi individu, sehingga sangatlah tidak mungkin untuk bebas dari inkonsistensi dalam matriks akhir hasil pembobotan prioritas. Sehingga pertanyaan mendasarnya adalah seberapa besar tingkat inkonsistensi yang bisa diterima. Berdasarkan kondisi tersebutlah maka AHP melakukan pengecekan konsistensi dengan menggunakan perhitungan *Consistency Ratio* (CR). Selanjutnya *Consistency Ratio*(CR) akan dibandingkan dengan *Consistency Index* (CI) dan *Random Index* (RI).

B. Tujuan

Tujuan kajian ini, adalah meliputi :

1. Menentukan faktor prioritas dalam strategi pengembangan IKM Sipis Keripik Beling.
2. Memberikan masukan bagi IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis tentang faktor yang menjadi prioritas dalam strategi pengembangan usahanya.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KUKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis.

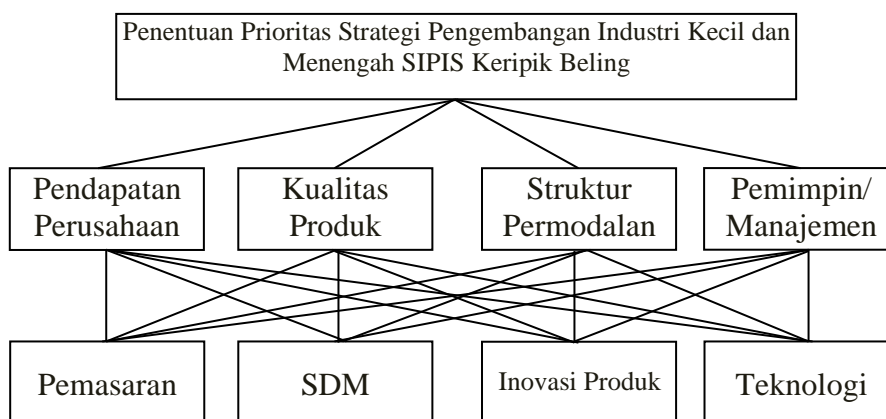
C. Permasalahan

IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra-Ciamis adalah Usaha Kecil yang bergerak dibidang makanan ringan dan berlokasi di Dusun Margasari Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Dewasa ini IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra-Ciamis telah berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui peningkatan wilayah pemasarannya, menggunakan tenaga kerja terampil, melakukan inovasi produk, dan menggunakan teknologi kemasan modern. Namun demikian, perkembangan IKM Sipis Keripik Beling dari tahun ke tahun belum mengalami kenaikan yang signifikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang baiknya perkembangan IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis adalah pengelolaan manajemen dan penetapan strategi yang kurang tepat sehingga produk yang dihasilkannya mudah ditiru, kesulitan dalam mengakses pasar, kurang mampu merespon kebutuhan pelanggan dalam mengembangkan usahanya, sehingga kemampuan kompetitifnya kalah bersaing dengan IKM lain. Permasalahan tersebut diduga disebabkan IKM Sipis Keripik Beling Wanasigra Ciamis belum mengetahui dan memahami faktor yang menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan usahanya. Sehingga kurang tepat dalam menentukan dan menetapkan strateginya dengan baik.

D. Hasil Analisa

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam analisis AHP adalah membangun sebuah model pohon hirarki sebagai model keputusan yang merupakan hirarki analisis sebuah keputusan. Penentuan prioritas strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling ini dengan cara memilih prioritas-prioritas yang paling baik dari alternatif-alternatif yang selanjutnya menentukan kriteria yang mencerminkan tingkat pencapaian adanya hubungan antara kriteria dengan elemen-elemen lainnya.



Gambar Struktur Hirarki

1. Perbandingan Berpasangan antar Kriteria terhadap Alternatif

Adapun perbandingan berpasangan antara kriteria Pendapatan Perusahaan (Pend.P), Kualitas Produk (KP), Struktur Permodalan (SP), dan Pemimpin/Manajemen (Pem/Manaj) terhadap tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria terhadap Alternatif

Kriteria	Pend.P	KP	SP	Pem/Manaj
Pend.P	1	2.333	1/0.704	1/0.708
KP	1/2.333	1	2.333	2.333
SP	0.704	1/2.333	1	1.667
Pem/Manaj	0.708	1/2.333	1/1.667	1

Tabel. Normalisasi Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria terhadap Alternatif

	Pend.P	KP	SP	Pem/Manaj	Σ	Prioritas
Pend.P	0.352034254	0.556766653	0.26534014	0.220264317	1.394405365	0.348601341
KP	0.150893379	0.238648373	0.435803137	0.36382467	1.189169559	0.29729239
SP	0.247832115	0.102292487	0.186799459	0.259963877	0.796887937	0.199221984
Pem/Manaj	0.249240252	0.102292487	0.112057264	0.155947137	0.619537139	0.154884285

Selanjutnya dihitung nilai Eign λ , Indeks Konsistensi, dan Rasio Konsistensi seperti terlihat di bawah ini :

Tabel. Menghitung Eigen Value- λ , CI, dan CR

	Pend.P	KP	SP	Pem/Manaj	Prioritas	Σ	λ
Pend.P	1	2.333	1.420454545	1.412429379	0.348601341	1.543933374	4.428936987
KP	0.428632662	1	2.333	2.333	0.29729239	1.272844236	4.281455835
SP	0.704	0.428632662	1	1.667	0.199221984	0.83025866	4.16750522
Pem/Manaj	0.708	0.428632662	0.599880024	1	0.154884285	0.648632551	4.187852577

2. Data Perbandingan Berpasangan Alternatif dengan Kriteria

Adapun perbandingan berpasangan antara alternatif Pemasaran (Pmsrn), Sumber Daya Manusia (SDM), Inovasi Produk (Inov.P), dan Teknologi (Tek) dengan kriteria Pendapatan Perusahaan (Pend.P), Kualitas Produk (KP), Struktur Permodalan (SP), dan Pemimpin/Manajemen (Pem/Manaj) adalah sebagai berikut ini :

Tabel Perbandingan Kepentingan Alternatif Berdasarkan Pertimbangan Pendapatan Perusahaan

Alt	Pmsrn	SDM	Inv. P	Tek
Pmsrn	1	1/0,556	1/0.704	1/0.714
SDM	0,556	1	3	2,333
Inv.P	0.704	1/3	1	1,4
Tek	0.714	1/2.333	1/1.4	1

Sedangkan normalisasi matriks perbandingan berpasangan kriteria terhadap tujuan terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Normalisasi Matriks Perbandingan Kepentingan Alternatif Berdasarkan Pertimbangan Pendapatan Perusahaan

	Pmsrn	SDM	Inv. P	Tek	Σ	Prioritas
Pmsrn	0,336247478	0,505139008	0,231542736	0,228343763	1,301272986	0,325318246
SDM	0,186953598	0,280857289	0,489018259	0,380366364	1,337195509	0,334298877
Inv.P	0,236718225	0,093619096	0,163006086	0,228252426	0,721595833	0,180398958
Tek	0,240080699	0,120384607	0,116432919	0,163037447	0,639935672	0,159983918

Selanjutnya dihitung nilai Eign λ , Indeks Konsistensi, dan Rasio Konsistensi seperti terlihat di bawah ini :

Tabel Menghitung Eigen Value- λ , CI, dan CR

	Pmsrn	SDM	Inv. P	Tek	Prioritas	Σ	λ
Pmsrn	1	1,798561151	1,420454545	1,400560224	0,325318246	1,406890852	4,324660137
SDM	0,556	1	3	2,333	0,334298877	1,429615178	4,276458209
Inv.P	0,704	0,333333333	1	1,4	0,180398958	0,744833448	4,128812358
Tek	0,714	0,428632662	0,714285714	1	0,159983918	0,664408962	4,152973438

3. Rangkuman Prioritas Keseluruhan

Tabel. Rangkuman Prioritas Keseluruhan

	Pend.P	KP	SP	Pem/Manaj	Prioritas
	0,348601341	0,29729239	0,199221984	0,154884285	
Pmsrn	0,325318246	0,298499905	0,298433812	0,321996664	0,311474926
SDM	0,334298877	0,242070047	0,363168825	0,383872713	0,320309684
Inv.P	0,180398958	0,287966405	0,188889665	0,184870031	0,214761976
Tek	0,159983918	0,171463643	0,149507698	0,109260592	0,153453414

Dari tabel di atas terlihat bahwa SDM merupakan prioritas pertama karena memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0.320309684 atau 32.03%, kemudian Pemasaran menempati prioritas kedua yaitu sebesar 0.311474926 atau 31.14%, selanjutnya yang ketiga adalah Inovasi Produk dengan nilai prioritas sebesar 0.214761976 atau 21.47%, dan prioritas yang terakhir adalah Teknologi dengan nilai sebesar 0.153453414 atau 15.34%.

Setelah diperoleh prioritas pengembangan, selanjutnya dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dengan menganalisis faktor internal dan eksternal Industri Kecil dan Menengah di Sipis Keripik Beling yang dimaksudkan untuk membuat strategi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling agar mampu memanfaatkan kekuatan dan merebut peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan serta mampu mengatasi ancaman yang mungkin muncul.

- a. Analisis faktor internal Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling.

- 1) Kekuatan
 - a) Kemudahan menjangkau lokasi usaha dan ketersediaan sarana transportasi.
 - b) Kerjasama dengan pemasok produk sangat baik.
 - c) Harga jual terjangkau.
 - d) Kemampuan untuk menciptakan variasi produk.
 - 2) Kelemahan
 - a) Belum baiknya kemampuan dan keterampilan pemilik usaha dan pekerja sehingga masih belum baiknya pengelolaan manajemen pemasaran.
 - b) Produk mudah ditiru.
 - c) Jangkauan pemasaran masih belum luas.
 - d) Pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
- b. Analisis faktor eksternal Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling.
- 1) Peluang
 - a) Masyarakat ekonomi menengah dan bawah masih mampu membeli produk yang ditawarkan.
 - b) Masyarakat yang konsumtif.
 - 2) Ancaman
 - a) Pesaing dari pengusaha sejenis.
 - b) Perdagangan bebas memungkinkan pedagang atau pengusaha luar kota masuk ke daerah-daerah di Indonesia.

Adapun matriks analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk menentukan strategi yang harus diambil adalah sebagai berikut :

Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan produk yang masih baru dan belum banyak pesaing di luar daerah. 2. Harga jual terjangkau. 3. Kemampuan untuk menciptakan variasi produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum baiknya kemampuan dan keterampilan pemilik usaha dan pekerja sehingga masih belum baiknya pengelolaan manajemen pemasaran 2. Produk mudah ditiru 3. Jangkauan pemasaran masih belum luas
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat ekonomi menengah dan bawah masih mampu membeli produk-produk yang ditawarkan 2. Semakin berkembangnya laju pertumbuhan penduduk, permukiman, dan pertumbuhan usaha 	<p style="text-align: center;">Memanfaatkan peran media sosial dalam mengakses informasi untuk pengembangan pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM untuk memperbaiki manajemen pemasaran</p>
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesaing dari pengusaha sejenis 	<p style="text-align: center;">Meningkatkan variasi produk dan mengupayakan harga tetap terjangkau</p>	<p style="text-align: center;">Menciptakan dan meningkatkan inovasi produk baru yang sulit ditiru yang menawarkan nilai lebih tinggi daripada pesaing</p>

Gambar Matriks SWOT

4. Rencana Aksi

Dalam meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah di Sipis Keripik Beling diperlukan upaya meningkatkan kebiasaan pengusaha dan karyawannya untuk terus menerus belajar untuk meningkatkan kompetensinya (*individual learning*), meningkatkan kebiasaan *team/group* untuk terus menerus belajar meningkatkan kompetensinya pada *level team/group (team/group learning)*, serta meningkatkan kebiasaan Industri Kecil dan Menengah di Sipis Keripik Beling untuk terus menerus belajar meningkatkan kompetensinya pada level perusahaan (*organizational learning*).

Tabel. Manajemen Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling (Lanjutan)

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Meningkatkan pendapatan Industri Kecil dan Menengah di SIPIS Keripik Beling.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah Kabupaten Ciamis 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah serta perlindungan dan dukungan usaha bagi Industri Kecil dan Menengah. Peningkatan akses teknologi dan SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Industri Kecil dan Menengah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Penumbuhan usaha dan manajemen Industri Kecil dan Menengah Peningkatan kualitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah melalui Penguatan Kelompok Usaha Produktif Peningkatan produktivitas Industri Kecil dan Menengah Penerapan manajemen usaha bagi Industri Kecil dan Menengah Pelatihan jejaring usaha dan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan kualitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah melalui Penguatan Kelompok Usaha Produktif

E. Rekomendasi

- Industri Kecil dan Menengah harus meningkatkan rata-rata kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas basis ilmiahnya, dan seterusnya. Dalam konteks perkembangan Industri Kecil dan Menengah, kemampuan untuk mengambil informasi dari aliran yang berlimpah serta mengalir deras dan cepat tersebut pada waktu, jumlah dan kualitas yang tepat disertai kemampuan untuk menyerap dan mengolahnya menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat, akan menentukan tingkat kemajuan ilmu dan teknologinya serta pada gilirannya akan meningkatkan daya inovasi dengan menciptakan keunikannya tersendiri yang berbeda dengan orang lain.
- Industri Kecil dan Menengah harus mampu untuk menciptakan praktek terbaik mereka sendiri dan mengembangkan posisi strategisnya yang unik. Perusahaan berdaya saing tinggi biasanya juga merupakan perusahaan yang produktif. Sebenarnya tingkat produktivitas, misalnya, tenaga kerja, tidak hanya mencerminkan tingkat penguasaan teknologi

oleh pekerja, atau tingkat ketersediaan teknologi di dalam perusahaan, namun juga sebagai sebuah indikator dari tingkat pendidikan dari pekerja. Wawasan pengusaha yang luas juga sangat penting bagi inovasi, dan bukan lagi rahasia umum bahwa inovasi merupakan kunci utama daya saing.

F. Daftar Pustaka

- Adi, M. Kwartono. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Jatmiko, Rammad D. (2003). *Manajemen Strategik*. UMM Press, Malang.
- Kuncoro dan Mudrajad. (2005). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Suryadi, K dan Ramdhani, A. (2018). *Sistem Pendukung Keputusan*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

3.4 Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah Dengan Metode AHP Topsis Pada UMKM Gula Semut di Kecamatan Pamarican (Nunung Uswatun Habibah_ STAI Al Ma'Arif Ciamis)

A. Latar belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam UU (Anggraeni et al. 2013). UMKM memiliki peranan penting dalam suatu negara diantaranya, pendistribusian pendapatan masyarakat, mampu mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat karena terciptanya kreatifitas, serta membantu dalam penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi masalah pengangguran (Anggraeni et al. 2013). Pergerakan perekonomian nasional mampu dipengaruhi oleh program pengembangan UMKM, serta pengembangan yang dilakukan dapat menjadi katup pengaman dari krisis moneter (Anggraeni et al. 2013). Dilihat dari manfaat dan peranannya, keberadaan UMKM perlu diperhatikan agar dapat menjadi wadah bekerja yang baik dan mampu bersaing dengan perkembangan jaman yang pesat serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak baik pada perekonomian nasional. Pada tahun 2010, 50% PDB berasal dari sektor UKM sedangkan 10% berasal dari sektor ekspor (Hapsari 2014). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil dan menengah tidak sedikit, namun secara umum, UMKM menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM di

antaranya adalah: permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan kemitraan.

Pada kondisi lain, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesungguhnya menghadapi situasi yang bersifat (*double squeeze*) situasi yang datang dari sisi internal dan eksternal, yaitu: Situasi yang datang dari sisi internal (dalam negeri) berupa ketertinggalan dalam produktivitas, efisiensi dan inovasi. Situasi yang datang dari *external pressure*, seperti pasar bebas. Di sinilah dirasakan pentingnya peran pemerintah maupun institusi penopang untuk mendongkrak kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pokok masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah penentuan strategi kebijakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya menembus pasar bebas yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM). Banyak kriteria yang terlibat dan bertentangan sehingga *Metode Multi Criteria Decision Making* (MCDM) yang diimplementasikan adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), Dimana metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menstrukturisasi permasalahan keputusan menjadi bentuk hierarki dan menghitung bobot dari masing-masing faktor dan aktor, Sedangkan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) digunakan untuk menghitung ranking dari solusi alternatif pada *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yaitu memilih solusi alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini, adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha pada UMKM Gula Semut di Kecamatan Pamarican.

C. Permasalahan

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Gula Semut di Kecamatan Pamarican dalam pengembangan usahanya, di antaranya adalah : permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan kemitraan.

D. Hasil Analisa

Penentuan strategi kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya menembus pasar bebas yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) yang diimplementasikan adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), Dimana metode *Analytic Hierarchy*

Process (AHP) digunakan untuk menstrukturisasi permasalahan keputusan menjadi bentuk hirarki dan menghitung bobot dari masing-masing faktor dan aktor. Sedangkan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) digunakan untuk menghitung ranking dari solusi alternatif pada *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yaitu memilih solusi alternatif terbaik berdasarkan solusi ideal.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai konsistensi rasio darkriteria dan tujuan lebih kecil dari 0.1 ($CR < 0.1$), selain itu nilai konsistensi rasio perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan pertimbangan pengusaha, pendapatan asli daerah, tenaga kerja, pimpinan/manajemen struktur biaya, struktur permodalan, dan kualitas produk seluruhnya lebih kecil dari 0.1 ($CR < 0.1$). Prioritas utama dalam pengembangan bisnis pada UMKM Gula Semut Desa Sidamulih Kec. Pamarican bahwa dengan bobot prioritas sebesar 0.2981 adalah oleh pemasaran, kemudian disusul oleh sumber daya manusia dengan bobot prioritas sebesar 0.2738, tempat selanjutnya yaitu oleh manajemen produksi dengan bobot prioritas sebesar 0.1747, inovasi produk diketahui menempati posisi keempat dengan bobot prioritas sebesar 0.1379, sedangkan posisi kelima ditempati oleh teknologi dengan bobot prioritas sebesar 0.1156. Sedangkan dalam kriteria terhadap tujuan yang memiliki bobot terbesar adalah pendapatan perusahaan yaitu sebesar 0.2649.

Pengolahan data *Analytic Hierarchy Process* (AHP) perbandingan berpasangan antar Faktor didapatkan demografis/kependudukan menjadi faktor yang dipilih oleh para responden ahli dengan nilai bobot 0,413, perbandingan berpasangan Aktor dari Setiap Faktor dengan nilai bobot 0,312 yaitu Pengusaha dan perbandingan berpasangan Alternatif dari Setiap Aktor didapatkan Kebijakan Permodalan dengan nilai bobot 0,303. Sedangkan hasil pengolahan data *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dari Alternatif terhadap Aktor didapatkan alternatif UMKM Gula Semut dengan nilai 0,929 merupakan solusi alternatif terbaik berdasarkan solusi ideal.

Jadi hasil dari pengolahan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) menunjukkan bahwa Kebijakan Permodalan adalah strategi terbaik yang harus diaplikasikan dalam penentuan kebijakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Rekomendasi

1. Pemerintah sebaiknya mempermudah prosedur pemberian kebijakan permodalan yang diorientasikan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kebijakan tersebut misalnya : Mempermudah Penjaminan Kredit, penyediaan dana penjamin kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumber pembiayaan perbankan. Dana penjaminan ini dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang layak usaha namun kurang memiliki agunan yang memadai dalam memperoleh kredit perbankan. Tentunya permodalan dengan jumlah yang lebih besar, persyaratan lebih lunak, dan prosedur yang lebih mudah, serta pencairan yang lebih cepat.
2. Dari hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diperoleh strategi pengembangan sebagai berikut :
 - a. Strategi Kekuatan dan Peluang
Memanfaatkan peran pemerintah dalam mengakses informasi untuk pengembangan pasar.
 - b. Strategi Kelemahan dan Peluang Memperbaiki manajemen pemasaran.
 - c. Strategi Kekuatan dan Acaman Meningkatkan kualitas produk.
 - d. Strategi Kelemahan dan Acaman Membuat inovasi produk dengan nilai yang tinggi.
Dari keempat strategi tersebut dipilih salah satu strategi yaitu strategi kelemahan dan peluang yaitu memperbaiki manajemen pemasaran sesuai dengan masalah yang dihadapi perusahaan. Hal ini dipilih untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki perusahaan untuk merebut peluang pasar yang belum terambil dengan mengoptimalkan alat-alat dari pemasaran atau *marketing mix* yaitu *product, price, place*, dan *promotion* yang dilakukan oleh manajemen.
3. Memfasilitasi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalin kemitraan pengembangan permodalan dengan lembaga keuangan, *Business Development Service (BDS)* Pembiayaan seperti Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) atau Lembaga Pelayanan Jasa Keuangan (LPJK) yang merupakan lembaga untuk memberikan layanan advokasi, mediator, dan pendampingan khusus di bidang pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Business Development Service (BDS)* Pembiayaan juga diposisikan untuk melakukan peran fasilitas lanjutan dari proposal yang diajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

F. Daftar Pustaka

- Ayrafedi. 2009. *“Pengumpulan Keputusan”*. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 2012, *Webnya Koperasi dan UKM*, Situs, www.google.com http://www.smecca.com, Bekasi, tanggal download 19/01/2012 pukul: 15.00 WIB
- Himmah, Faiqotul dan Ciptomulyono, Udisubakti. *“Implementasi Metode AHP TOPSIS dalam Perengkingan Prioritas Pengerjaan Order dan Penentuan Lintasan Kritis dengan Fuzzy Pert* (Studi Kasus: PT. Meco Inoxprima). Jurnal. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Surabaya.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2005-2012, Situs, www.google.com http://www.depkop.go.id/, Bekasi, tanggal download 19/01/2012, pukul: 15.13 WIB
- Marimin, 2005. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Gramedia. Jakarta.
- Saaty, T.L. 1988. *The Analytical Hierarchy Process For Decision In Complex World*. RWS Publication. Pittsburgh
- Surjandari, Isti and Jandi, Daniel. *“Maintenance Strategy Selection of Container Trucks in a Palm Oil Industry Using AHP and TOPSIS Method”*. Jurnal. In Industrial Engineering Department, University of Indonesia.
- Rangkuti, F. 2003. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta
- Pearce dan Robinson, 1997. *Manajemen Strategik. Formulasi, implementasi, dan pengendalian*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

BAGIAN IV HASIL KAJIAN MENGENAI KEPARIWISATAAN

4.1 Pengelolaan Obyek Wisata Budaya Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Obyek Wisata Budaya Situ Lengkong Panjalu)

(Agus Budiman¹, Egi Nurkholis² _Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan negara pada dasarnya bertitik pangkal pada tiga segi : ekonomi (sumber devisa), sosial (penciptaan lapangan kerja), dan kultural (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan). Disadari bahwa pariwisata dalam proses perkembangannya, juga memiliki dampak terhadap bidang sosial dan budaya (*Spillane*, 1994: 54). Sektor pariwisata adalah sektor yang banyak menghasilkan devisa bagi negara, sehingga pemerintah berusaha seoptimal mungkin dalam peningkatan sektor pariwisata dengan efektifitas dan efisiensi kebijakan pembangunan pariwisata. Dilihat dariletak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam dan budaya. Hal ini merupakan modal dalam pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi alam dan budaya yang sangat kaya dan unik. Dengan demikian, perekonomian negara dapat meningkat seiring meningkatnya sektor pariwisata (Fandeli, 1995: 7).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di jelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu objek wisata harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pariwisata yang baik dan terencana akan berdampak positif bagi ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam konteks pariwisata berbasis pembangunan masyarakat merupakan konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik tertentu dan yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi.

Pariwisata berbasis pembangunan masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigm*) pariwisata berbasis pembangunan masyarakat merupakan solusi untuk optimalisasi potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar.

Pariwisata berbasis pembangunan masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka (Usman, 2004: 56)

Menurut Damanik (2013: 9) keterlibatan masyarakat merupakan kata kunci untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata. Kajian yang banyak dilakukan para ahli dengan jelas menyatakan bahwa hanya dengan keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pembagian hasil maka mereka dapat memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata.

Kabupaten Ciamis merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat dan terletak sekitar 137 km kearah tenggara dari Ibu Kota Jawa Barat, Bandung. Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Akan tetapi setelah pemekaran wilayah pangan menjadi daerah otonom baru, potensi pariwisata Kabupaten Ciamis pun berkurang. Obyek wisata budaya pada dasarnya dapat dikembangkan dengan optimal dikarenakan banyaknya tempat-tempat potensial dalam pengembangan pariwisata budaya. Wisata budaya berkaitan erat dengan peninggalan sejarah dan arkeologis Kerajaan Galuh yang berada di Kabupaten Ciamis.

Salah satu destinasi wisata yang dapat di proyeksikan menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Ciamis adalah Situ Lengkong Panjalu yang terletak di Kecamatan Panjalu. Beberapa alasan yang melatar belakangi pemerintah daerah memproyeksikan Situ Lengkong Panjalu menjadi wisata unggulan karena Situ Lengkong Panjalu memiliki wisatawan yang tetap, dan fasilitas yang tersedia sudah memadai apabila dibandingkan dengan fasilitas yang terdapat pada objek wisata budaya lainnya. Selain dikenal sebagai tempat wisata budaya dan religi, daya tarik wisata Situ Lengkong juga terletak pada keragaman ekosistemnya. Terdapat cagar alam dan danau yang memiliki berbagai tumbuhan dan hewan yang perlu dijaga kelestariannya. Karena

keberadaan tumbuhan dan hewan tersebut merupakan bagian dari sistem penyangga kawasan Situ Lengkong.

Optimalisasi pengelolaan obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu pada dasarnya bukan hanya ditinjau dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, melainkan pengelolaan yang dijalankan dalam rangka pengembangan potensi obyek wisata Situ Lengkong Panjalu yang juga dapat membantu masyarakat Panjalu agar memiliki mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari sektor pariwisata budaya yang ada.

Seiring berkembangnya wisata budaya Situ Lengkong Panjalu akan berdampak sistemik terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Panjalu. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu untuk memperoleh mata pencaharian akan menguntungkan bagi tingkat perkembangan ekonomi masyarakat.

Di obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu terdapat banyak sekali masyarakat yang melakukan perniagaan baik dalam bidang jual-beli barang ataupun jasa. Transaksi jual beli barang mayoritas memanfaatkan obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu untuk menjajakan souvenir khas produk asli masyarakat sekitar Situ Lengkong Panjalu, sedangkan usaha jasa dilakukan oleh masyarakat dengan menyewakan perahu bagi pengunjung obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu kepada pengunjung yang akan menyeberang ke pulau atau hanya sebatas berkeliling di wilayah area obyek wisata budaya di Situ Lengkong Panjalu.

B. Tujuan

1. Menganalisis supaya yang dilakukan pihak pengelola dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu.
2. Menganalisis Dampak dari adanya obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

C. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak pengelola dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu ?
2. Bagaimana Dampak dari adanya obyek wisata budaya Situ Lengkong Panjalu terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat ?

D. Hasil Analisa

1. Upaya Pengelola dalam Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Budaya Situ Lengkong Panjalu

a. Pengelolaan Situ Lengkong

Menurut Suganda (2003), pada masa penjajahan Belanda, perhatian sangat besar ditujukan terhadap keberadaan dan kelestarian Nusa Gede. Pada tanggal 16 November 1921 pulau tersebut diberi nama

“Pulau Koorders”. Nusa Gede berubah nama menjadi Pulau Koorders. Sebagai bentuk penghargaan kepada Dr. Koorders, ketua pertama *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan tahun 1863.

Pada tanggal 21 Pebruari 1919 area Situ Lengkong dengan Pulau *Koorders* yang sering disebut Nusa Gede atau Nusa Panjalu atau Nusa Larang dinyatakan sebagai kawasan cagar alam yang benar-benar dijaga kelestarian alam serta budaya yang ada di dalamnya. Ketetapannya terdapat dalam Keputusan: GB 6 stbl 90 Tanggal 21 Pebruari 1919 (Departemen Kehutanan, 2002). Pengelolaannya di bawah Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat II (BKSDA Jabar II). Sedangkan areal Situ Lengkong Panjalu secara bersama, BKSDA Jabar II dan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengelola kelestarian alamnya sekaligus memanfaatkannya untuk kegiatan wisata.

b. Program pengembangan Situ Lengkong

1) Danau

Luas Situ atau Danau Lengkong Panjalu adalah 57.95 ha dan Nusa Gede 9.25 ha sehingga luas keseluruhannya adalah 67.2 ha. Kedalaman air di Situ Lengkong Panjalu berkisar antara 2–6m. Situ Lengkong Panjalu berada pada ketinggian 731 mdpl. Situ Lengkong Panjalu memiliki daya tarik bagi pengembangan wisata alam. Suasana danau yang masih alami dan keanekaragaman flora dan fauna menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Pengunjung yang datang dapat menikmati indahnya pemandangan alam Situ Lengkong Panjalu dengan berjalan di pinggir situ atau menaiki perahu mengitari kawasan situ ini. Pengunjung akan dapat melihat kalong (*Pteropus vampyrus*) yang cukup banyak di kawasan ini. Dengan udara yang cukup sejuk dan angin kecil, pengunjung akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari pengalaman wisata di Situ Lengkong ini.

2) Nusa Gede

Nusa Gede berada pada ketinggian 731 meter di atas permukaan laut, masuk dalam wilayah Desa dan Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Nama lain Nusa Gede adalah Pulau *Koorders*. Nama tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Dr. *Koorders*. Beliau adalah ketua pertama *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang di dirikan tahun 1863. Pada tanggal 21 Februari 1919 area Situ

Lengkong dengan Nusa Gede dinyatakan sebagai kawasan cagar alam yang benar-benar dijaga kelestarian alam serta budaya yang ada di dalamnya.

Sebagai kawasan cagar alam yang berada dalam pengawasan BKSDA Jabar II, Nusa Gede memiliki vegetasi hutan primer yang relatif masih utuh dan tumbuh secara alami. Wisatawan yang berkunjung pada areal sekitar kompleks pemakaman, karena areal lainnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan wisata. Saat memasuki kawasan, pengunjung sudah disambut pepohonan rotan (*Calamus javanensis*), dan aren (*Arenga pinnata*). Semakin masuk ke dalam, pengunjung akan melihat pepohonan besar seperti kihaji (*DysoxylumSp*) dan kikondang (*Ficus variegata*).

Selain jenis flora, di kawasan Nusa Gede juga dapat ditemui berbagai jenis fauna, sebut saja antara lain burung hantu (*Otus scops*), dan kalong (*Pteropus vampyrus*). Sementara Elang jambul putih hanya sesekali mendatangi Nusa Gede.

3) Nusa Pakel

Nusa Pakel merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Nusa Gede. Dahulu nusa Pakel merupakan taman yang sering digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan. Kondisi Nusa Pakel sekarang telah bersatu dengan daratan.

Kondisi ini terjadi akibat adanya konversi sebagian kawasan danau menjadi areal pesawahan. Tidak diketahui kapan mulai terjadi perubahan fungsi lahan di sekitar Nusa Pakelini. Para pemilik sawah di sekitar Nusa Pakel telah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dari pemerintah setempat. Pemandangan di Nusa Pakel cukup indah. Dengan latar belakang Nusa Gede di sebelah timur dan Gunung Sawal di sebelah selatan, sehingga sangat cocok untuk kegiatan fotografi.

4) Komplek Pemakaman Nusa Gede

Komplek Pemakaman Nusa Gede merupakan Komplek Pemakaman khusus keluarga kerajaan. Salah satu makam tersebut adalah Makam Prabu Hariang Kancana. Makam inilah yang menjadi objek utama wisata ziarah. Biasanya pada hari libur pengunjung banyak mendatangi kompleks pemakaman ini. Oleh karena itu, pihak kuncen membatasi jumlah kunjungan yang masuk agar suasana di dalam kompleks pemakaman ini menjadi baik.

5) Komplek Pemakaman Hujung Winangun

Komplek Pemakaman Hujung Winangun terletak di bagian Barat Situ Lengkong Panjalu. Awalnya Komplek Pemakaman ini diperuntukkan bagi kalangan Abdi Keraton Kerajaan Panjalu. Di dalamnya terdapat beberapa makam keramat. Salah satunya merupakan Makam Patih kerajaan Panjalu. Para peziarah biasanya datang pada malam Kamis Kliwon.

Saat ini Komplek Pemakaman Hujung Winangun telah berubah menjadi kompleks pemakaman umum. Pemakaman ini tidak dikhususkan bagi keturunan Abdi Kerajaan Panjalu. Biasanya orang yang dimakamkan di Komplek Pemakaman Pemakaman Hujung Winangun ini merupakan penduduk asli Panjalu atau orang yang masih keturunan Panjalu.

6) Upacara Adat Nyangku

Nyangku memiliki arti *nyaangan laku* (menerangi perilaku). Nyangku berasal dari bahasa Arab, *yanko*, yang artinya membersihkan. Di Desa Panjalu Nyangku berarti membersihkan benda-benda pusaka peninggalan para leluhur. Dalam arti yang lebih luas upacara ini bermakna pembersihan diri manusia. Sesungguhnya manusia terlahir dalam keadaan bersih, sehingga harus kembali dalam keadaan bersih pula. Air yang digunakan untuk mencuci pusaka diambil dari sembilan mata air, seluruhnya terletak di sekeliling Desa Panjalu. Kesembilan mata air ini konon tidak pernah kering, walau musim kemarau sekalipun. Hanya kuncen atau juru kunci dan sesepuh desa yang berhak mengambil air dari sumur ini.

Upacara dipusatkan di Bumi Alit, tempat dimana pusaka Prabu Borosngora disimpan. Bumi Alit merupakan bangunan sakral berbentuk bujur sangkar, simbol Ka'bah. Pusaka yang disimpan di dalamnya tak dapat dijamah oleh siapapun, kecuali kuncen dan kerabat keturunan Prabu Borosngora. Warga yang ingin berdoa hanya dapat duduk di luar Bumi Alit. Menjelang puncak upacara Nyangku, kuncen menyiapkan segala kebutuhan untuk mencuci pusaka. Mulai dari jeruk nipis guna menghilangkan karat, arang untuk mengeringkan setelah dicuci, hingga daun kelapa untuk membungkus kembali pusaka, dan kemenyan.

Tidak semua dari ratusan pusaka milik Panjalu, dibawa ke upacara Nyangku. Hanya pusaka pokok, yaitu pedang, stok komando, kujang dan gong kecil milik Prabu Borosngora, dan

beberapa keris lainnya yang ikut dalam prosesi. Selama prosesi, suara musik gembungan khas Panjalu, dimainkan empat belas pria berbusana serba ungu. Inti upacara Nyangku dimulai setelah rombongan kembali dari Nusa Gede.

Pembersihan pusaka dimulai dengan menggosokkan jeruk nipis, untuk menghilangkan karat. Barulah kemudian disiram air suci. Dari balai desa, pusaka kembali diarak menuju Bumi Alit. Seluruh ritual merupakan gambaran proses kehidupan manusia. Mulai daripusaka dikeluarkan dari Bumi Alit, yang melambangkan kelahiran bayi dari rahim ibunya. Proses arak-arakan perlambang kehidupan itu sendiri, hingga dikembalikannya pusaka kedalam Bumi Alit yang mengandung arti kembalinya manusia kedalam liang lahat.

7) Bumi Alit

Bumi alit merupakan suatu bangunan tempat penyimpanan benda-benda pusaka kerajaan sewaktu kerajaan Panjalu berdiri sampai sekarang. Letak Bumi Alit tidak jauh dari Situ Lengkong tempatnya terletak di terminal Panjalu. Bumi Alit adalah suatu bangunan kecil yang ditempatkan pada suatu tempat yang diberi nama *Pasucian*, nama pasucian diberikan oleh pendirinya yaitu seorang Raja Panjalu yang bernama Prabu Sanghyang Boros Ngora atau Syeh Haji Dul Iman yang merupakan Raja Panjalu, yang memeluk agama Islam pertama.

Bumi Alit atau Pasucian pada awalnya terletak di Bumi Sakti, kemudian dipindahkan ke Desa Panjalu oleh Prabu Sanghyang Boros Ngora bersama benda-benda Kerajaan Panjalu. Bentuk Bumi Alit yang lama masih berbentuk tradisional tempatnya masih berupa tanaman lumut yang dibatasi oleh batu-batu besar, sedangkan di sekelilingnya dipagari oleh tanaman Waregu. Bumi Alit terbuat dari kayu, bambu dan ijuk. Bagian bawahnya bertiang tinggi, badan bangunan berdinding bilik sedangkan atapnya dari suhunan ijuk berbentuk pelana. Ujung bungbung menciut berujung runcing dan tutup bungbung ditutup dengan papan kayu berukir. Pada sisi bagian barat terdapat pintu kecil yang depannya terdapat tangga kayu yang terbuat dari balok kayu tebal.

Bumi Alit yang sekarang ini adalah hasil pamugaran pada tahun 1955 yang dilaksanakan oleh warga Panjalu dan sesepuh Panjalu yang bernama R. H. Sewaka (Alm), sedangkan bentuk bangunan museum Bumi Alit yang sekarang ini adalah campuran

bentuk modern dengan bentuk mesjid zaman dulu yang beratapkan susun tiga. Pintu masuk ke museum Bumi Alit terdapat patung ular bermahkota dan di pintu gerbang atau gapura terdapat patung kepala gajah.

2. Dampak Obyek Wisata Situ Lengkong Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Banyak sekali masyarakat yang bergantung kepada keberadaan situ lengkong Panjalu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar obyek wisata budaya Panjalu yaitu dengan menjadi juru parkir di situ lengkong Panjalu. Penghasilan para juru parkir di situ lengkong Panjalu tidak menentu dikarenakan berbagai alasan salah satunya bahwa pengunjung obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu tidak setiap hari, akan tetapi padat dan ramai ketika waktu-waktu tertentu saja. Akan tetapi, masyarakat yang ditugaskan menjadi juru parkir menganggap bahwa kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Penghasilan mereka ketika hari-hari biasa berjumlah antara Rp.50.000-Rp.75.000 per hari. Hal tersebut berbeda jauh ketika pada hari-hari tertentu ketika situ lengkong Panjalu sedang musim ramai, penghasilan para juru parkir berkisar antara Rp.150.000-Rp.250.000 per hari.

Di obyek wisata situ lengkong Panjalu, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan obyek wisata budaya, selain berpartisipasi secara aktif, masyarakat memanfaatkannya dengan memanfaatkan keberadaan situ lengkong untuk mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada sekitar 327 orang yang menggantungkan mata pencahariannya terhadap keberadaan situ lengkong Panjalu. Masyarakat memanfaatkan situ lengkong Panjalu untuk berjualan makanan kebutuhan pokok, cemilan dan buah-buahan. Selain itu banyak pula yang memanfaatkan keberadaan situ lengkong Panjalu untuk berjualan barang-barang sekunder dan tersier seperti pakaian khas Panjalu, sandal, alat-alat tradisional dll.

Masyarakat juga memanfaatkan situ lengkong Panjalu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkannya untuk menjual berbagai jenis jasa. Masyarakat memanfaatkan adanya obyek wisata situ lengkong Panjalu dengan menyewakan jasa perahu dengan tarif Rp125.000 per sekali sewa untuk 8-10 orang. Ketika dikonfirmasi ternyata masyarakat yang menyediakan jasa sewa perahu sangat diuntungkan oleh keberadaan situ lengkong Panjalu karena mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan

mengandalkan jasa sewa perahu bagi para pengunjung tempat wisata budaya. Perahu dimanfaatkan untuk menyebrang dari pintu masuk obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu ke Nusa Gede.

Selain menyewakan perahu untuk menyebrang, masyarakat sekitar wilayah obyek wisata budaya memanfaatkan keberadaan obyek wisata budaya tersebut dengan cara menyewakan sepeda air berbagai bentuk dengan biaya sewa Rp35.000-Rp45.000 per sekali sewa untuk maksimal 2 orang. Dengan pemanfaatan yang efektif dan kreatif ternyata keberadaan obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu.

Jasa lain yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar obyek wisata yaitu dengan cara menjadi pemandu wisata budaya. Masyarakat lagi-lagi diuntungkan dengan keberadaan obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu walaupun tidak setiap orang yang tinggal di sekitar obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu dapat menjadi pemandu wisata, karena orang-orang yang dipercaya menjadi pemandu wisata adalah orang-orang terpilih, karena yang menjadi pemandu wisata budaya tidak sembarangan karena seorang pemandu wisata merupakan masyarakat yang mengetahui sejarah dan pengembangan obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu. Penghasilan para pemandu wisata tidak menentu dikarenakan para pengunjung tidak dipatok harga sebagai tarif untuk pemandu wisata budaya. Penghasilan mereka berkisar antara Rp60.000-Rp120.000 per hari.

E. Rekomendasi

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memungkinkan untuk menyatakan saran-saran yang diajukan demi kepentingan pengembangan obyek dan subyek penelitian. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Pengelola obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu agar lebih optimal dalam pengembangan potensi sumber wisata budaya yang ada dengan penggalian nilai sejarah lokal.
2. Masyarakat seyogyanya lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan keberadaan obyek wisata budaya situ lengkong Panjalu agar mampu meningkatkan secara signifikan kualitas kesejahteraan ekonomi keluarga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta: Penerbit Liberty.*

- Suganda, H.2007. Jendela Bandung Pengalaman BersamaKompas, Jakarta. Penerbit Buku Kompas.*
- Sunyoto, Usman. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Spillane, James. 1994. Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Kanisius. Yogyakarta.*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

4.2 Pengelolaan Objek Wisata Kampung Sawah Oleh Bumdes Wibawa Mukti Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

(Wawan Risnawan¹, Etih Henriyani² _ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia. Dimana pariwisata menempati posisi yang strategis dalam hal penerimaan devisa. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang cukup besar sebagai modal dasar bidang kepariwisataan. Dan modal tersebut apabila dikelola dan direncanakan dengan baik serta terarah tentunya memiliki andil besar dalam menunjang pencapaian tujuan nasional.

Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan baik itu wisata budaya, wisata ziarah, ataupun wisata pertanian. Sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Ciamis juga memiliki potensi wisata untuk dibangun dan dikembangkan. Karena itu pula, Desa Talagasari sebagai salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terinspirasi untuk mengembangkan potensi pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui wisata “Kampung Sawah”. Objek wisata ini berada di lahan sawah bengkok peruntukkan Kepala Desa Talagasri. Untuk itu, pihak pengelola kampung sawah menerapkan sistem sewa atas penggunaan lahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dari hasil penjajagan awal peneliti diketahui bahwa pengelolaan objek wisata kampung sawah belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber daya pengelola, masih terbatas dengan mengandalkan tenaga masyarakat setempat. Pemerintah Desa maupun pihak BUMDes masih mempertahankan warga setempat dengan alasan pemberdayaan sehingga belum ada keinginan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

2. Pengawasan dalam hal keuangan masih kurang. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa saat ini sebatas meminta laporan pertanggungjawaban kepada pihak BUMDes setahun sekali.
3. Belum menetapkan strategi yang terarah untuk mencapai target pengembangan. Dimana belum ada tambahan atraksi wisata yang baru yang menarik minat pengunjung. Jika melihat potensi yang ada, kolam-kolam yang ada di area wisata bisa dijadikan tempat terapi ikan atau pengembangan atraksi yang lainnya. Sayangnya, saat ini pengelola fokus ke persiapan membuka objek wisata pegunungan di wilayah pasir pongpok yang berada di kawasan gunung sawal.

Untuk kegiatan kajian ini, metode kajian yang digunakan adalah metode kajian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui observasi, wawancara, studi literasi dan mengamati fenomena yang ada di wilayah sekitar lokus kajian yang dilaksanakan di dilaksanakan di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan informan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Kepala Desa Talagasari, Direktur BUMDes Wibawa Mukti, Pengelola Kampung Sawah dan Tokoh Masyarakat.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Kampung Sawah oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan objek wisata Kampung Sawah Oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Untuk lebih memfokuskan pada penelitian ini maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan di teliti pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengelolaan objek wisata Kampung Sawah Oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan objek wisata Kampung Sawah Oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

D. Hasil Analisa

1. Pengelolaan objek wisata Kampung Sawah Oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Kampung Sawah merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Dusun Cigintung Kecamatan Kawali. Objek Wisata Kampung Sawah ini mengusung konsep wisata keluarga yang digagas dan dikelola oleh BUMDes Wibawa Mukti.

Adapun BUMDes adalah kewenangan lokal dengan skala Desa atas dasar prakarsa dari Desa yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan serta kondisi lokal Desa. Keberadaan BUM Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan atas kewenangan desa sebagaimana yang tercantum pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti oleh PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

BUMDes sebagai pengelola pariwisata sangatlah tersinergi dengan baik untuk mengembangkan program desa mengenai pariwisata desa, sebagaimana yang disampaikan Sedarmayanti, (2014:8) bahwa pariwisata akan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap sosial ekonomi seperti penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga, distribusi manfaat/keuntungan, kepemilikan dan kontrol, pembangunan pada umumnya, pendapatan Pemerintah.

Besarnya dampak pariwisata ini, tentunya tidak lepas dari bagai mana pengelola melakukan manajemennya dengan baik, sebagaimana yang disampaikan Hasibuan (2011 : 1-2), bahwa manajemen adalah “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Kampung Sawah, peneliti akan membahas hasil wawancara dan observasi atas pengukuran 4 dimensi fungsi-fungsi manajemen menurut *Nickels, McHug and McHugh* (Mukarom dan Laksana, 2015 : 55-57), yaitu “Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian dan Pengendalian”. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Perencanaan

BUMDes Wibawa Mukti selaku pengelola wisata desa Kampung Sawah Perencanaan kepariwisataan kampung sawah tersebut secara umum telah dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Talagasari dan telah berjalan sejak Kampung Sawah dibangun pada bulan September 2018 dan dibuka untuk umum pada bulan Januari 2019 dengan fasilitas yang telah dilengkapi dengan taman bunga yang warna-warni, wahana permainan, gazebo, tempat kuliner, dan juga tempat karaoke. Fasilitas lainnya adalah toilet dan tempat parkir. Adapun perencanaan ke depan adalah penambahan fasilitas dan wahana bermain seperti kolam renang, kolam untuk terapi ikan, wahana edukasi dan *offroad*. Namun sayangnya perencanaan tersebut bukan untuk target jangka pendek, mengingat kapasitas yang ada baik SDM maupun sumber daya anggaran yang belum memadai dan saat ini Pemerintah Desa tengah fokus dengan pembukaan wisata baru di kawasan pasir pongpok.

b. Pengorganisasian

Dalam hal pengorganisasian BUMDes Wibawa Mukti sudah memiliki payung hukum yang jelas baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun Perdes Talagasari tentang Pembentukan BUMDes.

Dalam hal pengelolaan objek wisata Kampung Sawah, Pihak BUMDes juga menunjuk tim khusus untuk manata kelola kampung sawah dengan melibatkan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang dianggap mumpuni. Dan saat ini pihak pengelola masih menutup akses keterlibatan pihak investor/swasta dengan alasan ingin memberdayakan terlebih dahulu masyarakat yang ada di Desa Talagasari. Namun demikian, resikonya adalah orang-orang yang tergabung di dalamnya belum profesional yang memenuhi standar SDM pengelola pariwisata. Hal ini terlihat dari pencatatan keuangan yang masih secara manual, dan promosi wisata yang lebih dominan mengandalkan pendekatan secara personal ketimbang dengan pemanfaatan teknologi informasi.

c. Pengimplementasian

Objek Wisata Kampung Sawah dalam implementasinya masih memiliki keterbatasan terutama mengenai kapasitas SDM yang ada, juga daya dukung berupa partisipasi masyarakat yang masih kurang. Dimana belum ada kelompok pegiat wisata yang secara aktif manggali dan mengenali potensi yang ada untuk mendukung pengembangannya, seperti kerajinan masyarakat atau produk UMKM. Begitu pula dengan Pemerintah Desa yang merasa sudah menyerahkan kewenangan tersebut kepada BUMDes, kurang mampu memetakan peluang dari potensi yang dimiliki. Jika peneliti analisis, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa lain yang memiliki objek wisata bahkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjadikan wisata terusan.

d. Pengendalian

Dalam hal pengelolaan objek wisata Kampung Sawah, tentu saja pengendalian dilakukan baik oleh pihak internal pengelola maupun oleh Pemerintah Desa Setempat. Hanya saja yang biasa dilakukan saat ini adalah pengecekan terhadap pendapatan, pengeluaran dan target oleh manajer kampung sawah. Sementara laporan kegiatan dan jumlah pendapatan serta bagi hasil dengan pihak desa disampaikan pada laporan tahunan BUMDes.

Dengan modal saling percaya, Pemerintah Desa tidak begitu turut campur untuk mengorek urusan BUMDes dengan pihak manajemen Kampung Sawah. Bagi Pemerintah Desa Talagasari yang terpenting adanya objek wisata tersebut mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan objek wisata Kampung Sawah Oleh BUMDes Wibawa Mukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pengelolaan objek wisata Kampung Sawah, yaitu :

1. Terbatasnya kapasitas SDM yang mengelola objek wisata kampung sawah, terutama tenaga ahli yang terampil di bidang pariwisata.
2. Terbatasnya anggaran, karena pihak pengelola tidak membuka akses untuk masuknya investor. Hal ini mengakibatkan lambatnya penambahan fasilitas ataupun atraksi wisata baru yang diminati pengunjung.
3. Kurangnya partisipasi aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat dalam menggiatkan kreativitas dan inovasi. Hal ini mengakibatkan belum tergalinya potensi untuk mendukung pengembangan objek wisata Kampung Sawah.
4. Kurang intensifnya kegiatan promosi. Di mana kegiatan tersebut hanya gencar dilakukan pada tahap awal pembukaan objek wisata Kampung Sawah.

E. Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pihak pengelola sebaiknya mengupayakan peningkatan kemampuan SDM pelaksana melalui pembinaan, pelatihan maupun studi banding ke daerah lain yang sudah berhasil mengelola objek wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian di daerahnya.
2. Pihak pengelola sebaiknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media), sehingga

pengelolaan objek wisata Kampung Sawah berjalan dengan efektif dan efisien.

F. Daftar Pustaka

Buku- Buku

- Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Hasibuan, Malayu P. 2011. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi cetakan ke -9. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Mukarom dan Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia : Bandung.
- Moleong, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Pitana dan Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV ANDI OFFSET : Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Refika Aditama : Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Refika Aditama : Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Uha, Ismail Nawawi. 2014. *Manajemen Perubahan. Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis*. Ghalia Indonesia : Bogor.

Dokumen

- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Desa Talagasari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Wibawa Mukti.

Sumber Lain

- Anisa Nuraida. 2016. *Manajemen Strategi Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Cisolong Kabupaten Pandeglang*. Skripsi repository.fisip.untirta.ac.id.
- Rika Rostika. 2018. *Pengelolaan Objek Wisata Situ Hiang oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis*. Jurnal Dinamika Volume 05, Nomor 04, Desember 2018.

4.3 Identifikasi Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ciamis Berbasis *Community Based Tourism*

(Irfan Nursetiawan_ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis di setiap tahunnya berdampak pada tingkat pembangunan ekonomi dan sektoral lainnya pada perodesasi tertentu. Di era otonomi daerah tentunya Pemerintah Daerah harus dapat menggali potensi ekonomi lain untuk meningkatkan PAD.

Menurut Bungaran. A.S. (2010:108) menyatakan, dampak dari otonomi daerah diantaranya: (1) dampak sosio kultural; (2) pelayanan publik; (3) pembangunan ekonomi; serta (4) dampak bagi pertahanan, keamanan, dan integrasi nasional. Hal itu menunjukkan, otonomi daerah dapat memberikan dampak pada pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan saat ini, yakni dari retribusi industri pariwisata.

Fenomena yang muncul setelah sektor pariwisata menjadi fokus pembangunan lintas sektoral dalam peningkatan PAD, yakni adanya komunitas masyarakat yang dengan swadaya membuat objek wisata baru. Trend tersebut tentunya dapat menjadi hal yang positif dalam peningkatan sumber PAD dari retribusi pariwisata. Industri pariwisata dapat pula dilakukan melalui penguatan dan pengembangan desa wisata sebagai salah satu bagian dari kegiatan wisata. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat secara kontinyu, perlu dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) yang akan mengatur hal-hal penting seperti status, kedudukan, hak dan kewajiban, peran serta dan tanggung jawab masyarakat adat, perlindungan kearifan lokal dan kawasan resapan air, pengawasan dan sanksi-sanksi (Siswadi, S., Taruna, T., & Purnaweni, H., 2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan payung hukum agar program pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata dapat terealisasi. Begitu pula di Kabupaten Ciamis yang memiliki kearifan lokal dan adanya beberapa kelompok masyarakat adat, serta hal tersebut merupakan salah satu modal sosial dapat menjadi landasan untuk menjadikan beberapa desa bertransformasi menjadi desa wisata. Namun penelitian diperlukan guna menjadi landasan akademis dalam pembukaan, penguatan dan pembukaan desa wisata tersebut.

Menurut Hadiwijoyo (dalam Fitri. Y dan Ma'rif. S, 2017) menyatakan, bahwa Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat keseharian, memiliki arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, seperti atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dengan adanya desa wisata dapat menjadi strategi alternatif dalam peningkatan PAD.

Namun untuk berbagai potensi desa di Kabupaten Ciamis cukup banyak untuk dikembangkan menjadi desa wisata belum banyak yang teridentifikasi. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap hal tersebut.

Adapun yang menjadi urgensi penelitian ini harus dilaksanakan, yakni penelitian ini berorientasi pada strategi peningkatan PAD melalui konsep desa wisata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana potensi desa wisata di Kabupaten Ciamis?; (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung terbentuknya desa wisata di Kabupaten Ciamis?; (3) Apa saja strategi dalam mengatasi faktor penghambat terbentuknya desa wisata di Kabupaten Ciamis?.

Dengan demikian fokus penelitian ini diorientasikan pada potensi desa wisata yang berada di Kabupaten Ciamis dengan mengimplementasikan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Konsep CBT pada hakikatnya berkaitan dengan pola manajemen objek wisata yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Ciamis dengan konsep tersebut dapat menjadikan landasan dalam upaya peningkatan PAD dari sektor retribusi pariwisata dengan konsep yang berkelanjutan dan berkemajuan. Profesionalisme dalam pengelolaan objek wisata tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta para *stakeholder* yang mempunyai inisiatif dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi di sektor pariwisata.

B. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui:

1. Potensi desa wisata di Kabupaten Ciamis;
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung terbentuknya desa wisata di Kabupaten Ciamis; serta
3. Rekomendasi strategi dalam mengatasi faktor penghambat terbentuknya desa wisata di Kabupaten Ciamis. Hal ini tentunya akan berdampak pada perencanaan pembangunan kepariwisataan dan kebijakan sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yakni terdapat beberapa permasalahan yang muncul di era otonomi daerah di Kabupaten Ciamis paska penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012. Hal tersebut berdampak pada fluktuasi PAD dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ciamis. Inti permasalahan dalam penelitian ini digambarkan, sebagai berikut:



Gambar. 1 Inti Permasalahan

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan hal tersebut, konsentrasi dalam penelitian ini terfokus pada 3 (tiga) permasalahan, yakni: (1) fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis; (2) fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan; dan (3) adanya *Community Based Tourism* (CBT) yang belum teridentifikasi di Kabupaten Ciamis. Hal itu menjadi urgensi permasalahan yang diteliti secara kualitatif.

D. Hasil Analisa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menyatakan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung, desa dipersiapkan dan harus mampu menjadi desa yang mandiri.

Salah satu permasalahan yang ada di desa ditandai dengan adanya krisis perdesaan. Krisis perdesaan, yaitu krisis yang ditandai dengan penurunan kapasitas sistem sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya (Shohibuddin. M, 2016). Selain permasalahan tersebut, masyarakat desa menghadapi permasalahan ekologis yang ditandai dengan penurunan daya dukung alam sebagai akibat dari praktik-praktik konsumtif eksploitatif.

Menurut Finch (dalam Dilahur, 1994) menyatakan desa adalah suatu tempat yang terutama untuk tempat tinggal dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ndraha (dalam Harianto,

Asis. Dkk, 2011) menyatakan desa dianggap sebagai nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Pariwisata dapat berkembang di wilayah perdesaan dengan catatan, adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan. Menurut Inskeep, Edward (dalam Priyanto dan Dyah. S, 2015) Pariwisata dapat diartikan suatu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan untuk bepergian ke suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan persinggahan yang sifatnya sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa untuk bermaksud mencari nafkah, namun didasarkan untuk mendapatkan kesenangan, disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan pengalaman perjalanan berwisata dan pelayanan keramah-tamahan.

Menurut Gunn, Clare. A (2002) menyatakan, pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Keadaan lingkungan yang baik, maka industri pariwisata akan berkembang dengan baik pula (Soemarwoto. O, 2004:309). Suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya (Hadiwijoyo, 2012).

Desa wisata memiliki beberapa komponen produk wisata yang mendukung kegiatan yang ada di dalamnya, yang sering disebut sebagai 4A (Atraksi, Aktivitas, Aksesibilitas, dan Akomodasi) (Nuryanti, 1993). Adapun untuk memperkaya obyek dan daya tarik wisata di sebuah desa wisata, beberapa fasilitas dan kegiatan dapat dibangun mulai dari: (a) *Eco-lodge*; (b) *Eco-recreation*; (c) *Ecoeducation*; (d) *Eco-research*; (e) *Eco-energy*; (f) *Eco-development*; dan (g) *Eco-promotion* (Priyanto dan Dyah. S, 2015). Maka dalam pembangunan desa wisata dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, yakni dengan mengimplementasikan *Community Based Tourism* (CBT). Menurut Suansri (2003:14) CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan, sosial budaya kedalam satu kemasan. Dengan demikian desa wisata sebagai tempat untuk berekreasi yang mempunyai ciri khas tertentu dan dapat ditampilkan kepada para wisatawan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diidentifikasi potensi desa wisata berbasis CBT, sebagai berikut:

Tabel.1 Potensi Desa Wisata Berbasis *Community Based Toursim* di Kabupaten Ciamis

No.	Nama Desa	Kategori
1.	Desa Sukahurip	Wisata Edukasi
2.	Desa Karangpaningal	Wisata Budaya
3.	Desa Medanglayang	Wisata Alam
4.	Desa Karangampel	Wisata Budaya
5.	Desa Bangunharja	Wisata Alam
6.	Desa Sukamaju	Agrowisata

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Hasil identifikasi tersebut berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif dan analisis data primer, serta sekunder yang didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian, yakni desa dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) Besarnya peranan kelompok primer; (2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi; (3) Homogen; (4) Hubungan lebih bersifat intim dan awet; (5) Mobilitas sosial rendah; (6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; dan (7) populasi anak dalam proporsi yang lebih besar (*Roucek dan Warren*, dalam Indrizal 2013).

Dengan demikian, maka terdapat 6 (enam) desa yang berpotensi sebagai desa wisata dengan potensi, sebagai berikut:

1. Desa Sukahurip
Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis mempunyai potensi sebagai tempat rekreasi edukasi, karena terdapat sarana dan prasarana yang berkonsep *eco-village*. Kita dapat menemukan cara pengolahan sampah organik dan anorganik secara efektif melalui Kelompok *Eco-Village* Anadopah.
2. Desa Karangpaningal
Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang sebagian kelompok masyarakatnya termasuk ke dalam masyarakat adat. Terdapat sebuah perkampungan yang dinamai Kampung Adat Kuta yang mempunyai keunikan dari segi tradisi dan bentuk rumah yang masih bertahan dengan desain rumah tempo dulu.

3. Desa Medanglayang
Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis mempunyai potensi wisata alam dengan puncak Jamiaki yang dibentuk oleh kelompok masyarakat Desa Medanglayang.
4. Desa Karangampel
Desa Karangampel merupakan sebuah desa dengan potensi seni dan kebudayaan yang kental dengan adat istiadat masyarakat Sunda. Desa Karangampel terletak di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang mempunyai tradisi Mupunjung.
5. Desa Bangunharja
Desa Bangunharja sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Cisaga mempunyai potensi wisata alam. Salah satunya, yakni Curug Cicapar yang berada dikawasan hutan. Pengelolaan curug tersebut dikelola oleh Pokdarwis Desa Bangunharja.
6. Desa Sukamaju
Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis merupakan sebuah desa yang mempunyai potensi dalam bidang perkebunan kopi. Perkebunan kopi tersebut dikelola oleh kelompok tani.

E. Rekomendasi

Untuk pengembangan desa wisata, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; dan (3) Evaluasi. Adapun rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, sebagai berikut:

1. Menyiapkan perencanaan tahapan pembentukan dan pengembangan Desa Wisata secara menyeluruh.
2. Membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana pembentukan Desa Wisata.
3. Membuat kebijakan berkaitan dengan Desa Wisata yang mendukung pembentukan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis.

F. Daftar Pustaka

- Bungaran. A.S. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dilahur. 1994. Geografi Desa dan Pengertian Desa. Forum Geografi.14.(15).119-128.
- Fitari. Y dan Ma'rif. S. 2017. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal. Jurnal Wilayah dan Lingkungan.5.(1).29-44.
- Hariato, Asis. Dkk. 2011. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Banggai. (Online). Tersedia:

pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/07f508de53592473de5e935ee080bf4a.pdf.
[01 Agustus 2018].

- Indrizal. 2013. Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa di Indonesia. (Online). Tersedia: <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. [10 Agustus 2018].
- Nuryanti, W. 1993. Concept, Perspective, and Challenges. Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Priyanto dan Dyah.S. 2015. Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*.4.(1).76-84.
- Shohibuddin. M. 2016. Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis.*Jurnal Sosiologi Masyarakat*.21.(1).1-33.
- Siswadi, S., Taruna, T., & Purnaweni, H. 2011. Kearifan Lokal dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 63-68.
- Soemarwoto. O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

4.4 Analisis Potensi Agrowisata di Kabupaten CiamIS

(Asep Nurwanda_Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi isu sentral di era otonomi daerah dan menjadi salah satu hal yang harus segera diselesaikan. Begitu pula di wilayah perdesaan masalah kemiskinan masih menjadi masalah dan menghambat terwujudnya kesejahteraan. Penerapan otonomi daerah, juga berimbas pada Pemerintah Daerah harus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan bersama adanya otonomi daerah, yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang dapat menjadi tumpuan untuk peningkatan kesejahteraan yakni bidang pariwisata. Pariwisata yang dikembangkan harus melibatkan masyarakat. Menurut Damanik (dalam Purnamasari, A. M., 2011) menyatakan, bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktivitas ekonomi penting yang jika dikembangkan dengan tepat dapat mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian dan keselarasan masyarakat, dan manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata dapat menjadi alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

Pariwisata menjadi salah satu primadona bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatannya dari retribusi objek wisata. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat mulai mempromosikan daerahnya, dimana hal tersebut dimaksudkan agar Kabupaten Ciamis semakin terkenal bagi masyarakat atau penduduk daerah lain untuk berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Promosi-promosi yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan keragaman wisata dan budaya Kabupaten Ciamis, hal inilah ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan nusantara lokal) dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ciamis.

Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara mencapai 371.535 orang di periode tahun 2016, yang terdiri dari: 371.530 wisatawan nusantara dan 5 wisatawan mancanegara. Namun di tahun 2017 jumlah wisatawan cenderung menurun, yakni hanya mencapai 280.934 wisatawan dan itupun hanya wisatawan lokal. Sehingga terjadi penurunan 24,38% dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sektor pariwisata sebesar 59,99% (Dispar Kab. Ciamis, 2018). Permasalahan tersebut harus segera diatasi, karena dapat berdampak pada PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata di periode selanjutnya. Salah satu yang dapat dilakukan, yakni dengan mengembangkan objek wisata buatan dan tentunya hal tersebut akan membantu dalam meningkatkan PAD. Objek wisata buatan merupakan segala sesuatu yang berasal dari karya manusia dan dapat dijadikan objek wisata, seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi, serta tata cara manusia.

Dari hasil observasi pendahuluan, Kabupaten Ciamis memang telah mempunyai objek wisata buatan, yaitu Kolam Renang Tirta Winaya. Tetapi di sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah pendapatan retribusi dari objek wisata tersebut cenderung menurun, yakni dari pendapatan Rp.73.502.900,- di tahun 2016 menjadi Rp.62.570.000,-, artinya terjadi penurunan pendapatan sebesar 14,87% (Dinas Pariwisata Kab. Ciamis, 2018). Sehingga diperlukan penambahan objek wisata buatan di Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Munawar, Hilman. Dkk (2017) menyatakan, Kabupaten Ciamis mempunyai potensi padi sawah dengan luas lahan mencapai 15.841 Hektar dan produksi padi mencapai 80.430,52 ton di tahun 2014.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis potensi agrowisata di Kabupaten Ciamis ?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menganalisis potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis ?
- c. Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menganalisis potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis?

2. Hipotesa

Dengan melihat potensi Kabupaten Ciamis di sektor pertanian, maka hal tersebut dapat pula dikembangkan menjadi objek dan destinasi wisata baru. Salah satu yang dapat dilakukan, yakni dengan pengembangan Agrowisata di Kabupaten Ciamis. Tetapi belum ada penelitian mengenai analisis dan identifikasi mengenai potensi Agrowisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Sehingga hal ini menjadi urgensi untuk penelitian mengenai potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis.

Adapun yang menyatakan agrowisata sebagai aktivitas agribisnis dimana petani setempat menawarkan tur pada usaha taninya dan mengizinkan seseorang pengunjung menyaksikan pertumbuhan, pemanenan, pengolahan pangan lokal yang tidak akan ditemukan di daerah asalnya. Sering petani tersebut menyediakan kesempatan kepada pengunjung untuk tinggal sementara di rumahnya dan program pendidikan (Saga. A.G, Dkk, 2017).

Dengan demikian untuk produk dari agrowisata tidak akan jauh dari hasil pertanian maupun perkebunan. Menurut Riske, Ardiansari, Dkk. (2015) menyatakan potensi pertanian untuk agrowisata didukung oleh budidaya tanaman apel, jamur, sayur kentang dan sayur wortel, serta bunga krisan. Berdasarkan penilaian dari pengunjung diperoleh bahwa atraksi yang dapat dijadikan sebagai atraksi utama adalah atraksi jamur, sedangkan atraksi penunjang adalah atraksi apel, sayur, bunga. Dengan demikian agrowisata mempunyai dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa. Menurut Yoeti (2008:20) dampak dari akibat pengembangan pariwisata, yaitu meningkatkan kesempatan kerja (*employments*) dan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Sehingga keberadaan agrowisata dapat berdampak pada masyarakat agar lebih sejahtera.

3. Rancangan Penelitian

Roadmap Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari penelitian saat ini dan penelitian yang akan dilakukan, serta hal tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan sebelumnya, tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan potensi Agrowisata di Kabupaten Ciamis..

C. Permasalahan

Masalah yang di hadapi peneliti, sebagai berikut :

1. perencanaan;
2. studi literatur;
3. pengumpulan data;
4. analisis data;
5. menarik kesimpulan

D. Hasil Analisa

Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Ciamis terdapat potensi agrowisata yang meliputi wilayah Kelurahan Benteng, Desa Karanganyar, Desa Sukamulya, Desa Medanglayang, Desa Baregbeg, Desa Jelat, dan Desa Cibeureum. Adapun potensi agrowisata yang dapat dikembangkan meliputi: perkebunan durian jenis serendet, perkebunan kopi, perkebunan duku, perkebunan salak, dan palawija. Walaupun terdapat potensi yang cukup dapat dikembangkan, tetapi diperlukan perbaikan untuk aksesibilitas jalan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat mulai mempromosikan daerahnya, dimana hal tersebut dimaksudkan agar Kabupaten Ciamis semakin terkenal bagi masyarakat atau penduduk daerah lain untuk berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Promosi-promosi yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan keragaman wisata dan budaya Kabupaten Ciamis, hal inilah ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan nusantara (lokal) dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara mencapai 371.535 orang di periode tahun 2016, yang terdiri dari: 371.530 wisatawan nusantara dan 5 wisatawan mancanegara.

Namun di tahun 2017 jumlah wisatawan cenderung menurun, yakni hanya mencapai 280.934 wisatawan dan itupun hanya wisatawan lokal. Sehingga terjadi penurunan 24,38% dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sektor pariwisata sebesar 59,99% (Dispar Kab. Ciamis, 2018). Permasalahan tersebut harus segera diatasi, karena dapat berdampak pada PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata di periode selanjutnya. Salah satu yang dapat dilakukan, yakni dengan mengembangkan objek wisata buatan dan tentunya hal tersebut akan membantu dalam meningkatkan PAD. Objek wisata buatan merupakan segala sesuatu yang berasal dari karya manusia dan dapat dijadikan objek wisata, seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi, serta tata cara manusia.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis dengan fokus kajian di perdesaan. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan serta wawancara dengan sumber. Sedangkan data sekunder memiliki sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Metode dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, penyajian data, analisis dan interpretasi data. Adapun penelitian ini merupakan penelitian skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan TKT 6.

Kabupaten Ciamis mempunyai potensi untuk pengembangan agrowisata, hal tersebut terdapat di beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Kelurahan Benteng

Di wilayah ini perkebunan durian banyak dibudidayakan dan menjadi primadona bagi para penikmat buah durian di wilayah Kabupaten Ciamis. Jenis durian yang dikembangkan, yakni durian benteng atau Serendet. Ketebalan daging buahnya dan rasa manisnya yang membedakan dengan varietas durian unggul lainnya. Durian Serendet mempunyai ukuran yang kecil, kulit

buahnya lebih tipis, dan rasanya sedikit berbeda dengan durian lain yang mempunyai aroma sangat pekat.

2. Desa Karanganyar

Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Cijeungjing dan mempunyai potensi agrowisata dalam bidang perkebunan duku. Buah duku yang ada di desa tersebut mempunyai bentuk bulat telur dengan kulit berwarna kuning dan mempunyai rasa buah yang manis. Hal ini dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan buah duku dari wilayah lain.

3. Desa Sukamulya

Desa Sukamulya berada di wilayah Kecamatan Baregbeg dengan potensi unggulan perkebunan buah manggis. Manggis yang berasal desa ini terbilang cukup baik dengan daging buah yang lembut dan berbentuk bulat.

4. Desa Medanglayang

Desa ini berada di wilayah Kecamatan Panumbangan dengan potensi perkebunan salak. Salak yang berada di wilayah ini berukuran cukup besar dengan rasa manis dan sedikit asam.

5. Desa Baregbeg

Desa ini mempunyai potensi produksi padi kualitas unggul dan mempunyai pemandangan sawah yang sangat indah. Potensi ini dapat dikembangkan dengan baik dan tentunya akan memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan.

6. Desa Cibeureum

Desa ini memiliki potensi di perkebunan kopi. Dengan aroma dan cita rasa yang baik, kopi berasal dari desa ini mempunyai potensi untuk dijadikan kawasan agrowisata.

Berdasarkan uraian tersebut, maka potensi agrowisata di Kabupaten Ciamis dapat dikembangkan. Pariwisata diyakini membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Negara maju dan berkembang (Hidayati, F., 2018). Begitu pula dengan adanya kolaborasi antara kegiatan produksi pertanian dengan kegiatan pariwisata tentunya yang didapatkan oleh masyarakat, yakni peningkatan kesejahteraan, sebagaimana yang tergambar dalam siklus air di bawah ini.



Poto Lokasi AgroWisata

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Rekomendasi, yakni Kabupaten Ciamis mempunyai potensi di bidang agrowisata. Pengembangan agrowisata ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah untuk memajukan bidang pariwisata. Oleh karena itu pelibatan dinas terkait di Kabupaten Ciamis dengan masyarakat dalam pengembangan agrowisata harus di tingkatkan karena akan berdampak secara signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berawal dari sebuah pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat maka Agrowisata akan menjadi berkembang baik, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya pun ikut serta didalamnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- _____.(2018). Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2103-2017. Dinas Pariwisata KabupatenCiamis.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di DesaWisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*.3.(2).117- 226.
- Hidayati, F. (2018). Tourism and economic growth: The role of globalization. *Journal of Public Administration Studies*, 2(2),16-20.
- Munawar, Hilman. Dkk. (2017). Potensi Padi Sawah di Kabupaten Ciamis. *Jurnal AgroinfoGaluh*.3.(2).214-218.
- Norton. A dan Eri. S. (2018). Analisis Potensi Agrowisata di Sekitar LokasiDanau PLTA di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. (Online). Tersedia: <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1302> [11 Agustus2018].
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Ciamis

tahun2017-2027.

- Priyanto dan Dyah. S. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata Di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*.4.(1).76-84.
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1),49-64.
- Sugiarto. E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Riske, Ardiansari, Dkk. (2015). Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Tulungrejo Kota Batu Jawa Timur. *Jurnal Produksi Tanaman*.3.(5).383-390.
- Yoeti, Oka A. (2008). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung:Angkasa.
- Saga. A.G, Dkk. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Produk Agrowisata (Studi Pada Desa Wisata Gubug klakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.51.(2).141-150.

BAGIAN V
HASIL KAJIAN
MENGENAI PERTANIAN DAN PETERNAKAN

5.1 Efektivitas Zat Anti Bakteri Ekstrak Etanol Bunga Kecombrang (*Etlingera Elatior* (Jack) R. M. Smith) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium Acnes* Secara *In Vitro*

(Lia Yulisma¹, Adi Maladona² _Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Bahan pangan yang kini banyak diminati konsumen bukan saja yang mempunyai komposisi gizi yang baik serta penampakan dan cita rasanya menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh, seperti dapat menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol dan kadar gula darah, serta meningkatkan penyerapan kalsium (Winarti, 2005). Salah satu tanaman rempah dan obat yang memiliki potensi sebagai pangan fungsional sebagai antioksidan dan antibakteri adalah kecombrang (*Etlingera elatior*). Kecombrang termasuk dalam golongan *Zingiberaceae*, satu famili dengan tanaman laos. Ningtyas (2010) menjelaskan bahwa pemanfaatan bunga kecombrang adalah sebagai pemberi citarasa pada masakan, seperti urab, pecel, sambal dan masakan lain. Menurut Hasbah *et al.*, (2005) tanaman kecombrang dapat dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit yang tergolong berat yaitu kanker dan tumor.

Beberapa penelitian menunjukkan bunga dan daun kecombrang memiliki aktivitas anti bakteri terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Hoque (2011) melakukan penelitian tentang uji antioksidan dan antibakteri ekstrak air daun kecombrang (*Etlingera elatior*) sebagai pengawet alami terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Dari hasil penelitiannya ekstrak air daun kecombrang memiliki beberapa senyawa yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan kemampuan anti bakteri dari ekstrak tersebut, yaitu golongan fenolik, golongan alkohol, golongan monoterpen dan aromatik

Dalam rangka pengembangan obat tradisional yang memiliki aktivitas anti bakteri, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang uji aktivitas anti bakteri dari ekstrak etanol daun kecombrang (*Etlingera elation*) dengan menggunakan bakteri uji *Propionibacterium acnes* dengan menggunakan etano 195%. *P. acnes* merupakan bakteri penyebab jerawat dan berperan penting dalam menghasilkan inflamasi melalui kemampuannya dalam memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas (Zaenglein *et al.*, 2008). Bakteri tersebut menyerang sistem imunitas yang menyebabkan munculnya kulit kemerahan, bengkak kecil yang membentuk jerawat di kulit.

Propionibacterium acnes adalah bakteri gram positif dan anaerobik yang lambat pertumbuhannya dan dianggap sebagai salah satu pemicu jerawat pada manusia. Bakteri ini juga dapat memicu blefaritis dan endoftalmitis. Etanol dipertimbangkan sebagai pelarut karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, netral, absorpsinya baik, dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut 1). Bagaimanakah pengaruh ekstrak bunga kecombrang (*Etilingera elatior*) terhadap pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* secara *in-vitro*? 2). Berapakah konsentrasi minimal ekstrak bunga kecombrang (*Etilingera elatior*) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* secara *in-vitro*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pengolahan data analisis varian. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan enam perlakuan dan tiga pengulangan. Hasil pengukuran zona hambat dari empat lubang sumur pada masing-masing cawan petri dirata-ratakan menjadi satu data sehingga total data diperoleh 18 data. Parameter utama yang diamati adalah diameter zona hambat bakteri.

B. Tujuan

Tujuan kajian ini, adalah :

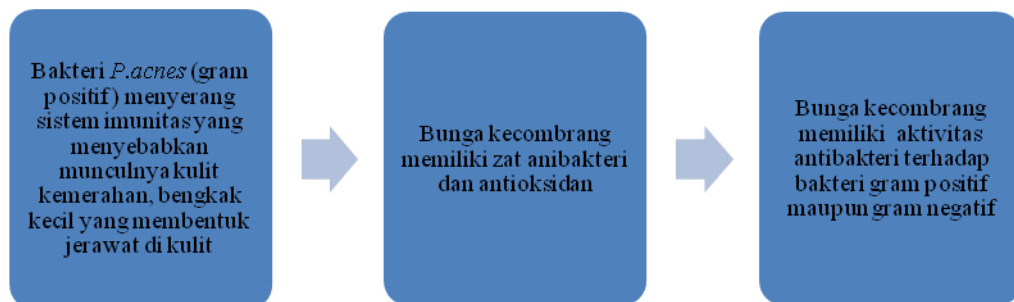
1. Menganalisis pengaruh ekstrak bunga kecombrang (*Etilingera elatior*) terhadap pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* secara *in-vitro*
2. Menentukan jumlah konsentrasi minimal ekstrak bunga kecombrang (*Etilingera elatior*) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* secara *in-vitro*.

C. Permasalahan

Tanaman rempah dan obat mempunyai potensi besar sebagai sumber makanan dan minuman fungsional seiring dengan makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Keberadaan pangan fungsional tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen, tetapi juga bagi pemerintah maupun industri pangan. Bagi konsumen, pangan fungsional bermanfaat untuk mencegah penyakit, meningkatkan imunitas, memperlambat proses penuaan, serta meningkatkan penampilan fisik. Bagi industri pangan, pangan fungsional akan memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk secara inovatif memformulasikan produk-produk yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya bagi pemerintah, adanya pangan fungsional akan menurunkan biaya untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat (Winarti, 2005).

Salah satu tanaman rempah dan obat yang memiliki potensi sebagai pangan fungsional sebagai antioksidan dan antibakteri adalah kecombrang (*Etlingera elatior*). Kecombrang (*Etlingera elatior*) adalah sejenis tumbuhan rempah-rempah. Kecombrang yang sering digunakan dalam makanan adalah bagian bunganya yang belum mekar, masih menguncup, serta bagian batangnya. Kecombrang memberikan aroma dan rasa yang khas pada masakan. Bukan hanya bunganya, batang, rimpang, dan daun tanaman kecombrang sangat tinggi antioksidan. Ini karena tanaman kecombrang mengandung senyawa *flavonoid*, salah satu senyawa antioksidan yang membantu menangkal kerusakan sel dalam tubuh (Nurhasnawati *at al*, 2017). Tingginya kandungan antioksidan ini membuat kecombrang dikenal sebagai tanaman antikanker sebab mampu memperlambat kerusakan yang terjadi akibat pertumbuhan sel kanker (Habsah *at al*, 2005). Dari hasil penelitian Hoque (2011) ekstrak air daun kecombrang memiliki beberapa senyawa yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengankemampuan antibakteri dari ekstrak tersebut, yaitu golongan fenolik, golongan alkohol, golongan monoterpen dan aromatik.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat di lihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Permasalahan Penelitian

D. Hasil Analisa

Hasil dari uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga kecombrang ini adalah terbentuknya diameter zona bening disekitar lubang yang merupakan zona hambat pertumbuhan bakteri. Zona bening yang terlihat disekeliling lubang membuktikan bahwa ekstrak etanol bunga kecombrang memiliki sifat antibakteri terhadap *Propionibacterium acnes*. Dari hasil tersebut dapat diukur diameter yang dibentuk. Hasil pengukuran diameter zona hambat dapat dilihat pada tabel 1. Dari data yang diperoleh maka ekstrak bunga kecombrang pada konsentrasi 5-80% tingkat penghambatan terhadap *Propionibacterium acnes* termasuk kategori kuat.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak Bunga Kecombrang terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium acnes*

Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Jumlah (mm)	Rata-Rata (mm)
	1	2	3		
5%	8,00	8,00	8,00	24,00	8,00
10%	8,00	8,00	8,00	24,00	8,00
20%	8,85	9,00	9,75	27,60	9,20
40%	11,90	11,15	10,20	33,25	11,08
60%	11,50	11,20	11,80	34,50	11,50
80%	13,85	13,30	11,75	38,90	12,96

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS IBM 20. Terlebih dahulu data dianalisis untuk mengetahui apakah berdistribusi normal. Pada uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan bahwa nilai D (*Absolute*) lebih besar dari 0,05 atau signifikansi lebih besar dari 0,05, ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan uji *One Way ANOVA*. Berdasarkan Uji *One Way ANOVA* menunjukkan bahwa uji tersebut memiliki signifikansi kurang dari 0,05 dengan keputusan yang berarti terdapat perbedaan bermakna dari hasil perlakuan pada daya hambat masing-masing konsentrasi ekstrak etanol bunga Kecombrang.

Adanya zona hambat yang terbentuk karena adanya senyawa antibakteri pada bunga kecombrang. Ekstrak etanol bunga kecombrang mengandung tanin, *flavonoid* dan saponin dan *alkaloid* (Chan *at al*, 2007). Bakteri mempunyai lapisan luar yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk mikroorganisme dan pelindung sel bakteri, yang mempunyai tekanan osmotik internal yang tinggi. Tekanan internal tersebut tiga hingga lima kali lebih besar pada bakteri gram positif dari pada gram negatif. Trauma pada dinding sel atau penghambatan pembentukannya, menimbulkan lisis pada sel (Maddullari *at al*, 2013).

Cara kerja zat aktif yang terdapat pada ekstrak bunga kecombrang bervariasi. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah dengan cara merusak membran sel bakteri dandiikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Tanin mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menginaktivasi adhesin mikroba, enzim, dan protein transpor pada membran sel Saponin bekerja sebagai anti mikroba dengan mengganggu stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan sel bakterilisis. (Chan *at al*, 2007)

Dari hasil penelitian diketahui nilai MIC ekstrak etanol bunga kecombrang terdapat pada konsentrasi 20%. penentuan konsentrasi minimal bertujuan untuk mengetahui konsentrasi minimum yang diperlukan untuk

menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri. Nilai MIC suatu bakteri dikatakan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suatu senyawa anti bakteri bila memiliki nilai MIC.

Nilai MIC akan berbeda-beda untuk setiap kombinasi antara bakteri dan anti bakteri yang digunakan. MIC dianggap efektif digunakan karena penggunaan zat anti bakteri dalam konsentrasi yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping atau efek fisiologis bagi tubuh.

E. Rekomendasi

Penelitian yang sudah dilakukan peneliti dapat disempurnakan lagi dengan berbagai variasi perlakuan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektifitas Ekstrak etanol bunga kecombrang dengan menggunakan variasi konsentrasi yang lebih luas untuk mengetahui konsentrasi optimum senyawa antibakteri ekstrak etanol bunga kecombrang sebagai senyawa antibakteri dengan pelarut terbaik. Selanjutnya penelitian lebih lanjut dapat dilakukan secara *in-vivo* penggunaan Ekstrak etanol bunga kecombrang dibidang kedokteran dan farmasi.

F. Daftar Pustaka

- Chan, E.W.C., Lim, Y.Y. & Omar, M. 2007. *Antioxidant and antibacterial activity of leaves of Etlingera species (Zingiberaceae) in Peninsular Malaysia*. Food Chemistry 104: pp.1586–1593
- Habsah, M., Lajis, N.H., Sukari, M.A., Yap, Y.H., Kikuzaki, H. Nakatani, N. & Ali, A.M.. 2005. *Antitumour-Promoting and Cytotoxic Constituentss of Etlingera Elatior*. Malaysian Journal of Medical Sciences, 12 (1). pp. 6-12.
- Hoque, M.M., S. Rattila, M.A. Shishir, M.L. Bari, Y. Inatsu, dan S. Kawamoto. 2011. *Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Betel Leaf (Piper betle L.) Against Some Food Borne Pathogens*. Bangladesh Journal of Microbiology. 28(2):58
- Maddulari, S., Rao, K.B., & Sitaram, B., 2013. *In Vitro Evaluation of Antibacterial Activity of Five Indigenous Plants Extract Against Five Bacterial Phatogen of Human*. Int J Pharm Sci, 5(4), 679-684.
- Ningtyas, Rina. 2010. *Uji Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Air Daun Kecombrang (Etlingera elatior(Jack) R.M. Smith)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurhasnawati, H,Sukarmi dan Handayani, F .2017. *Metode Ekstraksi Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstak Daun Kecombrang (Etlingera elatior)*. Journal Ilmiah Manuntung,3(1) :91-95.
- Winarti, C. & Nurdjanah, N. 2005. *Peluang tanaman rempah & obat sebagai sumber pangan fungsional*. Jurnal Litbang Pertanian 24(2) : 47 -55.
- Zaenglein A.L., E.M. Graber, D.M. Thiboutot, dan J.S. Strauss. 2008. *Acne Vulgaris and Acneiform Eruption*. New York: McGraw Hill. Hal: 690

5.2 Rancang Bangun Alat Penetas Telur dan Kandang Indukan Puyuh Kapasitas 50 Telur

(Heris Syamsuri¹, Irna Sari Maulani² _Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Memelihara puyuh dapat menjadi investasi sekaligus lahan bisnis yang cukup menggiurkan bagi masyarakat atau peternak. Puyuh merupakan ternak yang dapat dimanfaatkan telur serta dagingnya sebagai alternatif bahan konsumsi selain lauk dan sayur bagi manusia. Tingginya tingkat konsumsi terhadap telur dan daging puyuh harus disertai dengan ketersediaan bibit dan induk yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan indukan puyuh yang cukup dan cocok untuk dijadikan spesialis petelur. Pada umumnya satu induk hanya mampu menetas empat telur saja pada satu masa pengeraman, dan ini dirasa kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Masalah lain yang terjadi adalah sifat kanibalisme yang dimiliki sebgai jenis puyuh dan keterbatasan indukan yang dimiliki oleh peternak berdampak buruk pada produktivitas peternakan, juga keterbatasan biaya serta lahan bagi peternak di daerah pedesaan.

Pada kondisi sesungguhnya indukan puyuh merupakan pengatur atau pengendali temperatur dan kelembapan telur dalam proses penetasan dengan cara dierami namun jumlah telur yang dierami sangat terbatasnya. Sehingga untuk meningkatkan nilai produktivitas dalam penyediaan bibit puyuh baru (DOQ), diperlukan inkubator. Inkubator penetas telur merupakan sebuah alat yang mampu menetas telur. Mesin penetas ini dilengkapi peralatan atau komponen pendukung untuk mengatur keadaan lingkungannya agar serupa dengan kondisi pengeraman alami oleh induknya. Inkubator penetas telur dalam budidaya puyuh diperlukan untuk meningkatkan produktifitas penetasan. Untuk mencapai hal tersebut, peternak serta pihak yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang peternakan harus melakukan inovasi, terobosan atau perbaikan untuk mengembangkan alat tetas telur baik dari teknik penetasan, pengaturan kelembapan dan temperatur, kemudahan dalam pengoprasian sampai meningkatkan persentase penetasan.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Merancang inkubator otomatis dengan menggunakan *supply* energi listrik dengan tegangan 220 volt.
2. Menguji kinerja dari inkubator.

C. Permasalahan

Permasalahan yang ada saat ini adalah :

1. Mesin penetas telur konvensional yang ada di pasaran hanya memperhitungkan faktor temperatur, dan
2. Cara membalik posisi telur masih dengan cara manual, hal ini kurang efektif.

D. Hasil Analisa

Prinsip dasar dari inkubator atau mesin penetas telur, meliputi : 1) Temperatur inkubator, di atur pada 38°C. Komponen yang digunakan adalah *thermostat* dan temperatur, 2) Pemanas ruang inkubator, Elemen yang digunakan yaitu lampu pijar 220V 5 watt sebanyak 4 buah, 3) Kelembaban ruang inkubator dijaga antara 50-60%., Untuk menjaga kelembaban disediakan wadah yang berisi air dan diletakan di bawah rak telur, dan 4) Pada rak telur dipasang sistem penggeser yang berfungsi untuk membalikan telur, yang bertujuan agar telur memperoleh panas yang merata serta mencegah menempelnya janin pada cangkang telur.

1. Rangkaian sistem inkubator

Komponen penting yang harus terdapat pada inkubator, meliputi *hygrometer*, *Thermostat digital*, *Timer switch*, *motor*, lampu 12V DC 10 watt, *thermometer*, rak geser, baki air, *sensor thermometer* dan *sensor hygrometer*.

2. Perhitungan Kebutuhan Daya

Kebutuhan daya yang dibutuhkan inkubator dapat dihitung dengan cara :

- a Mencari nilai nilai kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari temperatur lingkungan ke temperatur yang diinginkan (Q_I) yaitu 38°C dengan menggunakan persamaan:
$$Q_I = m \times C_p \times \Delta T$$

Tabel. 1 Kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur menjadi 38°C

Q_{telur}	Q_{udara}	$Q_I = Q_{udara} + Q_{telur}$
625,482 joule	27.588 joule	28 213 joule

- b Menghitung nilai energi yang terbuang dari inkubator melalui dinding - dinding inkubator (Q_{loss}) menggunakan

$$Q_{loss} = \frac{\Delta T}{R}$$

Tabel. 2 Energi yang terbuang dari inkubator

Q_{loss} Sisi kanan dan kiri	Q_{loss} Sisi depan dan belakang	Q_{loss} Sisi Atas	Q_{loss} Sisi Bawah	Q_{loss} total
2,478 K/W	2,86 K/W	3,098 K/W	1,648 K/W	10,0876 K/W

3. Rangkaian Listrik Inkubator

Lampu dirangkai dengan skema campuran (seri dan paralel). Berdasarkan rangkaian lampu campuran, maka total kebutuhan energi adalah 0,825 kWh per hari (24 jam) ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel. 3 Kebutuhan energi inkubator

Beban	Waktu (sekon)	Daya (W)	Energi (joule)
Lampu	86.400	30	2.592.000
Motor	86.400	3	259.200
Timer	86.400	0,6	51.840
Thermostat	86.400	0,78	67.392
Total			2.970.432

Dari tabel tersebut, perhitungan kwh per hari inkubator adalah sebesar = 2.970.432 joule atau 0,82512 kwh

4. Alat dan Bahan

Alat, bahan, dan komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Bahan dan Komponen yang diperlukan

Bahan			Komponen		
No	Bahan	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1	Multiplek 9mm	1 Lembar	1	Motor 5 rpm 12V	1 buah
2	Kayu Reng 2×3 cm 4m	2 Batang	2	Thermostat Digital 12V	1 buah
3	Kabel	5 m	3	Timer Switch 12V	1 buah
4	Akrilik 3mm	1 pcs	4	Hygrometer Digital	1 buah
5	Engsel Piano	1 pcs	5	Trafo 12V 10 A	1 buah
6	Lem Kayu	1 pcs	6	Baki Plastik	1 buah
7	Ram Kawat	1 pcs	7	Termometer	1 buah
8	Mur Kayu 4 mm dan 8 mm	@ 1 box	8	Lampu 10W DC 12V	6 buah
9	Pipa Alumunium 8 mm	10 Batang			

5. Perakitan Inkubator Penetas Telur

Pembuatan inkubator alat penetas telur ini bekerja secara otomatis dalam mengendalikan temperatur sesuai dengan temperatur penetasan yaitu

38°C dan membolak-balikan telur dengan rentang waktu 3 jam sekali. Ukuran *box* tetas adalah 45 cm x 39 cm x 27 cm dan terbuat dari *plywood* 9mm. Inkubator hasil rancangan ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Inkubator hasil perancangan

6. *Prosedur Pengujian*

Prosedur Pengujian dalam menggunakan inkubator ini yaitu:

- a. Langkah awal adalah menyalakan inkubator kemudian mengatur *thermostat* pada temperatur 38°C dan untuk menjaga kelembapan inkubator, letakan baki yang berisi air di bawah rak telur.
- b. Tunggu hingga temperatur ruang inkubator sampai pada temperatur yang diinginkan, setelah tercapai temperaturnya masukan telur sebanyak 64 butir dan atur posisinya sehingga berbaris pada rak yang tersedia.
- c. Tekan tombol demo untuk memperhatikan pergerakan rak geser dan memastikan bahwa mekanisme pergerakan telur berjalan normal.
- d. Setelah prosedur ketiga dilakukan, biarkan inkubator selama 3 hari (tidak dilakukan pemutaran telur) agar telur tidak terguncang.
- e. Pada hari ke 3 masa inkubasi, mengaktifkan *timer switch* dan atur pada rentang waktu 3 jam sekali selama 60 detik.
- f. Setelah telur mengalami masa inkubasi selama 16 hari matikan *timer switch* serta lepaskan rak geser dan biarkan telur sampai menetas.

7. *Data Pengujian*

Pengujian dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a Temperatur thermostat di atur pada temperatur 38°C.
- b Kelembapan diatur pada 50-60%, dengan cara menyimpan baki berisi air di bawah rak telur.
- c Pembalikan telur diatur (pada *timer switch*) dengan rentang waktu 3 jam dan motor bergerak selama 10 menit.
- d Jumlah telur yang diinkubasi sebanyak 50 butir.
- e Pencatat data dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari yaitu pada pukul 06.00, 12.00, 18.00 dan 24.00 menggunakan arduino.
- f Waktu inkubasi dilakukan selama 18 Hari.
- g Pengujian dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020- 8 Juni 2020.

Kondisi didalam inkubator pada proses pengujian ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Keadaan didalam inkubator pada saat pengujian

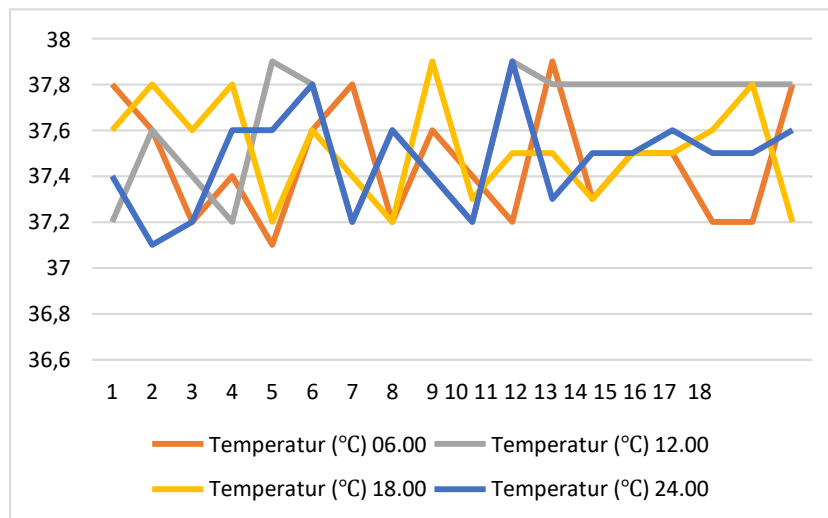
Telur diposisikan secara tertidur pada rak yang telah dibuat, pada bagian bawah telur menggunakan alas yang terbuat dari *foam* bertujuan untuk mengurangi dampak guncangan akibat dari gerakan rak geser.

Tabel 5 Data pengujian inkubator

Hari	Temperatur (°C)				Kelembaban (%)			
	06.00	12.00	18.00	24.00	06.00	12.00	18.00	24.00
1	37,8	37,2	37,6	37,4	58	55	60	58
2	37,6	37,6	37,8	37,1	59	59	60	59
3	37,2	37,4	37,6	37,2	57	58	57	57
4	37,4	37,2	37,8	37,6	56	58	60	58
5	37,1	37,9	37,2	37,6	58	58	58	59
6	37,6	37,8	37,6	37,8	60	60	59	57
7	37,8	37,2	37,4	37,2	59	62	57	56
8	37,2	37,6	37,2	37,6	60	58	56	58
9	37,6	37,4	37,9	37,4	57	59	58	60
10	37,4	37,2	37,3	37,2	60	57	60	59
11	37,2	37,9	37,5	37,9	59	56	59	60
12	37,9	37,8	37,5	37,3	58	58	60	57
13	37,3	37,8	37,3	37,5	60	60	57	58
14	37,5	37,8	37,5	37,5	60	59	60	60
15	37,5	37,8	37,5	37,6	59	60	58	59
16	37,2	37,8	37,6	37,5	60	57	60	60
17	37,2	37,8	37,8	37,5	59	60	66	57
18	37,8	37,8	37,2	37,6	60	58	65	60

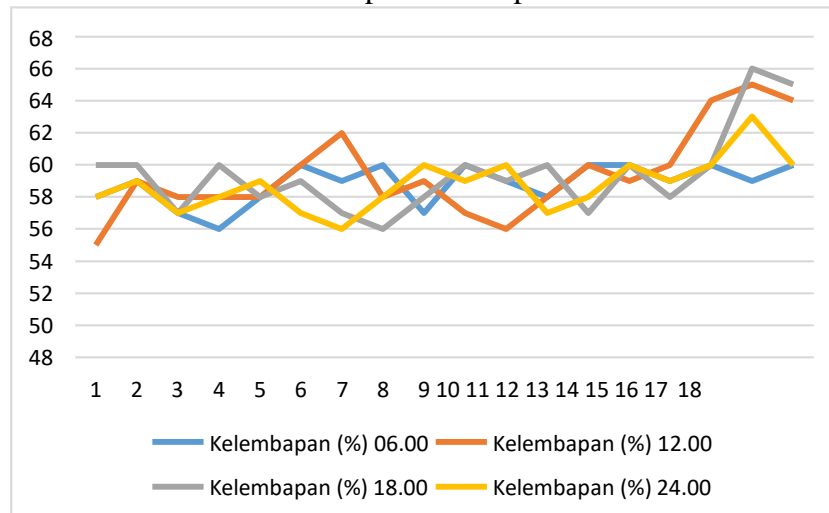
Pencatatan data temperature dan kelembapan dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari yaitu pada pukul 06.00 pagi, 12.00 siang, 18.00 sore dan 24.00 malam Pengujian dilakukan selama 18 hari. Grafik nilai temperatur terhadap waktu selama pengujian ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3 Grafik temperatur terhadap waktu



Temperatur rata-rata selama masa inkubasi adalah 37,55 °C. Temperatur terendah saat masa inkubasi adalah 36,8°C dan temperatur tertinggi adalah 37,9°C. Grafik nilai kelembapan terhadap waktu selama pengujian ditunjukkan pada gambar berikut “

Gambar 4. Grafik kelembapan terhadap waktu



Kelembaban rata-rata selama masa inkubasi adalah 59,125%. Kelembaban pada 3 hari terakhir dinaikkan, dengan cara menambahkan lebih banyak air pada baki, tujuannya agar anakan puyuh lebih mudah membuka kerambang telurnya.

E. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa inkubator yang dirancang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan perancang yaitu selama masa inkubasi temperatur rata-rata inkubator adalah 37,55°C dan kelembaban rata-rata adalah 59,125%. Sekaitan dengan hal tersebut, peneliti merekomendasikan inkubator hasil rancangan dapat digunakan dalam proses penetasan puyuh, untuk mengoptimalkan fungsi dari inkubator, peneliti menyarankan dilakukan penelitian lanjutan tentang :

1. Bahan/material inkubator, untuk menekan besarnya energi yang terbuang.
2. Memanfaatkan energi terbuang, hal ini dikarenakan energi yang terbuang masih cukup besar, yaitu 10,0876 K/W.
3. Sumber energi inkubator seperti menggunakan sumber energi alternatif seperti energi matahari, biogas, atau mikro hidro, yang bertujuan untuk membandingkan biaya operasional inkubator terhadap konsumsi energi listrik.

F. Daftar Pustaka

- Darmasyah, H., *Perancangan Prototype Mesin Tetes Telur Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno R3*. 2017: p. 96.
- AR, T.I., N. HARIYANTO, and W. WALUYO, *Perancangan Dan Realisasi Alat Penetas Telur Dengan Catu Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Arduino Uno R3*. REKA ELKOMIKA, 2015. 3(1).
- Wikipedia, K., *Mesin penetas telur*. 2016.
- Cara Kerja Mesin Penetas Telur Manual, Semi Otomatis & Full Otomatis*. 2018 [cited 2018 14 November 2018]; Available from: <https://tetasan.com/cara-kerja-mesin-penetas-telur/>.
- Kresnoadi. *Macam-macam Perpindahan Kalor : Konduksi, Konveksi, dan Radiasi*. 2017 21 Desember 2017 [cited 2019 10 Juni]; Available from: <https://blog.ruangguru.com/perpindahan-kalor>.
- Setiadi, F. *Dasar Termodinamika*. 2012 30 Juli 2012 [cited 2019 10 Juni]; Available from: <http://faridsetiadi.blogspot.com/2012/07/sharing-ilmu-kuliah-dasar-termodinamika.html>.
- Incropera, F.P., et al., *Fundamentals of heat and mass transfer*. 2007: Wiley.

5.3 Penentuan Saluran Distribusi Telur Ayam Dengan Menggunakan Metode *ROI (Return On Investment)* Pada IKM Barokah Jaya di Kecamatan Kawali

(Nugraha Kusumah Ningrat_Universitas galuh)

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini sangat berdampak signifikan bagi dunia bisnis dan pemasaran. Salah satu dampaknya berkenaan dengan semakin kuatnya intensitas persaingan dan semakin luas ruang lingkup kompetisi. Maka dari itu perlu melakukan pemasaran di luar daerah sekitar produksi. Pemasaran diluar daerah produksi merupakan tahap awal untuk membuka peluang-peluang pasar di daerah baru. Sebenarnya pemasaran ini seperti halnya pemasaran di sekitar daerah produksi tetapi hanya memperluas pasar potensial perusahaan. Pemasaran di luar daerah produksi di tuntut untuk menghasilkan lebih banyak peluang pasar dan memperbanyak produksi produk untuk memasok daerah baru tersebut.

Perkembangan usaha petelur ayam ras kian pesat dan semakin banyak persaingan dalam pemasaran produknya. Peningkatan ini karena usaha petelur ayam ras sangat menjanjikan dan menguntungkan selain itu, telur memiliki protein yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan pesaing sejenis. Strategi pemasaran di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain produk, promosi, harga dan saluran distribusi. Untuk memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen ada salah satu hal yang tidak bisa diabaikan perusahaan, yaitu saluran distribusi yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan sehingga perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran. Manajemen harus menentukan metode saluran apa yang sebaiknya digunakan untuk menyalurkan produknya ke pasar. Adapun definisi saluran distribusi adalah “Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri” (Basu Swastha DH, 1996; 190).

Produsen sering menggunakan perantara sebagai penyalurnya, perantara ini merupakan suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri. Mereka memberikan pelayanan dalam hubungannya dengan pembelian dan penjualan barang dari produsen ke konsumen. Pada umumnya, alasan utama untuk menggunakan perantara adalah bahwa mereka ini

dapat membantu meningkatkan efisiensi saluran distribusi. Adapun definisi efisiensi saluran distribusi adalah “Penggunaan perantara yang tepat sebagai penyalur dalam menyalurkan barang langsung dari produsen kepada pembeli sehingga menimbulkan penjualan yang lebih banyak” (Basu Swastha DH, 1996; 190).

Dalam menyampaikan produk dari produsen ke konsumen perusahaan harus menentukan metode dan saluran distribusi yang akan digunakan baik melalui distribusi langsung maupun distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran produk ke konsumen akhir dengan tidak menggunakan perantara, sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran produk ke konsumen akhir dengan menggunakan perantara. Saluran distribusi berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan, karena banyak sedikitnya produk yang sampai ke tangan konsumen ditentukan oleh perantara yang merupakan penghubung dari produsen ke konsumen. Dengan pemilihan saluran distribusi yang benar produk kita akan sampai pada konsumen secara cepat dan dapat bersaing dengan produk lainnya yang ada di pasar.

Masalah yang dihadapi oleh IKM Barokah Jaya adalah belum dapat menemukan sistem penjualan lewat saluran distribusi mana yang dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar kepada perusahaan. Dalam memasarkan produk yang dihasilkan, perusahaan menggunakan strategi distribusi langsung dan tak langsung.

Bertolak dari kenyataan yang dihadapi IKM Barokah Jaya selama ini, maka yang merupakan permasalahan yang belum dipecahkan adalah menyangkut kebijaksanaan penentuan saluran distribusi yang sesuai dengan IKM Barokah Jaya, sehingga mendorong penulis untuk meneliti dan mengangkat dalam suatu penulisan dengan judul : “Penentuan Saluran Distribusi Telur Ayam Dengan Menggunakan Metode *ROI* Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada IKM Ayam Petelur Barokah Jaya di Kecamatan Kawali.”

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana saluran distribusi produk telur ayam di IKM Barokah Jaya Kecamatan Kawali dan Bagaimana penentuan saluran distribusi telur ayam di IKM Barokah Jaya Kecamatan Kawali dengan Metode *Return on Investment*.

Penelitian ini dilakukan pada IKM Ayam Petelur Barokah Jaya Kawali dimana data yang dikumpulkan adalah dari berbagai aspek

yang berpengaruh terhadap distribusi telur hingga dapat sampai ke konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode analisis maksimum profit, yaitu keseluruhan penjualan pada setiap saluran distribusi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan pada setiap saluran pemasaran yang digunakan dan dalam menentukan saluran distribusi mana yang maksimal bagi perusahaan, untuk menyalurkan telur ayam demi menjamin kontinuitas usahanya maka digunakan metode analisis *ROI (Return On Investment)* dengan obyek penelitian hanya pada satu perusahaan. Perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah IKM Ayam Petelur Barokah Jaya di Kecamatan Kawali.

Return On investment atau *return on asset* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

B. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana saluran distribusi telur ayam di IKM Barokah Jaya Kecamatan Kawali dan Mengetahui bagaimana penentuan saluran distribusi telur ayam di IKM Barokah Jaya Kecamatan Kawali dengan Metode *Return on Investment*.

C. Permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh IKM Barokah Jaya adalah belum dapat menemukan sistem penjualan lewat saluran distribusi mana yang dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar kepada perusahaan. Dalam memasarkan produk yang dihasilkan, perusahaan menggunakan strategi distribusi langsung dan tak langsung.

D. Hasil Analisa

Analisis Maksimum Profit.

a. Saluran distribusi langsung

$$Z = R - C$$

Dimana ;

Z = Jumlah Keuntungan

R = Hasil Penjualan

C = Biaya yang digunakan

Besarnya pendapatan adalah:

$$R = P \times C$$

Dimana ;

R = Hasil Penjualan

P = Harga / kg

C = Jumlah hasil telur

$$R = 16.000 \times 985 \text{ kg}$$

$$R = \text{Rp. } 15.760.000,-$$

Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan (c) yaitu:

$$c = Cq + F + M$$

dimana ;

Cq = Biaya Variabel Non Marketing

F = Biaya Tetap Non Marketing

M = Biaya Pemasaran

Maka,

$$C = \text{Rp } 6.000.000,- + \text{Rp.}4.800.000, + \text{Rp.}1.500.000,-$$

$$c = \text{Rp. } 12.300.000,-$$

Sehingga nilai maksimum profit adalah:

$$Z = \text{Rp.}15.760.000,- - \text{Rp. } 12.300.000,-$$

$$Z = \text{Rp. } 3.460.000,-$$

b. Saluran distribusi tidak langsung

$$Z = R - C$$

Z = Jumlah Keuntungan

R = Hasil Penjualan

C = Biaya yang digunakan

Besarnya pendapatan adalah:

$$R = P \times C$$

Dimana ;

R = Hasil Penjualan

P = Harga / kg

C = Jumlah hasil telur

Besarnya pendapatan adalah :

$$R = P \times C$$

$$R = \text{Rp } 15.000,- \times 985$$

$$R = \text{Rp. } 14.775.000,-$$

Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan (C) yaitu:

$$c = Cq + F + M$$

dimana ;

Cq = Biaya Variabel Non Marketing

F = Biaya Tetap Non Marketing

M = Biaya Pemasaran

C = Rp 6.000.000,- + Rp.4.800.000, + Rp.1.000.000,-

C = Rp. 11.300.000,-

Sehingga nilai maksimum profit adalah:

Z = Rp. 14.775.000 - Rp. 11.300,000,-

Z = Rp. 3.475.000,-

Melihat hasil kedua perhitungan dari kedua sistem tersebut, maka jelaslah bahwa biaya pada saluran distribusi tidak langsung lebih besar, hal ini disebabkan karena perusahaan mengeluarkan biaya transportasi yang sedikit untuk mendistribusikan produknya kepada para pengecer. Selanjutnya dari hasil perhitungan maksimum profit tersebut ternyata nilai maksimum profit yang dihasilkan melalui distribusi langsung ke konsumen lebih besar dibandingkan dengan sistem penyaluran melalui pengecer. Dengan demikian sistem penyaluran yang dianggap maksimal bagi perusahaan Perusahaan Barokah Jaya dalam menyalurkan produknya ke konsumen adalah sistem saluran distribusi tidak langsung atau distribusi satu tingkat.

2. Analisis *Return On Investment (ROI)* .

Dalam menentukan saluran distribusi mana yang maksimal bagi perusahaan, untuk menyalurkan produk telur demi menjamin kontinuitas usahanya, maka digunakan analisis *Return On Investment (ROI)* dengan formula sebagai berikut :

$$ROI = \frac{Si - Ci}{Ci}$$

di mana:

ROI = Analisis *Return On Investment* yang dihasilkan oleh saluran i

Si = Penjualan yang dihasilkan oleh saluran i

Ci = Biaya penggunaan saluran i

Untuk menghitung besarnya nilai R pada saluran distribusi langsung, tanpa menggunakan perantara, atau saluran distribusi kepada konsumen akhir, maka diperlukan juga data dari perhitungan keuntungan yang diperoleh melalui saluran ini, dimana diketahui sebagai berikut :

$$R = \frac{15.760.000 - 12.300.000}{12.300.000}$$

$$R = \frac{3.460.000}{12.300.000}$$

$$R = 0,2813 = 28,13 \%$$

Jadi berdasarkan perhitungan di atas maka besarnya nilai R pada saluran distribusi langsung atau saluran distribusi kepada konsumen akhir adalah sebesar **0,2813** atau **28,13%**. Sedangkan untuk menghitung besarnya nilai R pada saluran distribusi tidak langsung, diperlukan juga data dari perhitungan keuntungan yang diperoleh melalui saluran ini, dimana diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ROI} &= \frac{Si - Ci}{Ci} \\ R &= \frac{\text{Rp } 14.775.000 - 11.300.000}{11.300.000} \\ R &= \frac{3.475.000}{11.300.000} \\ &= \mathbf{0,30752 \text{ atau } 30,75\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka besarnya nilai R pada saluran distribusi tidak langsung atau distribusi kepada pengecer/perantara adalah sebesar **0,30752** atau **30,75%**. Dari kedua hasil perhitungan di atas maka nampak bahwa saluran distribusi yang menghasilkan nilai R yang lebih tinggi adalah saluran distribusi dengan menggunakan perantara (pengecer) yaitu sebesar **0,3752** atau **30,75%**. Dengan demikian maka saluran yang dianggap maksimal bagi perusahaan dalam memasarkan produk telur kepada pemakai/konsumen akhir adalah dengan menggunakan saluran distribusi tidak langsung atau distribusi satu tingkat.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka saluran distribusi yang maksimal digunakan oleh Perusahaan Barokah Jaya untuk menyalurkan produknya kepada konsumen akhir yaitu saluran distribusi tidak langsung, dimana tingkat penjualan melalui perhitungan maksimum profit dan *ROI* meningkat. Mengingat kualitas produk yang dihasilkan mempunyai mutu dan daya tahan produk yang lebih baik, bila dibandingkan dengan produk yang dipasok dari daerah pulau Jawa, serta produk yang dihasilkan juga murah dan dapat dijangkau.

E. Rekomendasi

Rekomendasi penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan perusahaan, adalah sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan distribusi, perusahaan diharapkan mampu memenuhi permintaan penjualan kepada pengecer, tanpa mengabaikan permintaan dari konsumen akhir, agar dapat menjamin kontinuitas usaha.

2. Perusahaan hendaknya terus meningkatkan promosi, agar dapat memperluas daerah pemasaran, dengan demikian tingkatan saluran distribusi juga akan naik, sehingga dapat meningkatkan maksimum profit dan *Return On Investment* lebih diperbesar.
3. Perusahaan diharapkan mampu untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pihak pengecer sehingga tetap dalam menetapkan harga jual.

F. Daftar Pustaka

- Kodrat, David Sukardi. 2009. Manajemen Distribusi: Old Distribution Channel and Postmo Distribution Channel Approach Berbasis Teori dan Praktik. Edisi Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Alih Bahasa Adi Zakaria Afiff, Edisi ke7, Volume 11, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Oentoro, Deliyanti. 2012. Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rangkuti Freddy, 2008. Strategi Promosi yang Kreatif. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Stanton I William, 1997. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Swastha, Basu. 2004. Azas-azaz Marketing. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty.
- Swastha, Basu dan Irawan, 2002. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : Liberty.

BAGIAN VI
HASIL KAJIAN
MENGENAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

6.1 Pelestarian dan Pemanfaatan Tradisi Hajat Bumi Untuk Meningkatkan Kreativitas Usaha Masyarakat Miskin Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis
 (Yadi Kusmayadi_ Unviersitas Galuh)

A. Latar Belakang

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak tinggalan sejarah dan kebudayaan. Tinggalan sejarah yang ada di Kabupaten Ciamis terdiri dari tinggalan masa pra sejarah, masa Hindu Budha, dan masa Islam. Sedangkan aspek kebudayaannya terdiri dari berbagai macam aspek, seperti kesenian dan tradisi. Beberapa kesenian yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya adalah Bebegig Sukamantri, Wayang Landung, Karinding, dan sebagainya. Tradisi di Ciamis yang masih dilestarikan pun banyak, seperti Tradisi Nyangku, Tradisi Merlawu Gunung Susuru, Tradisi Merlawu Wanasigra, Tradisi Nyuguh, Tradisi Ngikis, Tradisi Misalin, Tradisi Hajat Bumi dan lain-lain.

Kebudayaan merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia menurut Soemardjan dn Soelaeman Soemardi (Soekanto, 1982:151). Kebudayaan yang yang berada disuatu daerah tertentu dan membedakan dengan daerah lain adalah disebut budaya lokal. Kebudayaan menurut E.B Taylor adalah kompleks keseluruhan yang mengandung didalamnya ilmu pengetahuan kepercayaan kesenian moral kebiasaan dan kepandaian lain yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Zeniar Rida, 1986: 13). Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Ciamis adalah kecamatan Panawangan yang kaya akan tradisi dan budaya yang salah satunya Tradisi Hajat Bumi yang terletak di Desa Jagabaya.

Tradisi Hajat Bumi merupakan tradisi yang mencerminkan rasa syukur kita terhadap yang maha kuasa atas segala hikmahnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus mensyukuri segala nikmat yang di berikan dan mengucapkan terimakasih terhadap yang Maha Kuasa, selain itu sebagai bakti kita terhadap perjuangan dan pengorbanan para nenek moyang Desa Jagabaya ditandai dengan mendatangi makam leluhur dengan segala sesajen yang disediakan. Tradisi Hajat Bumi rutin dilakukan masyarakat setiap tahun, dan

dilakukan setiap bulan Muharam tepatnya pada tanggal 1 Muharam. Sampai sekarang pun tradisi sakral ini masih selalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jagabaya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan?
- b. Bagaimanakah makna Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan?
- c. Bagaimanakah pemanfaatan Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan untuk meningkatkan usaha kreativitas masyarakat miskin?

2. Metode Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi (Arief Furchan, 2011: 447). Berdasar dari tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian dasar (*basic research*). Menurut Gay dalam Sugiyono, penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan langsung yang bersifat praktis (Sugiyono, 2013:4). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu: *pertama*, tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan mengenai Tradisi Hajat Bumi. Yang *kedua*, tahap reduksi/fokus yaitu peneliti mereduksi segala informasi yang ditemukan pada tahap I untuk memfokuskan pada masalah. Pada tahap ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan menjadi berbagai

kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Selanjutnya, tahap ketiga adalah seleksi dengan menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh kemudian mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi hipotesis (Sugiyono, 2013: 19-20).

B. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan;
2. Untuk mengetahui makna Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan;
3. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Tradisi Hajat Bumi untuk meningkatkan usaha kreativitas masyarakat miskin di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan.

C. Permasalahan

Permasalahan utama dalam kajian ini, adalah belum optimalnya dampak dari pemanfaatan tradisi budaya masyarakat “Hajat Bumi” dalam menunjang peningkatan usaha kreativitas masyarakat miskin di Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis

D. Hasil Analisa

Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya merupakan tradisi budaya yang harus tetap dilestarikan karena didalamnya terkandung berbagai makna yang sangat baik diantaranya :

- a. Sejarah dan kebudayaan lokal, masuk dan berkembangnya agama islam di Kecamatan Panawangan;
- b. Ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengenang para leluhur pendiri Desa Jagabaya;
- c. Sarana mempererat tali silaturahmi antar warga dan menjalankan amanah leluhur masyarakat Desa Jagabaya;
- d. Sebagai entitas budaya lokal Desa Jagabaya dan hiburan rakyat;
- e. Media pasar rakyat dengan diperdagangkannya hasil-hasil produk maupun barang yang bernilai ekonomi yang memacu pemberdayaan masyarakat pada saat Tradisi berlangsung dengan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

E. Rekomendasi

Adapun saran-saran yang hendak penulis sampaikan diantaranya :

- 1) Bagi Masyarakat Desa Jagabaya tetaplah menjaga amanat para

leluhur Jagabaya, tetap melaksanakan Tradisi Hajat Bumi setiap tahunnya, tetap menjaga kesenian yang menjadi ciri khas Desa Jagabaya.

- 2) Bagi para peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat lebih khusus dalam mengungkapkan permasalahan yang berhubungan dengan Tradisi Hajat Bumi di Desa Jagabaya.
- 3) Kepada panitia penyelenggara agar jauh-jauh hari mempersiapkan dengan matang sebelum acara pelaksanaan dilakukan dan meminta agar seluruh masyarakat meliburkan semua aktivitas sehari-harinya demi terfokusnya acara Tradisi Hajat Bumi.
- 4) Bagi Aparat Pemerintah Desa Jagabaya dan Kabupaten Ciamis diharapkan bias membuat Penulisan buku sejarah berdirinya Desa Jagabaya dan termasuk Tradisi Hajat Bumi. Melalui penulisan buku, masyarakat akan mengenal sejarah pembangunan dan berdirinya Desa Jagabaya serta makna yang terkandung dalam Tradisi Hajat Bumi Desa Jagabaya dengan lebih komprehensif. Penulisan buku tersebut tentunya melibatkan kalangan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan peminat/pemerhati sejarah maupun para akademisi kampus dengan disiplin ilmu sejarah dan budaya.

F. Daftar Pustaka

- Furchan, Arief. 2011. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herimanto dkk.2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, M. Nur Husein Daulay, Neila Susanti, dan Syafruddin Syam. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rida, Zeniar. *Sejarah Kebudayaan*. Jakarta: Karunika Jakarta, 1986.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

6.2 Identifikasi Potensi Pemanfaatan Aset Desa Melalui Model *Build Operate Transfer* Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis

(Evi Noviwati¹, Yuliana Surya Galih² _ Universitas Galuh)

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa yang antara lain terdiri atas hasil usaha dan hasil aset. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa dan aset lainnya milik desa. Tanah kas desa dapat berupa tanah bengkok, jalan, pesawahan, kebun, tanah kuburan desa, dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki desa.

Upaya pemanfaatan aset desa, mengacu kepada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menetapkan bahwa bentuk pemanfaatan aset desa, antara lain : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa adalah melalui BOT (*Build Operate Transfer*) atau Bangun Guna Serah, yaitu pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu kepada Pemerintahan Desa.

Pengembangan model BOT merupakan pilihan populer untuk pengembangan infrastruktur dan dapat diadopsi oleh pemerintahan desa yang dapat bekerjasama dengan pihak swasta pada saat ini. Selain tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kerugian pemerintah desa juga dapat meminimalisir anggaran pembangunan desa, meningkatkan aset desa dan berkontribusi terhadap kas desa setiap tahunnya. Identifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui model BOT perlu digali untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan

pendapatan desa sehingga tujuan pembangunan desa yang sejahtera dapat terwujud.

Uraian di atas menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan aset desa melalui bangun guna serah (*Build Operate Transfer/BOT*) memberikan banyak manfaat untuk peningkatan pendapatan desa. Akan tetapi bentuk pemanfaatan aset desa jenis ini belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya aset desa yang belum dapat dimanfaatkan atau bentuk pemanfaatannya masih menggunakan sewa menyewa atau hak guna pakai atau bentuk kesepakatan kerjasama.

Hasil pengamatan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan lokasi dalam penelitian ini banyak potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan bentuk pemanfaatan BOT.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti :

- a. Bagaimana model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan bentuk *build operate transfer (BOT)* ?
- c. Identifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui model *build operate transfer (BOT)* dalam pengelolaan tanah kas desa ?

2. Tinjauan Teori

Terbukanya ruang bagi upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa melalui berbagai Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Otonomi Desa diharapkan nantinya dapat memberikan jalan menuju terciptanya pembangunan desa sehingga terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera. Hadirnya kebijakan Otonomi Desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa Otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain

seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sakinah Nadir : 2013).

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dari hasil aset. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam ativa/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Hal tersebut termasuk pula bantuan-bantuan dari luar negeri yang diperoleh secara sah (Doli D. Siregar; 2014).

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Sebagai upaya optimalisasi aset desa, maka perlu adanya pengelolaan harta kekayaan desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, menentukan jenis aset desa terdiri dari : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerjasama desa dan kekayaan desa yang berasal dan perolehan lain yang sah.

Adapun ketentuan mengenai kekayaan asli desa dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yaitu :Tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa.

Tanah kas desa merupakan aset desa yang bersifat strategis sehingga bentuk pemanfaatannya harus tepat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk :

1. Menganalisa model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan;
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan model *Build Operate Transfer (BOT)*;
3. Mengidentifikasi potensi aset desa melalui model *build operate transfer (BOT)* dalam pengelolaan tanah kas desa.

C. Permasalahan

Bentuk pemanfaatan aset desa melalui bangun guna serah (*Build Operate Transfer/BOT*) memberikan banyak manfaat untuk peningkatan pendapatan desa. Akan tetapi bentuk pemanfaatan aset desa jenis ini belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya aset desa yang belum dapat dimanfaatkan atau bentuk pemanfaatannya masih menggunakan sewa menyewa atau hak guna pakai atau bentuk kesepakatan kerjasama.

Hasil pengamatan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan lokasi dalam penelitian ini banyak potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan bentuk pemanfaatan BOT.

D. Hasil Penelitian

1. Model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Aset Desa merupakan bagian dari harta kekayaan desa yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja desa.

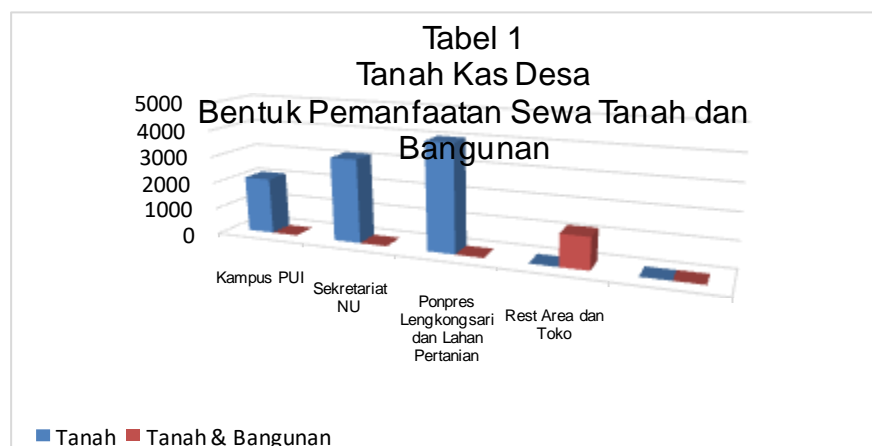
Tanah kas desa merupakan aset desa yang bersifat strategis sehingga bentuk pemanfaatannya harus tepat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Tanah dan bangunan merupakan aset desa dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa (khususnya tanah dan bangunan) yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhirnya akan berdampak pada

peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber pembiayaan desa. Sebaliknya aset desa yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan kemubaziran keuangan desa melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak bernilai tinggi.

Kebijakan bentuk pemanfaatan aset desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dibuat berdasarkan Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dewasari yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.

Bentuk pemanfaatan aset desa terutama untuk tanah kas desa yang sedang berjalan di Desa Dewasari adalah melalui sewa. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dewasari yang terletak pada tempat-tempat strategis, dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, belum mampu memberikan nilai tinggi sebagai akibat tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena pemilihan bentuk pemanfaatan yang kurang tepat.

Pengelolaan tanah kas desa Dewasari berupa tanah dan bangunan seluas 1,8 Ha atau setara dengan 11.000 M² (dengan pembulatan) yang tersebar dalam pemetaan sebagai berikut :



Pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desaharus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Mengingat hal tersebut maka ketepatan penggunaan bentuk pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa menjadi penentu nilai aset yang bernilai tinggi.

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa Dengan Bentuk *Build Operate Transfer (BOT)*

Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk dapat mengurus wilayahnya sendiri dan membangun perekonomiannya sendiri. Banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa diantaranya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki banyak aset diantaranya adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok.

Pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa diatur secara bertingkat mulai tingkat nasional, tingkat kabupaten dan tingkat desa. Pada tingkat nasional dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada tingkat ini tidak mengatur secara teknis mengenai pengelolaan aset desa. Ketentuan mengenai pengelolaan aset desa selanjutnya akan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dikarenakan masing-masing desa mempunyai karakteristik yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, sehingga teknis pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

Bentuk pemanfaatan aset desa melalui model bangun guna serah (*Build Operate Transfer/BOT*) belum bisa dimanfaatkan oleh Desa Dewasari. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan daerah yang dijadikan rujukan dalam pembuatan peraturan desa sehingga tidak ada sanksi yang diakibatkan apabila peraturan yang berlaku tidak ditegakkan. Begitu juga yang menjadi bahan pertimbangannya adalah bentuk pemanfaatan ini sudah dilakukan sejak tahun 1976 dan tahun 1990. Sehingga pemerintah desa belum mampu merubah bentuk pemanfaatan aset desa selain sistem sewa. Selain itu juga sosialisasi terhadap bentuk pemanfaatan aset desa melalui model *build operate transfer* merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak populer di pemerintahan desa sehingga belum bisa diterapkan di Desa Dewasari.

3. Identifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui model *Build Operate Transfer (BOT)* dalam pengelolaan tanah kas desa

Desa Dewasari sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing merupakan daerah penyangga kota di Kabupaten Ciamis yang berpotensi mempunyai nilai yang tinggi melalui pengelolaan aset desa yang optimal.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Desa Dewasari dapat diidentifikasi potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui model pemanfaatan *build operate transfer* (bangun guna serah). Potensi tersebut antara lain bagi tanah yang disewakan dan telah dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dipergunakan untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren. Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model sewa tanah.

E. Rekomendasi

Bentuk pemanfaatan aset desa terutama untuk tanah kas desa yang sedang berjalan di Desa Dewasari adalah melalui sewa. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dewasari yang terletak pada tempat-tempat strategis, dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, belum mampu memberikan nilai tinggi sebagai akibat tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena pemilihan bentuk pemanfaatan yang kurang tepat.

Bentuk pemanfaatan aset desa melalui model bangun guna serah (*build operate transfer/BOT*) belum bisa dimanfaatkan oleh Desa Dewasari. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan daerah yang dijadikan rujukan dalam pembuatan peraturan desa sehingga tidak ada sanksi yang diakibatkan apabila peraturan yang berlaku tidak ditegakkan.

Desa Dewasari dapat diidentifikasi potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui model pemanfaatan *build operate transfer* (bangun guna serah). Potensi tersebut antara lain bagi tanah yang disewakan dan telah dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dipergunakan untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren.

Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model sewa tanah.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Arasina Chandra Adcha Mita;Herniyatun, *Perjanjian BOT (build operate and transfer) Antara PT. Seaword Indonesia dengan*

- PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.*, *Varia Justicia*, Vo. II No. 1, Oktober 2015.
- Doli D. Siregar, *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, 2014.
- Khan,AH;Sharif,M.B;Rehman,S.U.,*Constraints In Adoption Of Build Operate And Transfer (Bot) Projects In Developing Countries - Fact Findings From Pakistan*, *Pakistas Journal of Science Lahore*, Vo. 64, Iss.3 (Sept. 2012).
- Moeh. Yafie Abbas, *Public Private Partnership dalam pembangunan dan pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco)*, 2014.
- Sakinah Nadir,OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*Volume 1 Nomor1 Tahun 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.CV, 2013.
- Urip Santoso, *Perjanjian Bangun Serah Transfer Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas*, *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

**BAGIAN VII
HASIL KAJIAN
MENGENAI KESEHATAN MASYARAKAT**

7.1 Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien *Herniorapy* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

(Rudi Kurniawan¹, Aap Apipudin², Dasep Hidayat³_STIKes Muhammadiyah Ciamis)

A. Latar Belakang

Hernia merupakan produksi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga bersangkutan. Pada hernia abdomen isi perut menonjol melalui defek atau bagian-bagian lemah dari lapisan *muscular aponeurotik* dinding perut (Syamsuhidajat, 2005). *Hernioraphy* membuang kantong hernia disertai tindakan bedah plastik untuk memperkuat dinding perut bagian bawah dibelakang kanalis inguinalis. (qittun, 2008). *Discharge planning* merupakan bagian penting dari pelayanan kepada klien serta keluarga. Hal ini merupakan suatu proses gambaran kerjasama antara tim kesehatan, keluarga, klien, maupun orang penting bagi klien (Carpenito, 2001).

Angka kejadian hernia di dunia dengan perbandingan 1 di antara 3.000 penduduk atau 0,03%. Di amerika insiden hernia 1 diantara 544 penduduk atau 0,18%, kurang lebih 700.000 tiap tahunnya dan 90% terjadi pada laki-laki. Hernia tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi dapat juga pada anak-anak. Insiden hernia dilaporkan 1-5%. Hernia terjadi pada anak-anak usia lebih dari 6 tahun. Kurang lebih 5% dari semua wanita mengalami hernia selama hidupnya. (*medicine*). Di Indonesia insiden hernia 15 diantara 1.000 penduduk atau 1,5%. Hernia sering dijumpai pada laki-laki dengan insiden 12 kali lebih sering dibanding perempuan (Suratun 2010).

Dari data Kementerian Kesehatan Indonesia penyakit sistem cerna pasien rawat inap di Indonesia tahun 2004, hernia menempati urutan ke-8 dengan jumlah 18.145 kasus, 273 diantaranya meninggal dunia (Simarmata, 2003). Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ciamis kasus Hernia pata tahun 2011 sebanyak 242 pasien, tahun 2012 sebanyak 232 pasien dan menunjukkan penurunan jumlah penderita dari tahun sebelumnya. Tindakan operasi paling banyak dilakukan oleh ahli bedah pada tahun 2013 dengan jumlah 276 pasien.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif (Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien *herniorapy* ruang Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling, 58 responden (sampel pada penelitian ini sebanyak 58 orang yang sudah memenuhi kriteria). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi selama proses pelaksanaan *discharge planning klien* yang diberikan perawat terhadap keluarga klien dengan paska operasi herniorhaphy di Ruang Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi *non partisipasif* yaitu peneliti atau observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada subjek yang diamati agar data yang diperoleh tidak bias (Notoatmodjo, 2005).

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian ini, adalah untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien *Herniorapy* di Ruang Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase responden Hernia berdasarkan umur paling banyak terjadi pada umur 41-65 tahun (53,66%), persentase responden Hernia berdasarkan pekerjaan paling banyak terjadi pada jenis pekerjaan berat dua kali lebih besar dibanding pekerjaan ringan, Berdasarkan jenis kelamin paling banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki tiga kali lebih banyak dibanding perempuan, berdasarkan penyakit lain hanya terjadi (15,44%) (Trisnaningrum, 2010).

D. Hasil Analisa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 juni sampai tanggal 23 juli 2014 mengenai Gambaran Pelaksanaan *Discharge Planning* pada pasien *herniorapy* di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Diketahui bahwa pelaksanaan *discharge planning* sebagai upaya untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat secara normal setelah dilakukan pembedahan di Ruang Bedah RSUD Ciamis Tahun 2014, frekuensi tertinggi yaitu 48 tindakan (82,75%) termasuk kategori Cukup Baik. Frekuensi menengah yaitu 9 tindakan (15,51%) termasuk kategori baik dan frekuensi terendah yaitu sebanyak 1 tindakan (1,72%) termasuk kategori Kurang Baik.

Tabel Distribusi Frekuensi Gambaran Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien *Herniorapy* Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Katagorik	F	%
Baik	9	15,51
Cukup Baik	48	82,75
Kurang Baik	1	1,72
Jumlah	58	100

Berdasarkan hasil penelitian dan telah dijelaskan sebelumnya tentang cara mengisi kuesioner, ternyata didapatkan hasil tentang gambaran pelaksanaan *Discharge Planning* pada pasien *herniorapy* dalam upaya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan pada pasien atau keluarganya supaya dalam proses penyembuhan luka *post* oprasi *herniorapy* dapat sembuh secara cepat dan tanpa adanya gejala jejala yang mejadikan luka menjadi lama dalam penyembuhan. Dan hasil dari penelitian didapatkan frekuensi tertinggi yaitu 48 tindakan (82,75%) termasuk kategori Cukup Baik. Frekuensi menengah yaitu 9 tindakan (15,51%) termasuk kategori baik dan frekuensi terendah yaitu sebanyak 1 tindakan (1,72%) termasuk kategori Kurang Baik.

Analisis tiap pernyataan didapat bahwa responden yang belum memahami definisi *Discharge Planning* ternyata masih banyak, hal itu terbukti pada persentase pemberian wejangan pada pasien dan keluarganya sebelum pulang didapatkan frekuensi tertinggi yaitu 48 tindakan (82,75%) termasuk kategori Cukup Baik. Frekuensi menengah yaitu 9 tindakan (15,51%) termasuk kategori baik dan frekuensi terendah yaitu sebanyak 1 tindakan (1,72%) termasuk kategori Kurang Baik.

Sesuai dengan teori menurut Notoatmodjo (2005), bahwa pengetahuan seseorang boleh jadi merupakan penyebab utama timbulnya masalah, tetapi juga kunci utama pemecahan nya. Apabila masyarakat atau pihak kesehatan ingin mengetahui alasan yang ada dibalik perilaku tersebut yang didalamnya termasuk salah satu pengetahuan, Sommerfeld (2001).

Setelah pasien pulang dari rumah sakit diharapkan keluarganya memberikan dukungan kepada pasien ketika melakukan aktivitas yang ringan dan tidak membahayakan atau dapat membuat luka oprasi menjadi buruk. Namun penemuan di lapangan ternyata hanya ada 8 pasien atau (13,79%) yang diberi tau bahwa ketika pasien melakukan

aktivitas harus diberikan dukungan oleh keluarga atau orang yang dekat dengan pasien tersebut.

Satu minggu setelah dinyatakan pulang oleh rumah sakit harus melakukan kontrol keadaan luka nya ke poli. Tetapi hanya 8 pasien dari 58 orang atau (13,79%) yang diberi tau bahwa satu hari sebelum kontrol harus melakukan cek melalui telepon bahwa pasien besok akan melakukan kontrol ke poli dalam. sedangkan 50 orang atau (86,20%) lain nya tidak diberi tau bahwa sehari sebelum kontrol harus memberitahukan dulu ke poli untuk kontrol.

Ketika pasien melakukan aktivitas keluarganya harus melakukan pendampingan kepada pasien supaya ketika pasien melakukan aktivitas tidak terjadi hal yang dapat memperburuk luka operasi pasien. Namun dari hasil penelitian hanya didapatkan 9 orang pasien atau (15,51%) yang diberikan pengetahuan bahwa ketika pasien melakukan aktivitas harus dibarengi pendamping supaya pasien tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang sangat tidak baik untuk masa penyembuhan luka operasi pasien.

Setelah satu minggu pasien pulang dari perawatan di rumah sakit pasien harus melakukan kontrol terhadap luka operasinya ke rumah sakit, dan lamanya pasien diberi tau kapan harus kontrol, hal ini akan mempercepat proses penyembuhan pasien juga dapat kontrol bila terjadi apa lukanya. Infeksi adalah proses invasif oleh mikro organisme dan berpoliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit (Potter & Perry, 2005). Jam kontrol penting diberitahukan pada pasien atau keluarganya supaya tidak ada kekeliruan jam atau rasa kesakitan pasien ketika kontrol dirumah sakit bertambah. Tetapi hanya 11 pasien atau (18,96%) dari 58 pasien yang diberi tahu bahwa satu hari sebelum kontrol harus memberikan informasi dulu lewat telepon pada rumah sakit bahwa pasien akan melakukan kontrol besok, 47 pasien atau (81,03%) pasien lain nya tidak diberi tahu bahwa harus melapor dulu sehari sebelumnya sebelum melakukan kontrol.

E. Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan mengenai gambaran faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *discharge planning* dengan sampel dan desain penelitian yang lebih mendalam dan dengan metode yang berbeda.

F. Daftar Pustaka

- Carpenito, JL. (2001) Nursing Diagnosis. Philadelphia: J.B Lippincott.
 Notoatmodjo, S. (2002) Pendidikan Dan Prilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Notoatmodjo, S. (2005) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qittun. (2008) Asuhan keperawatan hernia. ([http://qittun.blogspot.com/2008/08/asuhan keperawatan klien dengan hernia.html](http://qittun.blogspot.com/2008/08/asuhan_keperawatan_klien_dengan_hernia.html)). (diakses tanggal 03-04-2014).
- Suratun, L. (2010) *Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Sistem Gastrointestinal*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sommerfeld. (2001) Dissability test 10 days after hall acute stroke to predict early discharge home in patients 65 years and older. *Clinical rehabilitation*, 15 : 528- 534
- Trisnaningrum, H. (2010) *Gambaran Penyebab Terjadinya Hernia pada Pasien Post Operasi di ruang Ahmad Dahlan Bedah RS PKU Muhammadiyah Sruweng* <http://digilib.stikesmuhgombong.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtstikesmuhgo-gdl-hestitrisn-1345>. (diakses tanggal 03-04-2014)

7.2 Manajemen Terapeutik Tentang Kontrol Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

(Lilis Lismayanti¹, Jajuk Kusumawaty², Rini Sri Wahyuni³ _ STIKes Muhammadiyah Ciamis)

A. Latar Belakang

Diabetes Mellitus (DM) merupakan sekelompok kelainan heterogen yang di tandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau *hiperglikemia* (Smeltzer & Bare, 2012). DM merupakan gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes dapat didiagnosis berdasarkan kriteria glukosa plasma, baik dengan glukosa sewaktu atau gula darah 2 jam *Post Prandial* (PP). *International Expert Committee* menyebutkan yang terbaru dapat ditambahkan pemeriksaan A1C sebagai pilihan ketiga untuk mendiagnosis diabetes (ADA, 2014)

Selama fase pengobatan *diabetes melitus*, pasien perlu menerapkan manajemen terapeutik diabetes melitus dalam kehidupan sehari-hari sehingga pasien dapat sembuh dari diabetes melitus dan mencegah terjadinya kekambuhan. Manajemen terapeutik adalah pola dalam mengatur dan mengintegrasikan program terapi kedalam kehidupan yang memuaskan dan mencukupi sesuai dengan tujuan pemulihan kesehatan yang ingin dicapai (NANDA, 2010). Manajemen terapeutik pengelolaan pada diabetes melitus terdiri atas lima pilar utama mencakup: edukasi, terapi gizi, aktivitas fisik, kontrol gula darah dan intervensi farmakologis (PERKENI, 2011).

Hasil survey pendahuluan dengan melihat data rekam medik di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis pada tanggal 15 Maret 2016

diketahui bahwa penderita diabetes melitus pada tahun 2013 adalah sebanyak 294 kasus pada tahun 2014 sebanyak 357 kasus pada tahun 2015 sebanyak 314 kasus sedangkan pada periode bulan Januari 2016 sebanyak 41 orang (Rekam Medis RSUD Ciamis, 2016). Berdasarkan data tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan kasus *diabetes melitus* setiap tahunnya.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Metoda deskriptif adalah suatu metoda penelitian dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dalam waktu yang bersamaan (Notoatmojo, 2010)

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 sebanyak 314 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan

penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari data rekam medis untuk mengetahui kadar gula darah pasien dari hasil pemeriksaan laboratorium.

Proses penelitian memerlukan suatu alat untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai kadar gula darah pasien dari hasil pemeriksaan laboratorium yaitu mengenai nilai glukosa sewaktu atau gula darah 2 jam *post prandial* (PP). Adapun pengukuran control gula darah ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Normal, jika nilai Kadar gula darah ≤ 110 mg/dl
- b. Abnormal, nilai Kadar gula darah >110 mg/dl

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian ini, adalah untuk mengetahui sejauhmana penerapan manajemen terapeutik tentang kontrol gula darah pada pasien *diabetes melitus* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Hasil survei pendahuluan dengan melihat data rekam medik di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis pada tanggal 15 Maret 2016 diketahui bahwa penderita diabetes melitus pada tahun 2013 adalah sebanyak 294

kasus pada tahun 2014 sebanyak 357 kasus pada tahun 2015 sebanyak 314 kasus sedangkan pada periode bulan januari 2016 sebanyak 41 orang (Rekam Medis RSUD Ciamis, 2016). Berdasarkan data tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan kasus diabetes melitus setiap tahunnya.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis kepada 8

orang pasien Diabetes Melitus menunjukkan bahwa 3 orang gula darahnya terkontrol karena dalam proses pengobatannya pasien melakukan anjuran pengobatan dengan baik seperti melakukan aktifitas fisik/olahraga teratur, minum obat teratur, namun tidak melakukan anjuran diet DM dengan baik. Sementara pada 5 orang pasien, kadar gula darahnya tidak terkontrol karena pasien tidak melakukan anjuran pengobatan dengan baik seperti tidak melakukan olahraga secara teratur, tidak minum obat sesuai jadwal atau instruksi dari dokter, serta tidak melakukan diet sesuai dengan anjuran diet untuk pasien DM.

D. Hasil Analisa

Hasil penelitian gambaran manajemen terapeutik tentang kontrol gula darah pada pasien *diabetes mellitus* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis menunjukkan lebih banyak pasien kontrol kadar gula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol gula darah pada pasien *diabetes mellitus* dalam kategori abnormal. Hal ini dimungkinkan karena faktor umur, hal ini dikarenakan semakin tua usia seseorang maka akan terjadi penurunan fungsi vital tubuh, salah satunya adalah fungsi kelenjar pankreas yang berperan langsung dalam produksi insulin dan berdampak pada kadar gula dalam darah (Tandra, 2014).

Berdasarkan hasil observasi tingkat kadar gula darah menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih mempunyai kadar gula darah yang tinggi yaitu rata-rata tingkat kadar gula darah pasien *diabetes mellitus* > 110 mg/dl, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini penderita diabetes mellitus memiliki tingkat kadar gula darah yang tinggi. Menurut peneliti hal ini mungkin dikarenakan oleh faktor-faktor lain, seperti faktor makanan, faal hati, aktivitas, obat, penyakit, dan alkohol.

Dimana keadaan tersebut akan dapat menaikkan glukosa dalam darah. badan dan aktivitas yang kurang akan meningkatkan glukosa dalam darah. Aktivitas yang kurang dapat meningkatkan resistensi insulin sehingga kerjanya lebih lambat dan mengurangi pengangkutan glukosa ke dalam sel untuk kebutuhan energi, semakin sedikit aktivitas yang dilakukan maka semakin sedikit glukosa yang dipakai. Selain itu, glukosa darah tergantung pada insulin yang disuntikkan atau obat DM yang diminum, berapa lama memakai obat dan berapa dosisnya maka akan menentukan banyaknya glukosa darah yang turun. Penyakit infeksi virus, bakteri, dan alkohol juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah, penyebaran infeksi virus, bakteri, dan alkohol merupakan stres fisik yang dapat mengeluarkan hormon yang secara tidak langsung dapat menaikkan kadar glukosa dalam darah (Arisman, 2010).

Pengendalian kadar gula darah meliputi 4 aspek, yaitu kontrol diet makan, olahraga, upaya pengobatan serta kontrol gula darah. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Jagir Surabaya

oleh Wardani (2012) menunjukkan bahwa 50% (17 responden) telah melakukan pengendalian kadar gula darah dengan baik. Pengendalian kadar gula darah sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Faktor lain seperti penggunaan insulin yang tidak teratur, makanan tinggi karbohidrat, tingkat stres yang berlebihan, dan aktivitas yang kurang dapat menjadikan kadar gula darah tidak terkendali (Ekawati, 2012). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasien DM yang melakukan kontrol kadar gula darah dengan gula darah sewaktu lebih banyak mempunyai nilai kadar gula darah normal tercatat sebanyak sebanyak 33 orang (54,1%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegiarto pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa peningkatan kadar gula darah sewaktu terjadi bukan semata-mata hanya karena keteraturan terhadap jadwal kontrol saja, melainkan masih terdapat faktor lain seperti faktor usia yang menyebabkan kadar gula darah meningkat (Soegiarto, 2013). Walaupun hasil penelitian menunjukkan lebih banyak pasien yang mempunyai nilai kadar gula darah sewaktu dengan kategori normal, hal ini menggambarkan dengan melakukan kontrol kadar gula darah sewaktu secara teratur dapat mengevaluasi seberapa banyak jumlah penderita dm dengan nilai kadar gula darah normal dan jumlah pasien yang mempunyai nilai kadar gula darah abnormal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lafata tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dengan melakukan kontrol kadar gula darah sewaktu secara teratur memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kadar gula darah pasien DM. Semakin rutin pasien melakukan kontrol kadar gula darah sewaktu dan sesuai jadwal maka nilai kadar gula darahnya akan semakin baik (Lafata, 2013).

Hasil serupa juga terlihat dari hasil kontrol kadar gula darah 2 jam setelah makan lebih dari setengah jumlah responden menunjukkan pasien memiliki nilai kadar gula darah normal sebanyak 31 orang (50,8%). Selama satu sampai dua jam setelah makan glukosa darah akan mencapai angka paling tinggi, di mana makanan ditimbun di hati dalam bentuk glikogen. Peningkatan kadar gula darah (hiperglikemia) terjadi akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, karena organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Saat zat makanan yang ditimbun di hati dalam bentuk glikogen menyebabkan glukosa dalam darah akan mencapai angka paling tinggi. (Imamauel, 2009).

Dalam penelitian ini juga menunjukkan nilai kadar gula darah 2 jam setelah makan pada setiap pemeriksaan terlihat lebih banyak pasien mempunyai nilai kadar gula darah normal. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Lafata (2013), dimana pasien DM dengan nilai kadar gula darah buruk terlihat signifikan pada pemeriksaan ke-2 dan ke-3. Selain itu, hasil yang didapatkan juga terlihat pasien dengan nilai kadar gula darah sedang jumlahnya terus

meningkat. Hal ini menunjukkan dengan melakukan kontrol kadar gula darah 2 jam setelah makan secara teratur, maka nilai kadar gula darah akan menjadi lebih terkendali.

Lebih lanjut lagi dengan melakukan pemantauan kadar gula darah 2 jam setelah makan secara teratur dapat menjadi *warning alarm* pasien DM sehingga pasien akan lebih waspada pada pemeriksaan berikutnya apabila kadar gula darahnya buruk (Lafata, 2013)

E. Rekomendasi

Rumah Sakit hendaknya meningkatkan masukan dalam menyusun program pengontrolan DM dengan berfokus pada kontrol gula darah yang sangat bermanfaat bagi pasien untuk mempertahankan kondisi dan beradaptasi dengan penyakit DM yang bersifat kronis serta untuk mengingatkan kembali kepada pasien mengenai pentingnya melakukan kontrol kadar gula darah secara teratur, misalnya dengan memberikan buku catatan jadwal kontrol dan hasil pemeriksaan kadar gula darah pasien selalu dapat memantau kadar gula darahnya.

F. Daftar Pustaka

- ADA (American Diabetes Association), (2014) Diabetes Statistic. Tersedia dalam <http://www.diabetes.org>. [Diakses Tanggal 10 Maret 2016].
- Arisman. 2010. Buku Ajar Ilmu Gizi Obesitas, Diabetes Melitus, dan Dislipidemia Konsep, Teori dan Penanganan Aplikatif. Jakarta :EGC.
- Ekawati, (2012). Hubungan kadar glukosa darah terhadap hypertriglyceridemia pada penderita diabetes mellitus. Seminar Nasional Kimia UneseaS (2009). Hipoglikemia postprandial.Kedokteran Indonesia. Jakarta.
- Lafata, (2013) Patient-reported use of collaborative goal setting and glycemic control among patients with diabetes. Patient Educ Couns [Internet]. Elsevier Ireland Ltd; 2013 Jul [cited 2016 Juni 15];92(1):94–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- NANDA. (2010). Panduan Diagnosa Keperawatan Definisi dan Klasifikasi. Jakarta : Prima Medika Notoatmodjo,S, (2010). Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi, Rineka Cipta Jakarta.
- PERKENI, (2011). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. Jakarta.
- Smeltzer & Bare, (2012). Keperawatan Medikal Bedah, Edisi ke delapan, Vol 8, Jakarta: EGC
- Soegiarto, (2013) Kepatuhan Kontrol Dengan Tingkat Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Di Rumah Sakit Baptis Kediri. Jurnal STIKES Volume 5, No. 2, STIKES RS Baptis Kediri
- Tandra, (2014). Segala sesuatu yang harus anda ketahui tentang Diabetes : Panduan Lengkap Menenal dan Mengatai Diabetes

dengan Cepat dan Mudah. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Wardani (2012) Hubungan Dukungan Keluarga Dan Pengendalian Kadar Gula Darah Dengan Gejala Komplikasi Mikrovaskuler. Jurnal. Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

7.3 Gambaran Perilaku Cuci Tangan Pada Anak di MI Bojongsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2017

(Elis Roslianti¹, Heni Heryani², Fitriani³ _STIKes Muhammadiyah Ciamis)

A. Latar Belakang

Salah satu indikator dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat adalah upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes, 2016). Menurut Neoroni (2009) PHBS di rumah tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. PHBS secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap masalah kesehatan yaitu terjadinya kesakitan maupun kematian. Banyak penyakit-penyakit yang merupakan penyebab kematian yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak bersih dan sehat seperti penyakit malaria, diare, *typhus abdominalis*, demam berdarah, cacangan, sakit kulit, gizi buruk, flu burung, dan bahkan flu babi yang kini cukup menghebohkan dunia. Seperti halnya perilaku buang air besar sembarangan, perilaku cuci tangan terlebih cuci tangan pakai sabun masih merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan, khususnya terkait PHBS.

Sekolah sebagai salah satu sasaran PHBS di tatanan institusi pendidikan perlu mendapatkan perhatian mengingat usia sekolah bagi anak juga merupakan masa rawan terserang berbagai penyakit serta munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-12), misalnya diare, cacangan dan anemia. Dampak lainnya dari kurang dilaksanakan PHBS antara lain suasana belajar yang tidak mendukung karena lingkungan sekolah yang kotor, menurunnya semangat dan prestasi belajar dan mengajar di sekolah, menurunkan citra sekolah di masyarakat umum (Ananto, 2011).

Perilaku cuci tangan pakai sabun khususnya setelah kontak dengan *feses* ketika ke jamban dan membantu anak ke jamban, dapat menurunkan insiden diare hingga 42-47%. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun juga dikatakan dapat menurunkan transmisi ISPA hingga

lebih dari 30% ini diperoleh dari kajian yang dilakukan oleh Curtis (2003). Menurut Curtis, tanpa sabun, bakteri dan virus tidak akan hilang. Air hanya sebatas menghilangkan kotoran yang tampak, tetapi tak menghilangkan cemaran mikrobiologis yang tidak tampak. Kesehatan seseorang akan terpenuhi jika bisa membiasakan perilaku mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sebelum melakukan kegiatan apapun yang memasukkan jari-jari kedalam mulut atau mata (Risna, 2011).

Kemenkes (2015), mengatakan bahwa cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan 50% insiden flu burung. Praktek cuci tangan pakai sabun juga dapat mencegah infeksi kulit dan mata. Beberapa kajian ini menunjukkan bahwa intervensi cuci tangan pakai sabun dianggap sebagai pilihan perilaku yang efektif untuk pencegahan berbagai penyakit menular. Artinya, sekitar satu juta anak di dunia dapat diselamatkan tiap tahun dengan cuci tangan. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu harus menggunakan sabun dan membilas tangan menggunakan air mengalir.

Hasil penelitian Syarifah Fazlin (2012) menunjukkan bahwa (ada hubungan yang signifikan (bermakna) dengan korelasi yang lemah dan negatif maksudnya hubungan yang berlawanan arah antara tingkat pengetahuan siswa tentang teknik mencuci tangan yang benar dengan kejadian diare di SDN 01 Pontianak Utara. Simpulan penelitian ini adalah semakin kurang tingkat pengetahuan siswa tentang teknik mencuci tangan yang benar maka kejadian diare semakin tinggi. Diharapkan siswa-siswi dapat menerapkan perilaku hidup sehat dengan selalu disiplin melakukan praktek mencuci tangan yang benar guna meghindari terjadinya resiko diare.

1. Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas IV, V di MI Bojongsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sebanyak 77 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya satu variabel perilaku cuci tangan pada anak dengan sub variabel perilaku cuci tangan pada anak berdasarkan waktu sebelum makan dan sesudah buang air besar. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner berupa lembar *cheklist*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa *univariat*.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini, adalah untuk mengetahui gambaran perilaku cuci tangan pada anak MI Bojongsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 orang Guru MI Bojongsari diperoleh informasi angka kejadian diare Januari-Februari 2017 sebanyak 10 orang anak, selanjutnya melalui wawancara dengan beberapa siswa yang pernah mengalami diare kurang memahami dan tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan baik dan benar, walaupun sudah pernah mendapat pengajaran tentang cuci tangan. Anak mencuci tangan sembarangan yang penting tangan dibasahi air tanpa memperhatikan langkah cuci tangan yang baik dan benar juga tidak menggunakan sabun.

D. Hasil Analisa

Tabel. Gambaran Perilaku Cuci Tangan Pada Anak MI Bojongsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Sub Variabel	F	%
1	Baik	32	41,6
2	Cukup	45	58,4
	Jumlah	77	100

Perilaku cuci tangan pada anak di MI Bojongsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, frekuensi tertinggi yaitu berkategori tidak baik sebanyak 45 orang (58,4%). Berdasarkan analisis item kuesioner sebagian responden berperilaku tidak baik cuci tangan sebelum makan sebanyak 45 orang (58,4%), dan berperilaku tidak baik cuci tangan sesudah buang air besar sebanyak 47 orang (61%). Banyaknya siswa yang kategori tidak baik dalam perilaku cuci tangan adalah kurangnya pengetahuan siswa dalam tata cara cuci tangan yang baik salah satunya mencuci tangan menggunakan sabun, sehingga akan mempengaruhi perilaku siswa dalam mencuci tangannya. Hal ini diperkuat wawancara langsung dengan siswa didapatkan bahwa sebagian siswa menyatakan kurang memahami tata cara mencuci tangan yang baik, tidak mengetahui manfaat mencuci tangan dan tidak mengetahui resiko apabila tidak melakukan cuci tangan.

Hal ini sesuai Green dalam notoatmodjo (2012) kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku

(*behavior causes*), dan faktor non perilaku (*non behavior causes*). Perilaku kesehatan itu sendiri juga dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat dan pengetahuan merupakan faktor pre disposisi untuk terciptanya perilaku. Sebelum anak berperilaku mencuci tangan, ia harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat dan apa resikonya apabila tidak mencuci tangan dengan sabun bagi dirinya atau keluarganya. Melalui pendidikan kesehatan mencuci tangan anak mendapatkan pengetahuan pentingnya mencuci tangan sehingga diharapkan anak tahu, bisa menilai, bersikap yang didukung adanya fasilitas mencuci tangan sehingga tercipta perilaku mencuci tangan. Sementara dalam perilaku baik dan tidak baik dalam mencuci tangan hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2012), yang mengatakan bahwa terbentuknya perilaku mencuci tangan individu dapat terjadi karena proses kematangan dan proses interaksi dengan lingkungan. Cara yang inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Terbentuknya dan perubahan perilaku karena proses interaksi antara individu dengan lingkungan ini melalui suatu proses yakni proses belajar atau di lingkungan yang ada diluar.

Depkes (2009) cuci tangan pakai sabun adalah salah satu tindakan sanitasidengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Penggunaan sabun selain membantu singkatnya waktu cuci tangan, dengan menggosok jemari dengan sabun menghilangkan kuman yang tidak tampak minyak/ lemak/kotoran di permukaan kulit, serta meninggalkan bau wangi. Perpaduan kebersihan, bau wangi dan perasaan segar merupakan hal positif yang diperoleh setelah menggunakan sabun.

Hasil penelitian Ali Rosidi (2010) di SD Negeri Podo 2 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare dan tidak ada hubungan sanitasi makanan dengan kejadian diare.

E. Rekomendasi

Bagi sekolah agar lebih meningkatkan pengetahuan siswanya dengan cara mengadakan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa, serta meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat lebih mendidik terutama masalah perilaku cuci tangan yang baik.

F. Daftar Pustaka

- Ahmadi, (2015). Psikologi Sosial. Rineka Cipta. Jakarta
- Ananto, (2011). Hubungan Penerapan PHBS Keluarga dengan Kejadian Diare Balita di Kelurahan Tawangmas Kota Semarang. Tesis Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Depok;
- Arikunto,S, (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Asfuah, (2010). Buku Azar Gizi Untuk Kebidanan. Yogyakarta : Muha Medika.
- Budiarso, (2015). Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyakit diare. <http://www.research.etd/librariy%2FLove-Commitment.Pdf>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.
- Dariyo A, (2012). Psikologi pengembangan dewasa muda. Jakarta: PT. Grasindo Widia Sarana Indonesia (Grasindo).
- Depkes RI, (2010). Bimbingan dalam Tatalaksana Penderita Diare Pada Anak. Jakarta : Direktorat Jenderal P2M dan PLP. <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2017
- Dinkes Provinsi Jawa Barat, (2015). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, Bandung.
- Djojodiningrat, (2009). Penyananggulangan Diare Akut. http://www.djojodiningrat.blogspot/diare_akut/2451. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017.
- Hidayat, Aziz Alimul. (2009). Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah Edisi 2. *Cetakan ketiga*. Jakarta: Salemba Medika.
- Irwanto, (2012). *Psikologi Anak*. Penerbit Indeks: Jakarta.
- Iswara (2011), *Penting dan Mudahnya Mencuci Tangan*. Dari http://www.pkblogs.com/dan_iweblog. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017
- Kemendes, (2015). *Angka kejadian diare di Indonesia*. Tersedia dalam http://www.depkes.go.id/und_ex.php?news&task=viewarticle, pada tanggal 18 Maret 2017.
- _____, (2016). *Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*: Jakarta..
- Khaerudin, (2011). *Setiap Tahun 100.000 Anak Mati Karena Diare di Indonesia*. Tersedia dalam <http://www.compas.com>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2017
- Maryunani (2010). *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Keperawatan*. Jakarta : Trans Info Media.
- Mujiyanto, (2012). *Pengaruh Pemberian Penyuluhan PHBS Tentang Mencuci Tangan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Mencuci Tangan Pada Siswa Kelas V Di SDN Bulukantil Surakarta*. Skripsi.
- Neoroni (2009). *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*. Bakti Husada : Jakarta
- Niken, (2010). *Seri Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga*. Pusat Promosi Kesehatan. Jakarta

- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012), Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta (2010),
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012), Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nursalam, (2013). Konsep Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Nuryanti, (2012). Ilmu Kesehatan Anak dalam Konteks Kesehatan Lingkungan. Jakarta : EGC.
- Riduan Akdon (2007). Rumus dan Data dalam Analisis dan Statistik. Bandung : Alfabeta
- Risna, (2011). Penyebaran penyakit berbasis lingkungan.http:www.googlebook.com. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017
- Sahman, (2012). Ciri-ciri anak usia sekolah. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D. Bandung : Alfabeta.
- Widayatun (2012). Ilmu Prilaku. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Widjaja, (2014). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Nuha Medika: Yogyakarta.
- Wijono, (2012). Pesan Kesehatan :Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Usia Dini dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka.

7.4 Analisis Faktor Terkait Bayi Berat Lahir Rendah di Puskesmas Lumbung Kabupaten Ciamis Tahun 2017

(Sri Utami Asmarani¹Diah. M Utari² _ STIKes Muhammadiyah Ciamis)

A. Latar Belakang

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Definisi ini berdasarkan pada hasil observasi epidemiologi yang 1.000 kelahiran hidup atau angka BBLR sekitar 7,5%. Penyebab utama kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah prematur dan BBLR (29%), asfiksia (27%), *tetanus neonatorum* (10%) dan masalah pemberian ASI (10%).

Hasil Riskesdas (2013) menyatakan bahwa persentase bayi yang BBLR sebesar 10,2%. Masalah pada BBLR terutama pada prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Prevalensi BBLR di Jawa Barat yaitu 10,8%.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah BBLR di Jawa Barat adalah 18.997 kejadian atau dapat dikatakan ada sekitar 10% balita Indonesia yang lahir dengan BBLR pada tahun 2012.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Ciamis sebanyak 136 dari 18.430 kelahiran hidup, sehingga didapatkan AKB sebesar 7,38 per 1.000 KH. Penyebab kematian bayi tersebut salah satunya dikarenakan BBLR yaitu berjumlah 37 bayi. Jumlah BBLR di Kabupaten Ciamis sebanyak 877 bayi yang tersebar di seluruh wilayah kerja Puskesmas (Dinkes Kabupaten Ciamis, 2016). Tahun 2017 diketahui bahwa Puskesmas Lumbung merupakan Puskesmas dengan jumlah BBLR tertinggi di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 46 dari 487 bayi.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan rancangan penelitian adalah *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Lumbung. Sampel pada penelitian ini adalah 165 ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari data kelahiran (laporan tahunan Puskesmas), kohort ibu, buku KIA dan data primer dengan mewawancarai ibu dengan menggunakan kuesioner.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah *editing data, coding data, entry data, cleaning data, scoring*. Setelah proses pengolahan data selesai, dilanjutkan dengan proses analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program *software* komputer.

B. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Lumbung Kabupaten Ciamis.

C. Permasalahan

Di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya selalu ada kematian bayi yang terjadi membuktikan bahwa bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram mempunyai kontribusi terhadap kesehatan yang buruk.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 AKB di Indonesia tercatat 32 kematian per akibat BBLR. Puskesmas Lumbung merupakan puskesmas dengan jumlah BBLR tertinggi di Kabupaten Ciamis yang menyumbangkan kematian bayi akibat BBLR tersebut. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang Kabupaten Ciamis.

D. Hasil Analisa

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang lebih dominan berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah KEK. Ibu yang mengalami KEK selama masa kehamilan akan berdampak negatif pada siklus kehidupan keturunannya. Ibu dengan KEK umumnya memiliki kenaikan berat badan hamil yang rendah. Akibatnya berat badan bayi yang dilahirkannya rendah atau BBLR.

Menurut Fikawati, dkk (2015) menyatakan bahwa proses pertumbuhan BBLR umumnya lambat apalagi bila tidak diberikan ASI eksklusif 6 bulan dan diikuti dengan praktik pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) dini. Akibatnya bayi tersebut akan tumbuh menjadi balita yang mengalami Kurang Energi Protein (KEP).

Selanjutnya dengan keterbatasan pola asuh dan akses terhadap makanan balita tersebut akan berkembang menjadi anak usia sekolah kurang gizi dan produktivitas rendah. Pada saat remaja tersebut menikah dan kemudian hamil dalam kondisi kurang gizi maka remaja tersebut akan menjadi ibu yang KEK dan siklus ini akan berlanjut kembali.

Pengaruh status gizi kurang yang dialami ibu terhadap hambatan pertumbuhan janin diawali dengan menurunnya ekspansi volume darah pada ibu yang kurang gizi. Akibat rendahnya ekspansi volume darah tersebut maka peningkatan curah jantung yang terjadi pada masa kehamilan menjadi tidak optimal. Curah jantung yang tidak optimal membuat aliran darah yang membawa zat-zat gizi ke plasenta menjadi berkurang dan lemah sehingga akibatnya transfer zat-zat makanan ke janin sedikit atau kurang. Aliran darah yang lemah bisa mengakibatkan ukuran plasenta mengecil karena aliran darah tersebut tidak membutuhkan saluran yang besar untuk dilewati.

Lingkungan gizi yang buruk pada masa janin akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan yang berdampak permanen pada janin bukan hanya meningkatkan resiko mortalitas dan morbiditas pada bulan pertama kehidupan namun juga dapat berdampak pada penurunan fungsi kognitif, gangguan pertumbuhan, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di usia dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan status gizi sebelum dan selama proses kehamilan.

Kondisi KEK pada ibu hamil harus segera ditindaklanjuti sebelum usia kehamilan mencapai 16 minggu. Pemberian makanan

tambahan yang tinggi kalori dan protein dipadukan dengan penerapan porsi kecil tapi sering, pada faktanya memang berhasil menekan angka kejadian BBLR di Indonesia.

Program bidan di desa untuk daerah-daerah pedalaman merupakan kunci utama menurunkan angka kelahiran bayi BBLR, dengan didukung oleh dana besar pemerintah lewat paket Pemberian Makanan Tambahan/PMT ibu hamil KEK. Termasuk di dalamnya pemberian penyuluhan kesehatan untuk ibu hamil serta program Desa Siaga, adalah program nasional yang membutuhkan peran serta masyarakat untuk menyukseskannya

Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan, wanita usia subur sudah harus mempunyai gizi yang baik, misalnya dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm. Apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR.

E. Rekomendasi

Diharapkan petugas kesehatan terutama bidan yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Lumbung untuk lebih meningkatkan program penyuluhan terkait BBLR dan melakukan pemantauan LILA pada saat pertama kali ibu memeriksakan kehamilannya, sehingga dapat diketahui secara dini kelainan kelainan yang berkaitan dengan status gizi dan upaya penanggulangannya.

F. Daftar Pustaka

- Abbas et al. 2017. Maternal Risk Factors Associated With Low Birth Weight at Maternity Teaching Hospital in Erbil City: A Case Control Study. *The Malaysian Journal Of Nursing*, vol 8 (4) : 2017
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bari, A. 2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
- Bhaskar et al. 2015. A Case Control Study on Risk Factors Associated with Low Birth Weight Babies in Eastern Nepal. *International Journal of Pediatrics*, vol 7.
- Brown, J E et al. 2005. *Nutrition Through The Life Cycle*. Thomson Wadsword.
- Demelash et al. 2015. Risk Factor Low Birth Weight in Bale Zone Hospitals, South-East Ethiopia: a case-control study. *BMC Pregnancy & Childbirth*, 15:264.
- Depkes RI. 2009. *Kumpulan Buku Acuan Kesehatan Bayi Baru Lahir*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2012. *Profil Kesehatan*

- Jawa Barat. Bandung.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. 2016. *Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis*. Ciamis.
- Fikawati, dkk. 2015. *Gizi Ibu dan Bayi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hassan et al. 2011. Relationship Between Maternal Characteristics and Neonatal Birth Size in Egypt. *Eastern Mediterranean Health Journal*, vol 17:4
- Haksari. 2009. *Faktor Resiko Yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Lahir Berat Badan Rendah*. Bina Pustaka. Jakarta.
- Hermawanto, H. 2010. *Biostatistika Dasar, Dasar-Dasar Statistik Dalam Kesehatan*. Trans Info Media. Jakarta.
- Jayant et al. 2011. Maternal Risk Factors Associated for Low Birth Weight Neonates: A Hospital Based Case Control Study In Rural Area of Western Maharashtra, India. *National Journal of Community Medicine*, vol 2:3
- Kemenkes RI. 2010. *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Ditjen Bina Gizi dan KIA. Jakarta.
- Kemenkes RI. 2012. *Buku Standar Pelayanan ANC Terpadu*.
- Kristyanasari, W. 2010. *ASI, Menyusui dan Sadari*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Liliyana. 2008. *Penyebab Terjadinya BBLR*. EGC. Jakarta.
- Manuaba. 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan*. EGC. Jakarta.
- Maryanti, D, dkk. 2011. *Buku Ajar Neonatus, Bayi dan Balita*. Trans Info Media. Jakarta.
- Merzalia, N. 2012. *Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2011*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Depok.
- Ndu et al. 2015. Maternal Risk Factors Associated With Low Birth Weight Neonates: A Multi-Centre, Cross- sectional Study in A Developing Country. *Journal of Neonatal Biology*, vol 4:3.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prawirohardjo, S. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Bina Pustaka. Jakarta.
- Proverawati, A dan Ismawati, C. 2010. *Berat Bayi Lahir Rendah*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Riskesdas, 2013, *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional Tahun 2013*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Riyanto, A. 2011. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta
- Rustam, M. 2011. *Sinopsis Obstetri Fisiologi dan Obstetri Patofisiologi*. EGC. Jakarta.
- Saefuddin. 2010. *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka. Jakarta.
- Siswosudarmo, R. 2008. *Obstetri Fisiologi*. Pustaka Cendekia.

Yogyakarta.

Soetjiningsih. 2009. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Alfabeta. Bandung.

WHO. 2004. *Low Birth Weight: Country, Regional and Global Estimates, UNICEF*, New York.

Wiknjosastro. 2009. *Faktor Yang Merupakan Predisposisi Terjadinya Kelahiran Prematur*. Interaksa. Jakarta.

Wong. 2009. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Cetakan I*. EGC. Jakarta.

Yuliva. 2009. *Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Berat Lahir Bayi di RSUP dr. M. Djamil Padang*. Berita Kedokteran Masyarakat: Vol 25, No 2.

BAGIAN VIII

PENUTUP

Alhamdulillah, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ringkasan Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2018-2019. Buku ini memuat hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari bagian hasil kajian mengenai Penanganan Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Industri, Ekonomi dan UMKM, Kepariwisataaan, pertanian dan perikanan serta hasil kajian mengenai Kesehatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencoba untuk merangkum hasil-hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis ini dengan harapan dapat diterapkan di Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.